



grobogan
gumuhut gumuhut gumuhut



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
KAB. GROBOGAN

TAHUN

2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT

Jalan S. Parman Nomor 38B, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon (0292) 421190, Faksimile (0292) 421190,
Laman inspektorat.grobogan.go.id, Pos-el inspektorat.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 18 Maret 2025



INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

MOCH. SUSILO, S.H., M.M., CFA, CGCAE, QIRGP.
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 19650908 199103 1 005

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang di dalamnya melaporkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas segala macam dukungan dan kontribusi terhadap keberhasilan dan ketercapaian kinerja selama tahun 2024. Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik.

LKjIP 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil yang

berdampak pada pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga semua upaya yang telah dilakukan bersama mendapatkan Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 20 Maret 2025



IKHTISAR EKSKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2024 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja secara teknis dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dengan 17 (tujuh belas) sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%)**.
- b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.
- c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 99,36%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 87,43%, dan Angka Kemiskinan sebesar 92,47%.
- d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (87,43%).
- e. Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja	
			Target	Realisasi	%			
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.					100,03	Tercapai	Sangat Tinggi
1	Indeks Pembanguana Manusia (IPM)	Indeks	71,53	72,02	100,69	Tercapai	Sangat Tinggi	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,28 *)	99,36	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.					110,34	Tercapai	Sangat Tinggi
3	Tingkat Pembangunan Insfrastruktur Daerah	%	80,68	82,97	102,84	Tercapai	Sangat Tinggi	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,16	69,21	87,43	Tidak Tercapai	Tinggi	
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (145,00)	Sedang (95,91)	140,75	Tercapai	Sangat Tinggi	
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah					100,34	Tercapai	Sangat Tinggi
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	5,41	108,20	Tercapai	Sangat Tinggi	
7	Angka Kemiskinan	%	10,03–10,63	11,43	92,47	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas					115,99	Tercapai	Sangat Tinggi

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	BB (71,00)	A (82,35)	115,99	Tercapai	Sangat Tinggi
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat				109,46	Tercapai	Sangat Tinggi
9	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,4	93,23	118,92	Tercapai	Sangat Tinggi
10	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan					107,23	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Per Indikator Tujuan					106,66	Tercapai	Sangat Tinggi
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2023 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir							

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, semuanya 17 (tujuh belas) sasaran **TERCAPAI (100,00%)**, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **138,56%**.
- Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator **TERCAPAI (87,09%)** dan sebanyak 4 (empat) indikator **TIDAK TERCAPAI (12,91%)**. Empat indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase Infrastruktur Jalan, Drainase, dan Sumber Daya Air Kondisi Baik (91,69%), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang (99,42%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (99,43%), dan Nilai SAKIP (94,05%).
- Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, semuanya berkinerja **SANGAT TINGGI (100%)**, dengan rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar **155,48%**.

3. Tingkat Efisiensi Tujuan dan Sasaran

- Tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**, dengan tingkat efisiensi sebesar **11,03%** atau senilai

Rp.322.087.371.420,- (tiga ratus dua puluh dua milyar, delapan puluh tujuh juta, tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah)

- a. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, semua indikator sasaran **EFISIEN**, dengan **tingkat efisiensi sebesar 43,47%**.

4. Tindak lanjut rekomendasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia Nomor B/251/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **65,93** atau predikat **B**. Hasil evaluasi tersebut menetapkan 11 (sebelas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan yang sudah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengunggah dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja tahun berjalan milik seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id

Tindak lanjut rekomendasi ke-1:

Memastikan semua dokumen SAKIP diunggah di esr.mepnpan.go.id, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan menyusun Surat Edaran terkait jadwal penyusunan dan pengunggahan di esr.menpan.go.id dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah dan melakukan pemantauan secara periodik di esr.menpan.go.id. Adapun data dukung pada tautan https://bit.ly/Rekom1_2025.

2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemda dan Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal berada pada level pengampu kinerja yang tepat.
3. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar seluruh indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant and time-bound*) dan cukup.
4. Memperbaiki kualitas pohon kinerja/*logical framework* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu mengidentifikasi *critical success factor* yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam mewujudkan kinerja utama. Kemudian, pohon kinerja dimanfaatkan menjadi dasar perumusan cascading kinerja hingga ke individu,

5. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Tindak lanjut rekomendasi ke-2, Ke-3, ke-4 dan ke-5:

Pada rekomendasi ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, upaya yang sudah dilakukan, diantaranya adalah melakukan reuiu dan pendampingan dalam perbaikan dokumen penjenjangan kinerja/pohon kinerja, sekaligus melakukan pemetaan *crosscutting*, yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan indikator kinerja SMART-C, sebagai bahan dalam penyusunan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemda dan Perangkat Daerah untuk periode berikutnya. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan:

- a. Pendampingan desk penyusunan dokumen penjenjangan kinerja level perangkat daerah, yang dilakukan oleh Bappeda Kab. Grobogan pada tanggal 6-7 Desember 2024, yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Smart ID malang dan Akademisi Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Penguatan SAKIP dan dilanjutkan dengan desk penyusunan Penjenjangan Kinerja Level Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda pada tanggal 16-17 Desember 2024, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan Desk sebelumnya yang dilakukan oleh Bappeda.
- c. Internalisasi dimasing-masing perangkat daerah dalam penyusunan penjenjangan kinerja level perangkat daerah.

Dokumentasi Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah tanggal 6-7 Desember 2024.



Dokumentasi Kegiatan Penguatan SAKIP Kinerja Perangkat Daerah tanggal 16-17 Desember 2024.



Dokumentasi Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah tanggal 16-17 Desember 2024



6. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala dengan melengkapi setiap capaian kinerja dengan analisis yang memadai pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi.
7. Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, perlu upaya peningkatan pemahaman penyusunan laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menyajikan Laporan Kinerja yang dapat menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan serta memberikan umpan balik dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan kualitas antara laporan kinerja pada tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah.
8. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang.

Tindak lanjut rekomendasi ke-6, ke-7 dan ke-8:

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ke-6, ke-7 dan ke-8, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan diantaranya telah melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025, dengan narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan reviu dan evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan penekanan agar pengukuran kinerja berkala dilengkapi dengan analisis yang memadai pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi. Penekanan yang lain kepada Perangkat daerah agar memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang.

Selain itu, sebagai upaya perbaikan penyusunan Laporan Kinerja, telah disediakan *template* laporan kinerja perangkat daerah dalam memudahkan perangkat daerah menyusun laporan kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

*Dokumentasi Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja bagi
Perangkat Daerah*



Sedangkan untuk rekomendasi yang lain masih dalam proses tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SILAKIP untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala, memberikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah, dan melakukan follow up atas saran dan rekomendasi yang telah diberikan

Tindak lanjut:

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam proses pembaharuan aplikasi SILAKIP untuk mempermudah dalam penggunaan oleh Perangkat Daerah, diantaranya dengan menambah fitur saran dan rekomendasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah, fitur evaluasi internal, fitur pengumpulan dan pengukuran kinerja dan pemeringkatan penilaian kinerja perangkat daerah.

2. Inspektorat selaku *quality assurance* dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat memberikan catatan dan rekomendasi yang mendalam, sesuai dengan akar permasalahan pada

masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah.

Tindak Lanjut:

Meningkatkan kualitas rekomendasi berdasarkan akar permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Upaya yang akan dilakukan diantaranya akan melakukan bimbingan teknis kepada Tim Evaluasi AKIP Kabupaten yang terdiri dari unsur Inspektorat, Bappeda, BPPKAD dan Setda.

3. Perangkat Daerah agar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal sebagai dasar perbaikan SAKIP yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut:

Memastikan seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya yang akan dilakukan dengan penugasan kepada Tim Evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mendatangi kantor Perangkat Daerah secara langsung atau menghadirkan di kantor Tim Evaluasi.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sangat penting dan akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 20 Maret 2025



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	I
KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSKUTIF	IV
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR GRAFIK	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan.....	4
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan.....	10
E. Perangkat Daerah	11
F. Sumber Daya Aparatur	16
G. Sumber Daya Anggaran	19
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>).....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026	23
B. Tujuan Pembangunan Daerah.....	24
C. Program Pembangunan Daerah.....	25
D. Indikator Kinerja Utama	30
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Pengukuran Kinerja	50
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan.....	52
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	60
1. Misi 1	61
2. Misi 2	76
3. Misi 3	97
4. Misi 4	125

5. Misi 5	149
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	158
E. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024	161
F. Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan	167
G. Inovasi Kabupaten Grobogan	169
BAB IV PENUTUP	173
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....	5
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	6
Tabel 1. 3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2024	7
Tabel 1. 4	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan	8
Tabel 1. 5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan	10
Tabel 1. 6	Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	17
Tabel 1. 7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2024	19
Tabel 2. 1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.....	31
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 1	Skala Pengukuran Kinerja.....	51
Tabel 3. 2	Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	52
Tabel 3. 3	Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ...	56
Tabel 3. 4	Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	57
Tabel 3. 5	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024.	57
Tabel 3. 6	Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	58
Tabel 3. 7	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2024	59
Tabel 3. 8	Target dan Realisasi Tujuan 1	61
Tabel 3. 9	Target dan Realisasi Sasaran 1.....	65
Tabel 3. 10	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.....	65
Tabel 3. 11	Target dan Realisasi Sasaran 2.....	69
Tabel 3. 12	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.....	70

Tabel 3. 13	Target dan Realisasi Sasaran 3.....	73
Tabel 3. 14	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.....	73
Tabel 3. 15	Target dan Realisasi Tujuan 2	76
Tabel 3. 16	Target dan Realisasi Sasaran 4.....	79
Tabel 3. 17	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.....	80
Tabel 3. 18	Target dan Realisasi Sasaran 5.....	91
Tabel 3. 19	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.....	91
Tabel 3. 20	Target dan Realisasi Sasaran 6.....	94
Tabel 3. 21	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.....	94
Tabel 3. 22	Target dan Realisasi Tujuan 3	97
Tabel 3. 23	Target dan Realisasi Sasaran 7	100
Tabel 3. 24	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.....	101
Tabel 3. 25	Target dan Realisasi Sasaran 8.....	111
Tabel 3. 26	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8.....	111
Tabel 3. 27	Target dan Realisasi Sasaran 9.....	114
Tabel 3. 28	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9.....	115
Tabel 3. 29	Target dan Realisasi Sasaran 10.....	118
Tabel 3. 30	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10.....	118
Tabel 3. 31	Target dan Realisasi Sasaran 11.....	122
Tabel 3. 32	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11.....	122
Tabel 3. 33	Target dan Realisasi Tujuan 4	126
Tabel 3. 34	Target dan Realisasi Sasaran 12.....	128
Tabel 3. 35	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12.....	129
Tabel 3. 36	Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2024	132
Tabel 3. 37	Target dan Realisasi Sasaran 13.....	135
Tabel 3. 38	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13.....	136
Tabel 3. 39	Target dan Realisasi Sasaran 14.....	138
Tabel 3. 40	Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan	139
Tabel 3. 41	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14.....	145
Tabel 3. 42	Target dan Realisasi Sasaran 15.....	146
Tabel 3. 43	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15.....	146

Tabel 3. 44	Target dan Realisasi Tujuan 5	149
Tabel 3. 45	Target dan Realisasi Sasaran 16	150
Tabel 3. 46	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16	150
Tabel 3. 47	Target dan Realisasi Sasaran 17	153
Tabel 3. 48	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17	153
Tabel 3. 49	Analisis Efisiensi pada Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2024.....	158
Tabel 3. 50	Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2024	161
Tabel 4. 1	Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024	173
Tabel 4. 2	Capaian Kinerja di level Sasaran Perjanjian Kinerja	175
Tabel 4. 3	Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tujuan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024....	178
Tabel 4. 4	Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Sasaran pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024....	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Grobogan	4
Gambar 1. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2024	9
Gambar 3. 1 Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah tanggal 6-7 Desember 2024.....	163
Gambar 3. 2 Kegiatan Penguatan SAKIP Kinerja Perangkat Daerah tanggal 16-17 Desember 2024.....	163
Gambar 3. 3 Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah tanggal 16-17 Desember 2024.....	164
Gambar 3. 4 Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja bagi Perangkat Daerah.....	165

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1	Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan kabupaten sekitar	62
Grafik 3. 2	Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	62
Grafik 3. 3	Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah	63
Grafik 3. 4	Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya	64
Grafik 3. 5	Perbandingan IKLH dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....	77
Grafik 3. 6	Perbandingan IKLH dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024 ..	77
Grafik 3. 7	Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Tahun 2024.....	78
Grafik 3. 8	Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024	78
Grafik 3. 9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024.....	98
Grafik 3. 10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024.....	98
Grafik 3. 11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024	99
Grafik 3. 12	Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Provinsi dan Nasional.....	99
Grafik 3. 13	Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024.....	99
Grafik 3. 14	Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2026.....	127
Grafik 3. 15	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kabupaten sekitar Tahun 2021-2024.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja dipertegas pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja yang dimaksud yakni Laporan Kinerja Interm dan Laporan Kinerja Tahunan. Dalam Teknis penyusunannya, juga diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja yakni maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kabupaten Grobogan sendiri juga mempertegas hal tersebut melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi enam tahapan yang dilalui. Di antaranya penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Satu di antara upaya implementasi SAKIP, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun

2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024; dan

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2024, dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2024 pada tanggal 20 Oktober 2024 dikarenakan adanya Perubahan APBD Tahun 2024 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Grobogan Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Demikian pula pada penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah yang di dalamnya melakukan pengukuran capaian kinerja terhadap target PK Bupati Grobogan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memenuhi sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara $110^{\circ}15'$ BT— $111^{\circ}25'$ BT dan 7° LS— $7^{\circ}30'$ LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Gambar 1. 1
Peta Kabupaten Grobogan



b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 135.2/314/II/2021 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari $\pm 1.975,86$ km² menjadi $\pm 2.022,849$ km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa, 7 kelurahan dan 1.463 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	62	145,288
2	Karangrayung	19	99	144,272
3	Penawangan	20	74	75,230
4	Toroh	16	120	126,716
5	Geyer	13	102	205,141
6	Pulokulon	13	115	136,948
7	Kradenan	14	77	111,663
8	Gabus	14	93	163,930
9	Ngaringan	12	86	119,154
10	Wirosari	14	93	151,026
11	Tawangharjo	10	59	93,066
12	Grobogan	12	52	101,490
13	Purwodadi	17	108	78,177
14	Brati	9	53	56,561
15	Klambu	9	45	52,349
16	Godong	28	87	92,934
17	Gubug	21	57	65,518
18	Tegowanu	18	50	54,260
19	Tanggungharjo	9	31	50,126
Jumlah		280	1.463	2.023,849

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 2.022,25$ Km² terdiri dari lahan pertanian sawah 41,31% dan 44,23% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 85,54% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0—8°. Dataran ini, sebagian

besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.

- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50—100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 8—15° dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100—500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15°, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.520.974 jiwa terdiri dari 765.275 jiwa (50,31%) penduduk laki-laki dan sebanyak 755.699 jiwa (49,69%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,27%. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 6.673 jiwa atau naik 0.44%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.910	22.723	45.633	100.82
2	Karangrayung	53.340	52.274	105.614	102.04
3	Penawangan	34.169	33.636	67.805	101.58
4	Toroh	60.941	60.864	121.805	100.13
5	Geyer	34.407	34.165	68.572	100.71
6	Pulokulon	57.663	56.473	114.136	102.11
7	Kradenan	43.465	43.019	86.484	101.04
8	Gabus	38.439	38.036	76.475	101.06

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
9	Ngaringan	36.788	35.515	72.303	103.58
10	Wirosari	49.067	48.405	97.472	101.37
11	Tawangharjo	30.962	30.173	61.135	102.61
12	Grobogan	41.468	40.604	82.072	102.13
13	Purwodadi	72.157	72.523	144.680	99.50
14	Brati	26.818	26.145	52.963	102.57
15	Klambu	20.307	19.880	40.187	102.15
16	Godong	45.195	44.983	90.178	100.47
17	Gubug	44.395	44.118	88.513	100.63
18	Tegowanu	30.529	30.199	60.728	101.09
19	Tanggungharjo	22.255	21.964	44.219	101.32
Jumlah		765.275	755.699	1.520.974	101.27

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 752 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.851 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 314 jiwa/km². Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 144.680 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40.187 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	45.633	314
2	Karangrayung	144,27	105.614	732
3	Penawangan	75,23	67.805	901
4	Toroh	126,72	121.805	961
5	Geyer	205,14	68.572	334
6	Pulokulon	136,95	114.136	833
7	Kradenan	111,66	86.484	775
8	Gabus	163,93	76.475	467

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
9	Ngaringan	119,15	72.303	607
10	Wirosari	151,03	97.472	645
11	Tawangharjo	93,07	61.135	657
12	Grobogan	101,49	82.072	809
13	Purwodadi	78,18	144.680	1.851
14	Brati	56,56	52.963	936
15	Klambu	52,35	40.187	768
16	Godong	92,93	90.178	970
17	Gubug	65,52	88.513	1.351
18	Tegowanu	54,26	60.728	1.119
19	Tanggunganharjo	50,13	44.219	882
Jumlah		2.023,85	1.520.974	752

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14) tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	52.404	49.395	101.799
2	5-9	60.113	56.382	116.495
3	10-14	59.972	56.555	116.527
4	15-19	58.450	55.144	113.594
5	20-24	59.481	56.761	116.242
6	25-29	60.710	56.857	117.567
7	30-34	59.397	55.530	114.927
8	35-39	57.227	54.996	112.223
9	40-44	55.698	54.943	110.641
10	45-49	51.398	52.077	103.475
11	50-54	45.087	46.439	91.526
12	55-59	44.948	49.914	94.862
13	60-64	39.091	41.474	80.565
14	65-69	27.844	27.808	55.652
15	70-74	17.246	17.755	35.001
16	75+	16.209	23.669	39.878
Jumlah		765.275	755.699	1.520.974

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2024 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.055.622 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) mencapai 465.352 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44,08%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1. 2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2024



d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6.673 jiwa atau naik 0.44%.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2024

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0.89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0.39%
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0.69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0.94%
5	2020	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0.68%
6	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0.37%
7	2022	754.396	746.749	1.501.145	12.198	0.82%
8	2023	761.591	752.710	1.514.301	13.156	0.88%
9	2024	765.275	755.699	1.520.974	6.673	0.44%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. perpustakaan; dan
 - q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

E. Perangkat Daerah

Perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten

Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah, terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggunharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebanyak 37 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiraturium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturium Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),

18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggunharjo),
20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboraturium Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu:

38. RSUD dr. R. Sudjati Soemodiardjo Purwodadi,
39. RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan
40. RSUD Ki Ageng Selo.

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus ASN sebanyak 12.308 orang, yang tersebar di 48 Perangkat Daerah dan tiga Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan RSUD Ki Ageng Selo.

Data ASN per 31 Desember 2024 sebanyak 12.308 orang, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 2.329 orang (23.3%), demikian juga dengan jumlah pejabat fungsional meningkat dari 8.247 orang menjadi 10.873 orang (31.8%)

Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
1	Sekretariat Daerah	-	108	7	115	41
2	Sekretariat DPRD	-	25	4	29	9
3	Inspektorat	-	46	1	47	30
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	-	44	6	50	19
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	21	2	23	6
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	20	1	21	1
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	58	2	60	13
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	28	4	32	16
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	26	4	30	15
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	48	13	61	34
11	Dinas Kesehatan	-	1.299	1.026	2.325	2.166
12	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	-	23	6	29	13
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	26	2	28	13
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	18	7	25	15
15	Dinas Lingkungan Hidup	-	35	4	39	18
16	Dinas Pekerjaan Umum dan	-	123	12	135	35

NO	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
	Penataan Ruang					
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	34	3	37	13
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	23	2	25	13
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	27	3	30	10
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	25	1	26	10
21	Dinas Pendidikan	-	3529	4343	7872	7.711
22	Dinas Perhubungan	3	39	4	43	8
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	50	7	57	18
24	Dinas Pertanian	-	50	81	131	113
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	22	8	30	17
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	41	28	69	40
27	Dinas Sosial	-	16	3	19	8
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	23	6	29	19
29	Satuan Polisi Pamong Praja	-	30	13	43	15
30	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	-	335	171	506	421
31	Kecamatan Brati	-	12	1	13	1
32	Kecamatan Gabus	-	12	1	13	1
33	Kecamatan Geyer	-	20	1	21	1
34	Kecamatan Godong	-	16	1	17	1
35	Kecamatan Grobogan	-	17	1	18	1
36	Kecamatan Gubug	-	14	1	15	1
37	Kecamatan Karangrayung	-	14	1	14	1
38	Kecamatan Kedungjati	-	16	1	16	1
39	Kecamatan Klambu	-	14	1	15	1
40	Kecamatan Kradenan	-	17	1	17	1
41	Kecamatan Ngaringan	-	13	1	14	1
42	Kecamatan Penawangan	-	17	1	18	1
43	Kecamatan Pulokulon	-	9	1	10	1
44	Kecamatan Purwodadi	-	40	1	41	1
45	Kecamatan Tanggunharjo	-	12	1	12	1
46	Kecamatan Tawangharjo	-	16	1	17	1
47	Kecamatan Tegowanu	-	24	1	25	1
48	Kecamatan Toroh	-	19	1	20	1
49	Kecamatan Wirosari	-	26	1	26	1
JUMLAH		3	6.520	5.788	12.308	10.873

Sumber: BKPPD Kabupaten Grobogan 2024.

Dari jumlah PNS dan PPPK Kabupaten Grobogan sebanyak 12.308 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak yakni Dinas Pendidikan dengan jumlah ASN sebanyak 7.872 orang yang mana terdiri dari fungsional sebanyak 7.711 orang dan 161 Tenaga Pendukung Pendidikan serta Pejabat Struktural. Selanjutnya diikuti dari Dinas Kesehatan yakni sebanyak 2.325 orang yang mana terdiri dari 2.166 Pejabat fungsional dan 159 tenaga pendukung kesehatan serta pejabat fungsional.

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.792.344.317.000,00	2.837.798.917.036,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	402.924.503.000,00	452.054.448.100,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.387.991.814.000,00	2.384.316.468.936,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.428.000.000,00	1.428.000.000,00
2.	Belanja Daerah	2.804.649.517.000,00	2.946.924.946.057,00
2.1	Belanja Operasi	2.021.366.342.958,00	2.146.768.148.563,00
2.2	Belanja Modal	313.452.180.042,00	331.801.329.394,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	18.854.999.000,00	17.379.473.100,00
2.4	Belanja Transfer	450.975.995.000,00	450.975.995.000,00
	Surplus/Defisit	(12.305.200.000,00)	(146.280.769.935,00)
3.	Pembiayaan Daerah	12.305.200.000,00	109.126.029.021,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	89.392.200.000,00	176.213.029.021,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64.669.000.000,00	151.489.829.021,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	24.723.200.000,00	24.723.200.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	77.087.000.000,00	67.087.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal	15.450.000.000,00	5.450.000.000,00
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang	61.637.000.000,00	61.637.000.000,00
	Pembiayaan Neto	12.305.200.000,00	109.126.029.021,00

Sumber: 1. Perda Kab. Grobogan Nomor 9 Tahun 2023
2. Perda Kab. Grobogan Nomor 7 Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2024

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 yang ingin diwujudkan yaitu “Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”. Berdasarkan pentahapan arah kebijakan tahunan RPJMD pada tahun 2023, maka RKPD Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengambil tema: “Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”, dengan prioritas pada: (1) Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi; (2) Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup; (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan (4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.

Pembangunan di Kabupaten Grobogan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2022 dengan arah kebijakan pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pembangunan tahun 2023 masih di titikberatkan pada pemantaban kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga satabilitas ekonomi daerah dan menjaga sustainabilitas kegiatan perekonomian masyarakat setelah dikuatkan pada tahun 2022. Selain pemantapan kondisi perekonomian, pembangunan tahun 2023 juga mulai menyentuh peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun kedua ini meliputi:

- 1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat,
- 2) Pemetaan potensi investasi dan promosi,
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa,
- 4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial,
- 5) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja,
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat,
- 7) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman,
- 8) Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan),
- 9) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, dan
- 10) Pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelompok makro isu strategis Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19,
- 2) Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri,

- 3) Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan,
- 4) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, dan
- 5) Memperkuat kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2021–2026) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu **Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana,
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing,
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dan
5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan. Pada tahun 2023 Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan SIPD beserta perubahannya sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program sesuai SIPD tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi pertama sebanyak 21 program sebagai berikut:

- 1).Program Pengelolaan Pendidikan,
- 2).Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- 3).Program Pembinaan Perpustakaan,
- 4).Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- 5).Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
- 6).Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,
- 7).Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
- 8).Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 9).Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- 10).Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan,
- 11).Program Pengendalian Penduduk,
- 12).Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
- 13).Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),
- 14).Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,
- 15).Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
- 16).Program Penanganan Kerawanan Pangan,
- 17).Program Pengawasan Keamanan Pangan,
- 18).Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- 19).Program Peningkatan Kualitas Keluarga,
- 20).Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan
- 21).Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana”, program pembangunan yang mendukung misi kedua sebanyak 23 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- 2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
- 3). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
- 4). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
- 5). Program Penataan Bangunan Gedung,
- 6). Program Penyelenggaraan Jalan,
- 7). Program Pengembangan Jasa Konstruksi,
- 8). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- 9). Program Penatagunaan Tanah,
- 10). Program Pengembangan Perumahan,
- 11). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
- 12). Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU),
- 13). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
- 14). Program Perencanaan Lingkungan Hidup,

- 15). Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
- 16). Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),
- 17). Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
- 18). Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
- 19). Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat,
- 20). Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,
- 21). Program Pengelolaan Persampahan,
- 22). Program Penanggulangan Bencana, dan
- 23). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi ketiga sebanyak 42 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
- 2). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
- 3). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
- 4). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
- 5). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
- 6). Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
- 7). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
- 8). Program Penyuluhan Pertanian,
- 9). Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
- 10). Program Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
- 11). Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
- 12). Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,

- 13). Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,
- 14). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- 15). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- 16). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
- 17). Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 18). Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
- 19). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
- 20). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),
- 21). Program Pengembangan UMKM,
- 22). Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
- 23). Program Promosi Penanaman Modal,
- 24). Program Pelayanan Penanaman Modal,
- 25). Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
- 26). Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- 27). Program Penataan Desa,
- 28). Program Peningkatan Kerja Sama Desa,
- 29). Program Administrasi Pemerintahan Desa,
- 30). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat,
- 31). Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
- 32). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 33). Program Pemberdayaan Sosial,
- 34). Program Rehabilitasi Sosial,
- 35). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
- 36). Program Penanganan Bencana,
- 37). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,
- 38). Program Perencanaan Tenaga Kerja,
- 39). Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
- 40). Program Penempatan Tenaga Kerja,
- 41). Program Hubungan Industrial, dan
- 42). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, program pembangunan yang mendukung misi keempat sebanyak 26 program sebagai berikut:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 2). Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- 3). Program Perekonomian dan Pembangunan,
- 4). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,
- 5). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- 6). Program Pendaftaran Penduduk,
- 7). Program Pencatatan Sipil,
- 8). Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
- 9). Program Pengelolaan Profil Kependudukan,
- 10). Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- 11). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
- 12). Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
- 13). Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial,
- 14). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
- 15). Program Pengelolaan Arsip,
- 16). Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,
- 17). Program Perizinan Penggunaan Arsip,
- 18). Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- 19). Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
- 20). Program Penyelenggaraan Pengawasan,
- 21). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
- 22). Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 23). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 24). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
- 25). Program Kepegawaian Daerah, dan
- 26). Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat”, program pembangunan yang mendukung misi kelima sebanyak 10 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Kebudayaan
- 2). Program Pengelolaan Permuseuman
- 3). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
- 4). Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa,
- 5). Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,
- 6). Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
- 7). Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
- 8). Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial,
- 9). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan
- 10). Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022—2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Dimensi Kesehatan:</p> $I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ <p>Dimensi Pendidikan:</p> $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran:</p> $I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{In - In_{(\min)}}{In_{\max} - In_{\min}}$ <p>IPM:</p> $IPM = \sqrt[2]{I_{\text{Kes}} \times I_{\text{Pddk}} \times I_{\text{Peng}}} \times 100$	BPS	Disdik Dinkes
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}}$	BPS	DP3AKB
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS	Disdik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
	pendidikan.	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	BPS	Disdik
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinkes
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pemenuhan atas Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) = Kelembagaan PUG (7 Prasyarat) + Outcome/hasil pelaksanaan PUG	Kemen PPPA	DP3AKB

Misi 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik+ Cakupan pelayanan Sistem Drainase +Persentase Irigasi kondisi baik+Persentase sarana perhubungan kondisi baik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni+Persentase Kesesuaian tata ruang +Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman+Cakupan pelayanan air limbah domestik) dibagi 8	BAPPEDA dan DPUPR	DPUPR Disperakim Dishub
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	$\{(Nilai\ Indeks\ Bahaya \times Nilai\ Indeks\ Kerentanan) \div Nilai\ Ketahanan\} \times 100\%$	BNPB	BPBD
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen		DPUPR	DPUPR
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	$\% = \frac{Realisasi\ RTRW}{Rencana\ Peruntukan} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	(Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman + Cakupan pelayanan air limbah domestik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni) dibagi 3	Disperakim	Disperakim
		8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	$VCR = \frac{Volume\ lalu\ lintas}{Kapasitas\ ruas\ jalan} \times 100\%$	Dishub	Dishub
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks	$Ind = \frac{Kualitas\ air\ yang\ ada}{Kualitas\ air\ sesuai\ standar} \times 100\%$	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH
		10. Indeks kualitas udara	Indeks	$Ind = \frac{Kualitas\ udara\ yang\ ada}{Kualitas\ udara\ sesuai\ standar} \times 100\%$		
		11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	$Ind = \frac{jumlah\ lahan\ berfungsi\ resapan}{Jumlah\ lahan\ yang\ ada} \times 100\%$		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	Nilai Pengurangan Sampah Plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan sampah sebelum ke TPA dibagi 2		
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	Nilai indeks kelembagaan + nilai indeks peringatan dini + nilai indeks Pendidikan + nilai indeks mitigasi + nilai indeks kesiapsiagaan	BNPB	BPBD

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	PDRB tahun (n)-PDRB tahun (n-1)/PDRB Tahun (n-1) x 100%	BPS	Disperindag Dinkop UKM
		7. Angka Kemiskinan	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	BPS	Dinsos Bappeda

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n – kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 dikali 100	BPS	Dispertan Disnakkam
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n – kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n – kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	Jumlah pendapatan sub sektor usaha pariwisata dibagi nilai PAD x 100%	Disporabudpar	Disporabud-par BPPKAD
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	Jumlah nilai investasi pada tahun n	DPMPSTSP	DPMPSTSP
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	$IDM = \frac{1}{3} (IS + IE + IL)$ Dimana: IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi	Kemendes PDT	Dispermasdes Pemerintah Desa

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				IL = Indeks Lingkungan		
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	Persentase PPKS tahun n dikurangi persentase PPKS tahun n-1	Dinsos	Dinsos
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) $\sum \text{Pengangguran (orang)}$ $\sum \text{Angkatan Kerja (orang)}$	BPS	Disnakertrans

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Mulai Tahun 2023, telah dilakukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyeselarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan	Kemen PANRB	Setda Inspektorat Seluruh PD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				<p>Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, bahwa terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dikenal dengan 'double track', terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari penjumlahan dari hasil Evaluasi RB General dan RB Tematik. Evaluasi RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategi reformasi birokrasi, sedangkan RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.</p>		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB				
	11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	Jumlah nilai IKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik dikali 100	Setda	Seluruh Perangkat Daerah				
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri	Kemendagri	Bappeda				
	12. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) pada domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.	Kemen PANRB	Diskominfo				
	13. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah. Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut:	Kemen PANRB	Setda Bappeda Inspektorat BPPKAD Diskominfo Seluruh PD				
				<table><tr><th>Predikat/ Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA >90–100</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level</td></tr></table>			Predikat/ Nilai	Interpretasi	AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
				Predikat/ Nilai			Interpretasi			
AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level									

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
					individu.		
				A > 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.		
				BB > 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.		
				B	Baik		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				> 60 – 70	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.		
				CC > 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.		
				C > 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB																					
				D > 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP																							
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut: <table><tr><th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr><tr><td>1</td><td>Belum Ada</td><td>0,0<skor<1,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1,0≤skor≤2,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Berkembang</td><td>2,0≤skor≤3,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0≤skor≤4,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0≤skor≤4,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Optimum</td><td>4,5≤skor≤5,0</td></tr></table>		Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	0,0<skor<1,0	2	Rintisan	1,0≤skor≤2,0	3	Berkembang	2,0≤skor≤3,0	4	Terdefinisi	3,0≤skor≤4,0	5	Terkelola dan Terukur	4,0≤skor≤4,5	6	Optimum	4,5≤skor≤5,0	BPKP	Inspektorat
Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor																										
1	Belum Ada	0,0<skor<1,0																										
2	Rintisan	1,0≤skor≤2,0																										
3	Berkembang	2,0≤skor≤3,0																										
4	Terdefinisi	3,0≤skor≤4,0																										
5	Terkelola dan Terukur	4,0≤skor≤4,5																										
6	Optimum	4,5≤skor≤5,0																										
		27. Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n		BPK	BPPKAD																					
	14. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem		KASN	BKPPD																					

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB															
				informasi yang dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>Kategori/ Nilai</th><th>Indeks</th><th>Sebutan</th></tr><tr><td>IV/325-400</td><td>0,81-1,00</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>III/250-324</td><td>0,61-0,80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>II/175-249</td><td>0,41-0,60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>I/100-174</td><td>0,20-0,40</td><td>Buruk</td></tr></table>	Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan	IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik	III/250-324	0,61-0,80	Baik	II/175-249	0,41-0,60	Kurang	I/100-174	0,20-0,40	Buruk		
Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan																			
IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik																			
III/250-324	0,61-0,80	Baik																			
II/175-249	0,41-0,60	Kurang																			
I/100-174	0,20-0,40	Buruk																			

Visi 5 : Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	Persentase penurunan konflik sosial + persentase penurunan pelanggaran trantibum dibagi 2	Bakes-bangpol Satpol PP	Bakesbangpol Satpol PP
	15. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
	pembangunan daerah	budaya dan Kesenian yang dilestarikan				
	16. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran konflik SARA yang terjadi dikali 100	Bakes- bangpol Setda	Bakesbangpol Setda
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum yang terjadi dikali 100	Satpol PP	Satpol PP

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2024 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2024.

Pada tahun 2024 terjadi penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan sebanyak dua kali yaitu Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Perda Kab. Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan Perda Kab. Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan dan Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Grobogan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan: (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pemerintah Kabupaten
Grobogan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,53	71,53
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,84
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,34	12,34
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,04	7,04
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,14	75,14
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)	Madya (0,6375–0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,68	80,68
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	79,16	79,16
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (145,00)	Sedang (145,00)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	87,22	87,22
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,34	92,34
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	76,07	76,07
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,	9) Indeks kualitas air	Indeks	80,10	51,05

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
	pengelolaan sampah serta limbah B3	10) Indeks kualitas udara	Indeks	87,15	87,15
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,75	58,16
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	46,00	46,00
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,68	0,68
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,00±1,00	5,00±1,00
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,03–10,63	10,03–10,63
	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23	1,23
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50	0,50
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,59	1,59
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,47	1,47
	8. Meningkatkan daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	870,467	870,467
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa membangun	Indeks	0,70	0,70
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20	4,20

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (71,00)	B (71,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,70)	B (77,70)
		23) Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30	3,30
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	BB (70,10)	BB (70,10)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,120)	Level 3 (3,120)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (255,00)	Kategori III (255,00)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	78,40	78,40
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	78,40	78,40
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Terdapat perubahan target pada indikator sasaran ke-9 yaitu Indeks Kualitas Air, yang semula 80,10 menjadi 51,05, dan indikator sasaran ke-11 yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang semula 62,75 menjadi 58,16. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan target yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Grobogan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052, sebagai tindak lanjut adanya ketentuan perubahan parameter dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada tanggal 11 Januari 2024, dan dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 20 Oktober 2024.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 17 Oktober 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 hanya menyesuaikan dengan alokasi perubahan anggaran, maka target kinerja tujuan dan sasaran masih sama sebagaimana yang ditetapkan pada target tahun 2024 RPJMD tahun 2021-2026.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, serta kabupaten sekitar. Selanjutnya, dilaksanakan inventarisasi program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persen, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Pengukuran ketercapaian kinerja melalui perbandingan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dengan satuan persen. Kategori ketercapaian kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $\geq 100\%$, dan
2. **Tidak Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $< 100\%$.

Sesuai ketentuan ketercapaian kinerja di atas, pengkategorian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel berikut:

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan persentase capaian kinerja atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika target kinerja tercapai atau capaian kinerja sebesar $\geq 100\%$, dan persentase capaian atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran lebih besar dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika target kinerja tidak tercapai atau persentase capaian atau rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 10 (sepuluh) indikator dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2021—2026. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisa si target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
MISI I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing									
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembangu na Manusia (IPM)	Indeks	71,53	72,02	100,69	Sangat Tinggi	73,55	97,92
		2. Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,28 *)	99,36	Sangat Tinggi	87,19	98,96
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,34	12,48	101,13	Sangat Tinggi	12,36	100,97
		2. Rata-rata lama Sekolah	%	7,04	7,29	103,55	Sangat Tinggi	7,10	102,68
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	75,14	75,24	100,13	Sangat Tinggi	75,30	99,92
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Mady a (0,63 75– 0,772 4)	Madya	100,00	Sangat Tinggi	Utama (0,7725 – 0,9074)	66,67
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana									
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur	3. Tingkat Pembangunan	%	80,68	82,97	102,84	Sangat Tinggi	82,30	100,81

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisa si target Akhir RPJMD	
				Target	Realisasi	%	Kategori			
	daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.		Insfrastruk tur Daerah							
		4.	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	Indeks	79,16	69,21	87,43	Tinggi	79,95	86,57
		5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Seda ng (145, 00)	Sedang (95,91)	140,75	Sangat Tinggi	Sedang (140,00)	138,64
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberday a air kondisi baik	%	87,22	79,97	91,69	Sangat Tinggi	89,22	89,63
		6.	Persentase kesesuaian pemanfaata n ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,34	91,80	99,42	Sangat Tinggi	92,90	98,82
		7.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,06	77,137	101,40	Sangat Tinggi	76,28	101,12
		8.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategor i	B (0,20- 0,44)	B (0,31)	129,55	Sangat Tinggi	B (0,20- 0,44)	129,55
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,05	52,58	103	Sangat Tinggi	80,95	64,95
		10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,15	90,8	104,19	Sangat Tinggi	87,88	103,32
		11.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	58,16	57,83	99,43	Sangat Tinggi	63,55	91,01
		12.	Indeks Kinerja Pengelolaa n Sampah	Indeks	46,00	52,55	114,24	Sangat Tinggi	50,00	105,10
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,87	127,94	Sangat Tinggi	0,72	120,83
Misi III: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Sainq										

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	5,41	108,20	Sangat Tinggi	6±1	90,17
		7. Angka Kemiskinan	%	10,03 – 10,63	11,43	92,47	Sangat Tinggi	9,23 – 9,81	83,49
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	3,31	269,11	Sangat Tinggi	1,23	269,11
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	4,72	944	Sangat Tinggi	1,48	318,92
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,59	5,55	349,06	Sangat Tinggi	2,63	211,03
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	3,01	204,76	Sangat Tinggi	1,53	196,73
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	870,456	2.643,826	303,73	Sangat Tinggi	4.391,539	
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7	0,75	107,14	Sangat Tinggi	0,72	104,17
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,40	1,40	100,00	Sangat Tinggi	1,40	100,00

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,20	3,23	123,10	Sangat Tinggi	4,00	119,25

Misi IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	BB (71,00)	A (82,35)	115,99	Sangat Tinggi	BB (75,00)	109,80
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Kategori/Nilai	B (77,70)	B (84,50)	108,75	Sangat Tinggi	B (79,70)	106,02
		23. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (65,48)	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Inovatif	100,00
13	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30	3,57	108,18	Sangat Tinggi	3,50	102,00
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat/Nilai	B (70,01)	B (65,93)	94,05	Sangat Tinggi	BB (73,50)	89,70
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,319)	106,38	Sangat Tinggi	Level 3 (3,15)	99,65
		27. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	WTP	100,00
15	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (273)	107,06 %	Sangat Tinggi	Kategori III (260)	105,00

Misi V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,4	93,23	118,92	Sangat Tinggi	82,94	112,41
		10. Rata-Rata	%	100,0	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	Kategori		
		capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum		0			Tinggi		
16	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,4	93,23	118,92	Sangat Tinggi	82,94	112,41
17	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00

*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2023 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai ketercapaian dan skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	2	100,03	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3	110,34	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	2	100,34	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	115,99	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan	2	109,46	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
	Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.			
	Rata-rata capaian kinerja per Indikator Tujuan	10	106,66	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja per Tujuan	5	107,23	Sangat Tinggi

Tabel 3. 4
Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Tujuan	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	5	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
	Jumlah	5	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 dari lima tujuan yang ditetapkan, semuanya tercapai ($\geq 100,00\%$) dan berkinerja sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja antara 100,02% sampai 115,99%.

Tabel 3. 5
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	2	102,34	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,13	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	1	100,00	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	4	105,51	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	4	105,21	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	1	127,94	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	4	441,73	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1	303,73	Sangat Tinggi
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	1	107,14	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori	1	100,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial			
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	1	123,10	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	2	104,38	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	1	108,18	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	3	100,14	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	107,06	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	1	118,92	Sangat Tinggi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	2	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Sasaran		31	153,99	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Sasaran		17	138,56	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

*Tabel 3. 6
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2024*

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	17	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		17	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari sebanyak 17 sasaran yang ditetapkan, menunjukkan sebanyak 17 sasaran berkinerja sangat tinggi dengan realisasi capaian $\geq 100\%$ yaitu antara 100% sampai dengan 441,73%.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
I.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,41	70,97	71,49	72,02
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,89	86,18	86,18	86,28
	1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,45	12,46	12,48
	2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,11	7,26	7,28	7,29
	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,84	74,93	75,04	75,24
II.	4. Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya
	3. Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	78,40	86,07	86,46	82,97
	4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,21	69,43	67,12	69,21
	5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,50)	Sedang (111,59)	Sedang (97,03)	Sedang (85,91)
	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	82,82	86,07	86,46	79,97
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,50	96,12	91,80	91,8
	7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,76	75,93	76,14	77,14
	8. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,27)	B (0,21)	B (0,31)
	9. Indeks Kualitas Air	Indeks	76,25	60,26	51,05	52,58
	10. Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,03	86,56	86,87	90,8
	11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	64,18	53,09	58,16	57,83
	12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,00	48,09	52,73	52,55
	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62	0,81	0,83	0,87
	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	5,98	4,89	5,41
	7. Angka Kemiskinan	%	12,74	11,80	11,72	11,43
	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	2,25	0,17	3,31
	15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,45	3,77	5,10	4,72
	16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,67	5,50	6,88	5,55
	17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,34	6,39	3,09	3,01
	18. Nilai investasi di daerah	Milyar Rupiah	734,385	8.658,007	2.159,525	2.643.826

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
19.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,67	0,69	0,73	0,75
20.	Persentase penurunan PPKS	%	NA	1,35	1,40	1,4
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,38	4,40	4,02	3,23
IV.	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B 64,73	B 66,25	BB 73,86	A (82,35)
22.	Rata-rata nilai IKM	Kategori	6,86	B (83,08)	B (83,13)	84,5
23.	Indeks inovasi daerah	Indeks	Inovatif 43,35	Inovatif 56,65	Inovatif 63,85	Sangat Inovatif 65,48
24.	Indeks SPBE	Indeks	2,50	3,37	3,37	3,57
25.	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (62,96)	B (63,27)	B (64,25)	B (65,93)
26.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,201)	Level 3 (3,319)
27.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (179,50)	Kategori II (192,5)	Kategori III (273,00)	Kategori III (273,00)
V.	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	61,21	80,00	80,00	93,23
	10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	61,21	80,00	80,00	93,23
30.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan fluktuasi realisasi indkator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2021-2024, dapat dilihat bahwa rata-rata *trend* capaian indikator tersebut menunjukkan peningkatan dan perbaikan.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD tahun 2021—2026. Penyajian untuk subbab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

a. Tujuan 1

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan **meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan** diformulasikan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan realisasi capaian sebesar 100,69% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi capaian sebesar 99,36%. Kategori kinerja kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100,03%. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3. 8
Target dan Realisasi Tujuan 1*

Target dan Realisasi Tahun 2024								
No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,53	72,02	100,69	73,55	97,92
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,28	99,36	87,19	98,96
Rata-rata capaian						100,03	98,44	

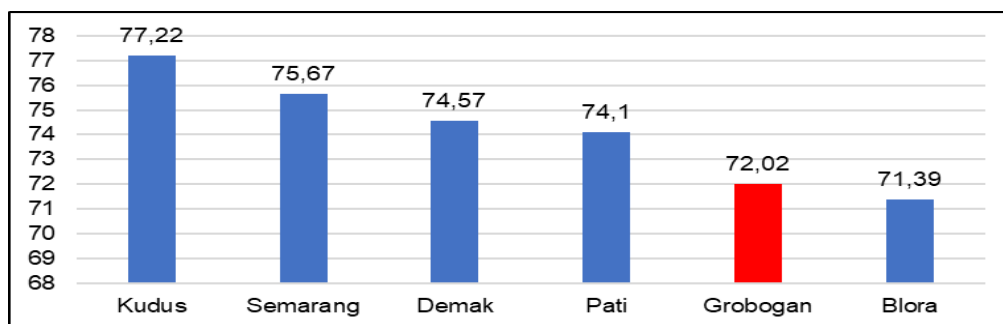
Sumber: BPS dan hasil olah data

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ($0 \leq \text{IPM} < 60$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan kategori sangat tinggi ($80 \leq \text{IPM} \leq 100$). Tahun 2024 Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori IPM tinggi, yakni sebesar

72,02 dari yang ditargetkan sebesar 71,53. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, IPM Kabupaten Grobogan masih tertinggal, kecuali dengan Kabupaten Blora. IPM Kabupaten Grobogan apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya adalah sebagai berikut :

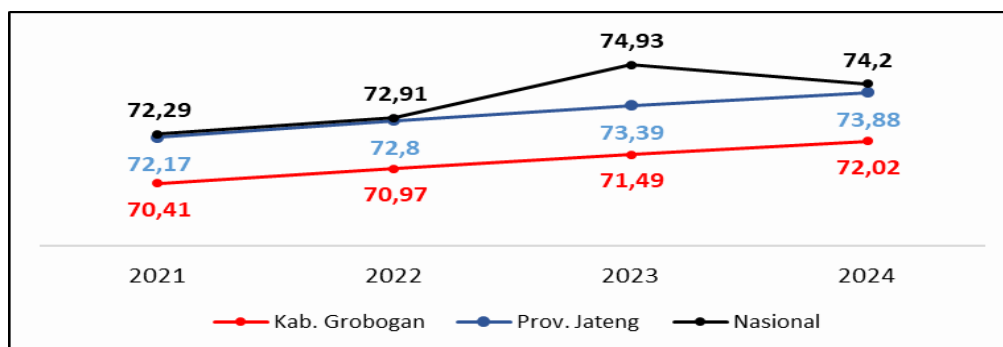
Grafik 3. 1
Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan kabupaten sekitar



Sumber: BPS

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2024 jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional sebagai berikut:

Grafik 3. 2
Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



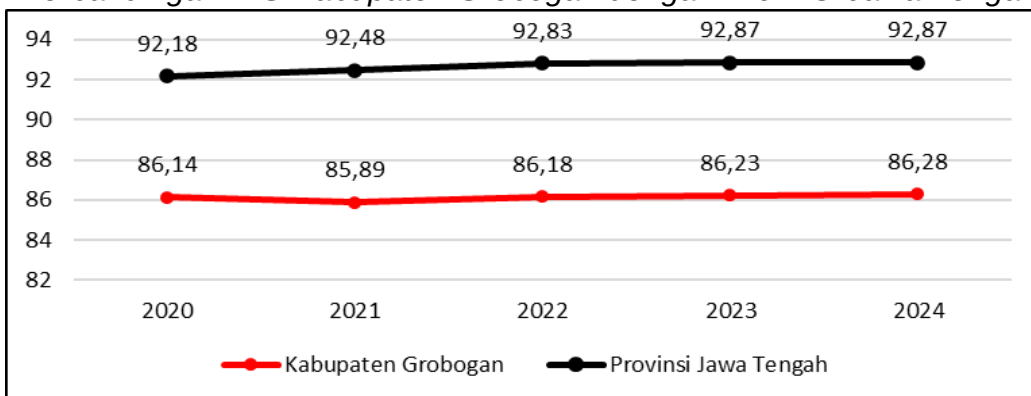
Sumber: BPS

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah maupun IPM Nasional.

Adapun IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. $IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}$.

Realisasi IPG Kabupaten Grobogan tahun 2024 dari BPS belum dirilis, sehingga data IPG Tahun 2024 dihitung menggunakan proyeksi dari capaian tahun 2022 ke 2023 yaitu selisih kenaikan sebesar 0,05 ditambahkan IPG Tahun 2023 sebesar 86,23, maka dapat diproyeksikan capaian IPG 2024 adalah sebesar 86,28. Capaian IPG Kabupaten Grobogan, dari target yang ditetapkan sebesar 86,84 tercapai 86,28, sehingga persentasenya sebesar 99,36%. Data IPG tahun 2020 sampai tahun 2024 Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut:

Grafik 3. 3
Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS

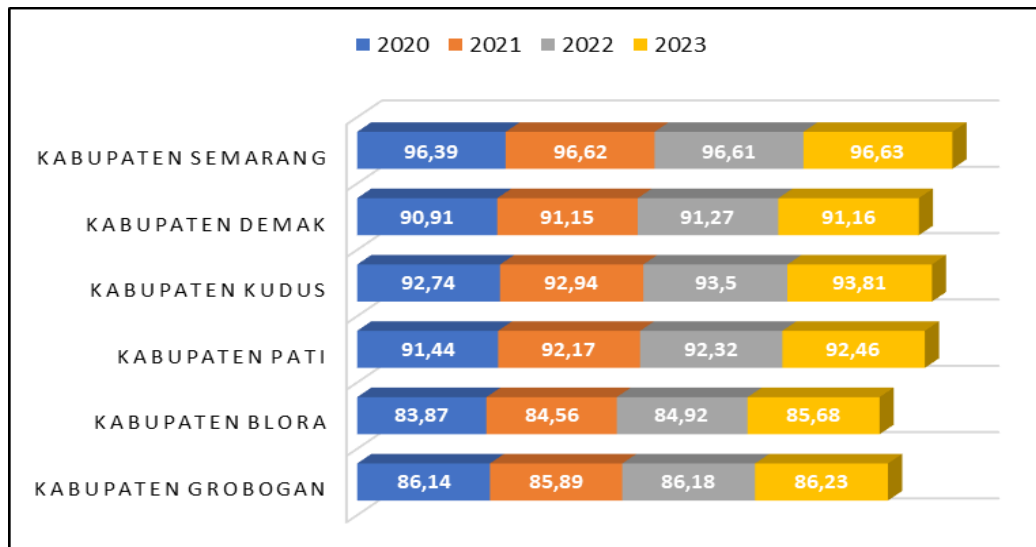
Data Tahun 2024 hasil proyeksi dari data 2022-2023

Berdasarkan grafik 3.3 di atas diketahui bahwa nilai IPG Kabupaten Grobogan empat tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPG Kabupaten Grobogan masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Demikian juga jika dibandingkan dengan IPG pada kabupaten di sekitarnya, IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023 Kabupaten Grobogan juga masih tertinggal kecuali dengan Kabupaten Blora.

Gambaran IPG Tahun 2020-2023 Kabupaten Grobogan dan kabupaten di sekitarnya adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 4
Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya



Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.

b. Sasaran pada Misi Ke-1

b.1. Sasaran 1

Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, ditentukan 2 (dua) indikator sasaran yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian kinerja sebesar 101,13% dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan capaian kinerja sebesar 103,55%. Kinerja sasaran 1 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja Sasaran 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,34	12,48	101,13	12,36	100,97
		2. Rata-rata Lama Sekolah	%	7,04	7,29	103,55	7,10	102,68
Rata-rata Capaian						102,34	101,83	

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data di atas, realisasi capaian sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan dengan rata-rata capaian sebesar 102,34%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian sasaran 1 juga telah mencapai target dengan capaian rata-rata sebesar 101,83%.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	274.272.018.000	284.398.268.568	281.037.975.669	98,82
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	130.000.000	130.000.000	117.343.425	90,26
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	335.464.500	335.464.500	323.783.970	96,52
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	430.000.000	430.000.000	429.476.400	99,88
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.927.000.000	22.258.025.000	20.904.600.191	93,92
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100
Jumlah		293.394.482.500	308.851.758.068	304.113.179.655	98,47

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 304.113.179.655,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp 308.851.758.068,00 atau terealisasi sebesar 98,47%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan yang menjadi faktor penghambat/kendala Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

a. Harapan Lama Sekolah

Faktor Keberhasilan:

1) Inisiatif Pendataan ATS

Adanya pendataan Anak Tidak Sekolah menjadi langkah awal yang penting untuk memahami skala dan karakteristik masalah. Pendekatan ini menunjukkan komitmen dalam menangani permasalahan pendidikan.

2) Melibatkan Dunia Usaha untuk Beasiswa

Kolaborasi dengan dunia usaha dalam pemberian beasiswa adalah langkah strategis yang memberikan dukungan finansial langsung kepada ATS untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi ATS untuk kembali ke sekolah tanpa dibebani biaya.

3) Pengembalian ATS ke Sekolah

Upaya membawa kembali ATS ke jalur pendidikan menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pendidikan di masyarakat.

Faktor Penghambat/kendala:

1) Masih Banyaknya ATS

Narasi menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah masih tinggi, yang mencerminkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil belum cukup efektif atau belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran.

2) Kurangnya Akses yang Merata

Tidak semua ATS mungkin memiliki akses terhadap program bantuan, seperti beasiswa atau fasilitas pendukung lainnya, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau wilayah yang kurang terjangkau.

3) Faktor Sosial dan Ekonomi yang Kompleks

Tidak semua permasalahan ATS dapat diselesaikan dengan pemberian beasiswa saja. Faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, atau kebutuhan untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga dapat menghambat upaya ini.

4) Keberlanjutan Program

Tidak disebutkan apakah upaya ini bersifat berkelanjutan atau terintegrasi dengan kebijakan pendidikan yang lebih luas. Tanpa rencana jangka panjang, tantangan ini mungkin terus berulang.

Kesimpulan:

Langkah-langkah seperti pendataan ATS, pelibatan dunia usaha, dan pengembalian ATS ke sekolah merupakan inisiatif positif yang dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Namun demikian, meskipun capaian kinerja tercapai, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti jumlah ATS yang tinggi, kesenjangan akses, dan kompleksitas masalah sosial-ekonomi. Pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang merata dan program yang berkelanjutan, diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah yang melebihi target (103,55%) mencerminkan kemajuan signifikan dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.

Faktor Keberhasilan:

1. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan

Pembangunan dan renovasi gedung SD serta SMP menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang

lebih baik, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengurangi angka putus sekolah.

2. Peningkatan Kompetensi Guru

Pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas pengajaran, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3. Indikator Kinerja yang Meningkat

Kenaikan persentase akreditasi satuan pendidikan minimal B menunjukkan bahwa lebih banyak sekolah memenuhi standar kualitas. Penurunan angka putus sekolah juga menjadi salah satu indikator keberhasilan yang signifikan.

4. Pemenuhan Sarana Prasarana Secara Masif

Upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara masif memastikan bahwa kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, yang merupakan fondasi penting dalam memperkuat sistem pendidikan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

Meskipun rata-rata lama sekolah mencapai 103,55%, angka ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Fokus pada kuantitas perlu diseimbangkan dengan upaya peningkatan mutu. Adapun yang menjadi faktor penghambat/kendala/tantangan sebagai berikut:

1. Distribusi Sarana dan Prasarana yang Belum Merata

Pemenuhan sarana prasarana secara masif mungkin belum merata di semua wilayah. Wilayah terpencil atau kurang berkembang kemungkinan masih mengalami keterbatasan dalam akses fasilitas pendidikan.

2. Kesenjangan Kompetensi Guru

Walaupun bimbingan teknis dilakukan secara berkala, ada potensi kesenjangan dalam penerapan kompetensi guru di lapangan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Fokus pada Indikator Akreditasi

Penekanan pada akreditasi satuan pendidikan minimal B bisa berisiko mengabaikan peningkatan pada aspek lain, seperti pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal atau keterampilan abad 21.

4. Angka Putus Sekolah yang Belum Nol

Meskipun angka putus sekolah menurun, masih adanya siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan menunjukkan bahwa masalah sosial, ekonomi, atau akses pendidikan tetap menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Kesimpulan

Keberhasilan dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, pengadaan sarana prasarana, dan kompetensi guru telah menunjukkan hasil positif yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan. Namun, beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, dan angka putus sekolah yang belum sepenuhnya nol tetap memerlukan perhatian dan strategi yang lebih komprehensif. Pendekatan yang lebih holistik dapat membantu memperkuat hasil ini di masa mendatang.

b.2. Sasaran 2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator usia harapan hidup. Kinerja sasaran tercapai dengan realisasi sebesar 100,13%, kinerja ini dikategorikan sangat tinggi. Adapun data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3. 11
Target dan Realisasi Sasaran 2*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	%	75,14	75,24	100,13	75,3	99,92

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, realisasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan melalui indikator kinerja usia harapan hidup dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,14 telah tercapai sebesar 75,24, atau persentase sebesar 100,13%. Artinya kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.310.561.815	132.997.388.007	129.385.798.679	97,28
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	559.600.000	2.596.350.000	2.449.055.700	94,33
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	885.905.785	515.831.000	385.655.510	74,76
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	715.050.000	1.527.472.800	1.427.430.550	93,45
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.434.760.000	1.584.760.000	1.571.636.855	99,17
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000	60.000.000	56.329.250	93,88
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	70.000.000	70.000.000	69.406.000	99,15
Jumlah		124.065.877.600	139.381.801.807	135.375.312.544	97,13

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 135.375.312.544,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp 139.381.801.807,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 97,13%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal

Peningkatan rata-rata pencapaian standar pelayanan minimal setiap tahun menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas layanan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup.

2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Penurunan signifikan pada angka kematian ibu dan bayi merupakan pencapaian besar, karena faktor ini secara langsung memengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup di Kabupaten Grobogan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, termasuk penambahan dua RSUD baru, telah memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kuratif dan rujukan, yang meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4. Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas

RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi mencapai akreditasi kategori Paripurna, dan semua Puskesmas di Kabupaten Grobogan berhasil mendapatkan akreditasi tertinggi. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat berkontribusi pada usia harapan hidup yang lebih tinggi.

5. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk

Penurunan angka prevalensi Balita dengan gizi buruk, meskipun fluktuatif, menjadi indikator adanya upaya nyata dalam meningkatkan status gizi anak-anak, yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesehatan generasi muda.

Faktor penghambat/kendala/tantangan

1. Fluktuasi dalam Penurunan Gizi Buruk

Meskipun prevalensi gizi buruk mengalami penurunan, sifatnya yang fluktuatif menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya konsisten atau efektif di seluruh wilayah.

2. Kesenjangan Akses Layanan

Meskipun pembangunan fasilitas kesehatan bertambah, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil, yang dapat memengaruhi peningkatan usia harapan hidup secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengurangan angka kematian ibu dan bayi, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Grobogan. Namun, tantangan seperti ketidakkonsistenan penanganan gizi buruk dan potensi ketimpangan akses layanan kesehatan perlu di atasi untuk memastikan keberlanjutan tren positif ini.

b.3. Sasaran 3

Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dipenuhi dengan diperolehnya Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari target kategori APE madya, terealisasi kategori madya, sehingga capaiannya sebesar 100,00%, artinya sasaran 3 tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Tabel 3. 13
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375-0,7724)	Madya	100,00	Utama (0,7725-0,9074)	66,67

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran 3 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengendalian Penduduk	514.404.200	514.404.200	501.688.100	97,53
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.673.352.100	5.673.352.100	5.646.951.654	99,53
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.678.792.000	7.678.792.000	7.572.137.200	98,61
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	540.917.600	591.588.200	587.341.600	99,28
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	60.000.000	92.101.000	90.429.000	98,18
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	37.000.000	37.000.000	36.650.000	99,05
7.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.866.500	296.892.700	279.481.600	94,14
Jumlah		14.772.332.400	14.884.130.200	14.714.679.154	98,86%

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 14.714.679.154,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 14.884.130.200,00, sehingga terealisasi sebesar 98,86%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pengakuan melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
Pencapaian target penghargaan APE menunjukkan pengakuan atas komitmen dan upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Ini mencerminkan adanya dedikasi untuk mewujudkan keadilan sosial.
2. Pengoptimalan Peran Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG)
FKKG berhasil menjadi platform konsultasi dan penganjur dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Peran ini mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan, dan regulasi.
3. Keterlibatan Perangkat Daerah dalam PUG
Komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung PUG dan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, dan sosial memperlihatkan langkah nyata untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Peningkatan Kapasitas melalui Komponen Penilaian APE
Komponen penilaian APE seperti komitmen, kebijakan, kelembagaan, serta penyediaan data dan alat analisis gender berhasil mendorong tata kelola yang lebih berorientasi pada kesetaraan dan hak perempuan serta anak.
5. Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Inisiatif pembentukan desa yang ramah perempuan dan peduli anak menjadi langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak perempuan dan anak di tingkat komunitas.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan

- 1) Keterbatasan Partisipasi Masyarakat Secara Menyeluruh

Meskipun partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian APE, belum tentu semua lapisan masyarakat terlibat secara aktif. Ketimpangan dalam kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap isu gender bisa menjadi penghambat.

2) Konsistensi Implementasi PUG di Semua Wilayah

Tidak semua perangkat daerah mungkin menerapkan PUG dengan tingkat konsistensi yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan disparitas dalam pencapaian kesetaraan gender di berbagai wilayah.

3) Tantangan dalam Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Meski pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak adalah langkah yang positif, tantangan dalam mengintegrasikan inisiatif ini dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kekurangan sumber daya bisa menghambat keberlanjutan.

4) Masih Terbatasnya Partisipasi Perempuan di Tingkat Tinggi

Upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, dan sosial masih menghadapi hambatan, seperti stereotip budaya dan kurangnya representasi perempuan di posisi pengambilan keputusan.

5) Penguatan Data dan Alat Analisis Gender

Meski data gender dan alat analisis sudah menjadi bagian dari penilaian APE, tantangan dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, dan terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah, yang penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam mendapatkan penghargaan APE, pembentukan FKKG, dan pengembangan desa ramah perempuan serta peduli anak mencerminkan kemajuan nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan serta anak. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu ditangani tantangan seperti kesenjangan partisipasi masyarakat, konsistensi implementasi PUG, dan

penguatan data gender. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kesetaraan gender dapat terus diperjuangkan secara berkelanjutan.

2. Misi 2

Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

a. Tujuan 2

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan **meningkatnya kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana** dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator tujuan yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan realisasi capaian sebesar 102,84%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi capaian sebesar 87,43%, dan Indeks Risiko Bencana dengan realisasi capaian sebesar 140,75%. Kinerja capaian ketiga indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 110,75%. Data capaian kinerja tujuan 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 15
Target dan Realisasi Tujuan 2

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	80,68	82,97	102,84	82,30	100,81
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,16	69,21	87,43	79,95	86,57
		3. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (145,00)	Sedang (85,91)	140,75	Sedang (140,00)	140,75
Rata-rata capaian						110,34	109,38	

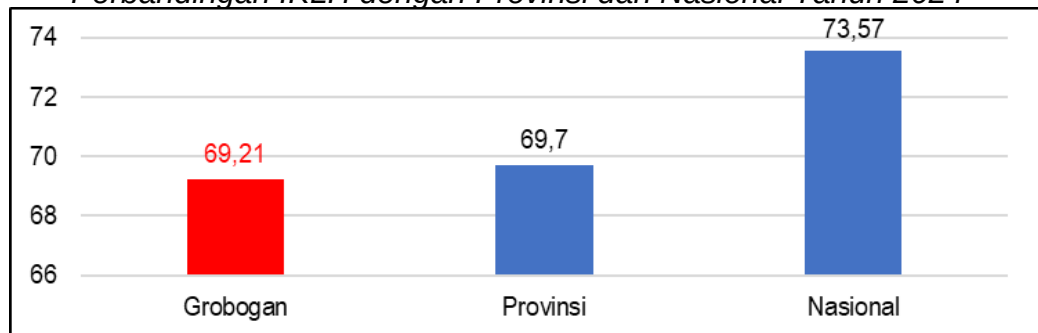
Sumber: DPUPR, Disperakim, DLH dan BPBD

Meskipun kinerja tujuan 2 terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 110,34%, namun demikian masih ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai (<100%) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup dengan target indeks 79,16 hanya tercapai 69,21, sehingga capaiannya hanya sebesar 87,43%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata realisasi telah mencapai target dengan capaian sebesar 109,38%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Grobogan masih di bawah capaian Provinsi dan Nasional, sebagaimana Tabel di bawah ini:

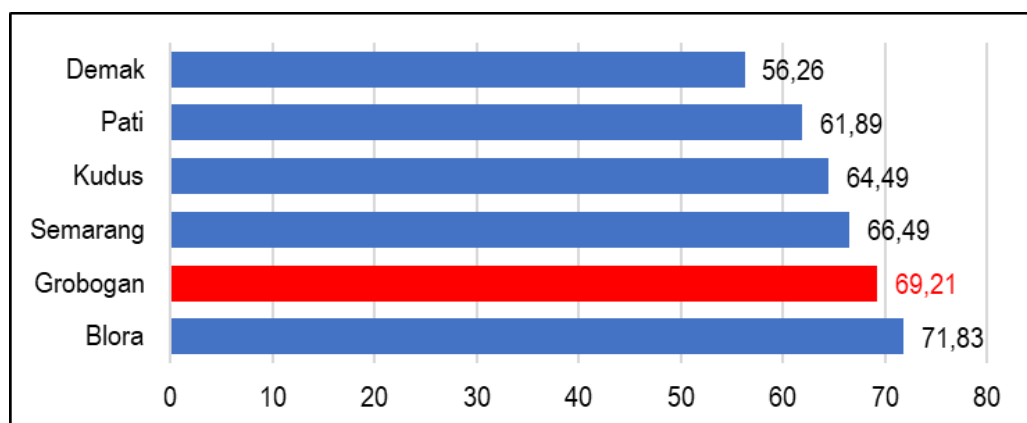
Grafik 3. 5
Perbandingan IKLH dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja kabupaten sekitar, Kabupaten Grobogan masih termasuk terbaik setelah Kabupaten Blora, sebagaimana dapat dilihat Tabel di bawah ini:

Grafik 3. 6
Perbandingan IKLH dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024

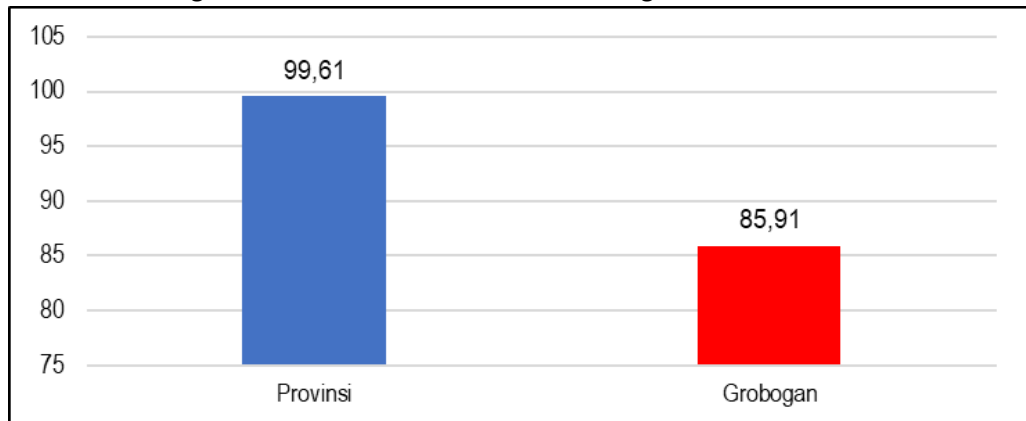


Sumber: BPS

Sedangkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2024, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah. Semakin rendah indeks risiko

bencana, semakin tinggi upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, sebagaimana data di bawah ini:

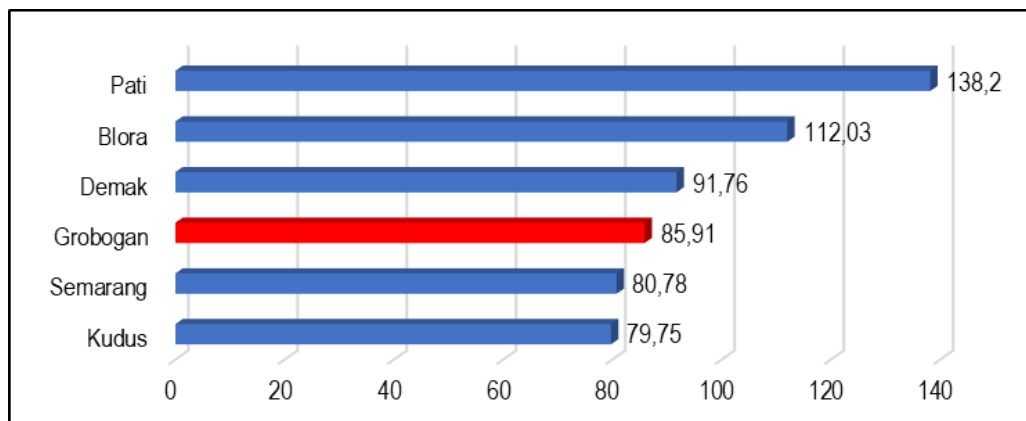
*Grafik 3. 7
Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Provinsi Tahun 2024*



Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Grobogan masih termasuk baik dalam upaya penanggulangan bencana dibanding dengan Kabupaten Demak, Blora dan Pati, sebagaimana data di bawah ini:

*Grafik 3. 8
Perbandingan Indeks Risiko Bencana dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024*



Sumber: BPS

b. Sasaran pada Misi Ke-2

b.1. Sasaran 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengukuran kinerja sasaran kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, dan kinerja lalu lintas (*V/C ratio*) yang secara lengkap disajikan pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3. 16
Target dan Realisasi Sasaran 4

Target dan Realisasi Capaian								
No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	2. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	87,22	79,97	91,69	89,22	89,63
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,34	91,80	99,42	92,90	98,82
		4. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,07	77,137	101,4	76,28	101,12
		5. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,31)	129,55	B (0,20-0,44)	129,55
Rata-rata Capaian						110,32	104,78	

Sumber: DPUPR, Disperakim, dan Dishub

Pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, realisasi capaian sasaran 4 yang terdiri dari 4 (empat) indikator mempunyai rata-rata capaian kinerja sebesar 110,32%. Dari 4 (empat) indikator tersebut di atas, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target (capaian <100,00%), yaitu Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 91,69% dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian kinerja sebesar 99,42%.

Capaian kinerja indikator persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik diperoleh melalui persentase jalan kondisi mantap dan irigasi kondisi mantap. Dari target yang ditetapkan sebesar 87,22% terealisasi sebesar 79,97%, sehingga persentase capaiannya sebesar 91,69%. Capaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dihitung melalui perbandingan realisasi RTRW terhadap rencana peruntukannya. Target yang ditetapkan sebesar 92,34% dan terealisasi sebesar 91,80%, sehingga capaiannya sebesar 99,42%. Untuk indikator persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni ditetapkan target sebesar 76,07% dan terealisasi sebesar 77,137% dengan persentase capaian sebesar 101,4%. Sedangkan indikator kinerja lalu lintas (*V/C ratio*) ditetapkan pada kategori B dengan skor 0,20-0,44 dan tercapai kategori B skor 0,31, sehingga persentase capaiannya sebesar 129,55%.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 17
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	35.112.173.780	41.677.179.140	41.351.609.200	99,22
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.601.390.000	7.272.490.000	6.848.154.250	94,17
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.479.788.368	12.534.404.368	11.983.667.500	95,61
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.549.910.710	6.849.910.710	6.617.590.230	96,61
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	476.000.000	636.200.000	621.719.000	97,72
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	71.603.853.660	78.230.013.700	75.130.331.351	96,04
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	198.247.000	325.195.250	311.023.000	95,64
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	805.338.000	805.338.000	783.263.400	97,26
9.	Program Penatagunaan Tanah	1.500.000.000	2.376.722.700	2.269.046.593	95,47

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
10.	Program Pengembangan Perumahan	30.000.000	784.472.000	784.472.000	100,00
11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.445.000.000	8.966.785.000	8.940.126.318	99,70
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.616.540.450	11.327.720.450	11.039.403.193	97,45
13.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.505.592.801	3.740.701.301	3.629.302.061	97,02
Jumlah		152.923.834.769	175.527.132.619	170.309.708.096	97,03%

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebesar Rp 70.309.708.096,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran Rp 175.527.132.619,00 atau realisasi sebesar 97,03%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

a. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian yang mendekati target

Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 berhasil mencapai 86,003%, mendekati target yang direncanakan sebesar 87,67%. Ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan meskipun terdapat berbagai tantangan.

2) Progres Positif Dibanding Tahun Sebelumnya

Adanya peningkatan sebesar 0,67% dibandingkan capaian tahun 2023 mencerminkan adanya konsistensi dalam memperbaiki kondisi jalan serta komitmen dalam menjaga perkembangan infrastruktur secara berkelanjutan.

3) Identifikasi Hambatan yang Realistis

Keberhasilan ini juga didukung oleh kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat seperti cuaca

ekstrem, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih baik di masa depan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Dampak Cuaca Ekstrem dan Banjir

Kondisi cuaca ekstrem dan banjir di sepanjang tahun 2024 berkontribusi pada kerusakan jalan, yang menurunkan kondisi dari baik menjadi rusak ringan atau berat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur.

2) Realisasi yang Sedikit Meleset dari Target Potensial

Meskipun capaian mendekati target, realisasi akhir sebesar 86,003% sedikit lebih rendah dibandingkan target potensial sebesar 86,497%. Ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, khususnya dalam mengantisipasi hambatan yang tidak terduga.

3) Kendala Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran menjadi tantangan utama yang memengaruhi kecepatan dan cakupan proyek perbaikan jalan. Hal ini mengindikasikan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih optimal di masa mendatang.

Rekomendasi untuk mengatasi kendala

1) Penentuan Skala Prioritas Proyek

Langkah strategis dalam menentukan prioritas proyek pembangunan dan perbaikan jalan sangat penting untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia dan memastikan pengerjaan yang efisien.

2) Mitigasi Risiko Bencana Alam

Mitigasi risiko cuaca ekstrem, seperti penerapan teknologi konstruksi tahan banjir dan peningkatan sistem drainase, harus menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur untuk mengurangi dampak kerusakan di masa depan.

3) Optimalisasi Efisiensi Anggaran

Perencanaan anggaran yang lebih detail dan penggunaan sumber daya secara efisien dapat mendukung percepatan proyek dan memperluas cakupan perbaikan jalan.

4) Pemanfaatan Teknologi dan Data

Menggunakan teknologi terkini dan analisis data dapat membantu dalam memetakan area prioritas dan mengelola proyek secara lebih efektif.

Kesimpulan:

Keberhasilan tingkat kemantapan jalan tahun 2024 mencerminkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan infrastruktur, meskipun capaian akhir sedikit meleset dari target potensial akibat cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran. Dengan langkah antisipatif seperti prioritisasi proyek, mitigasi risiko bencana, dan efisiensi anggaran, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai target yang lebih optimal di masa depan.

b. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Faktor Keberhasilan

1) Peningkatan Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana tata ruang menunjukkan adanya hubungan yang kuat terhadap peningkatan nilai kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam mendukung keterwujudan pola ruang yang direncanakan.

2) Kesesuaian Lokasi Program dengan Rencana Tata Ruang

Kesesuaian lokasi program memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perencanaan tata ruang, memastikan bahwa pembangunan dilakukan pada lokasi yang tepat sesuai dengan RTRW, sehingga dampaknya terhadap efisiensi dan keberlanjutan lebih signifikan.

3) Dampak Positif terhadap Pola Ruang

Keselarasan antara program kegiatan dan rencana tata ruang memperkuat keterwujudan pola ruang yang lebih terarah, mendukung pengembangan wilayah yang lebih terorganisasi sesuai dengan visi tata ruang yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketidaksesuaian Pelaksanaan Program dengan RTRW

Banyaknya program yang tidak dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang direncanakan dalam RTRW menjadi kendala utama, yang menyebabkan penurunan efektivitas dalam optimalisasi tata ruang. Ketidaksesuaian ini mengurangi dampak positif dari program yang direncanakan.

2) Keterbatasan Informasi dari Instansi terkait

Kendala dalam memperoleh informasi program dari instansi pusat, provinsi, dan non-pemerintah menghambat proses evaluasi yang komprehensif. Ketergantungan pada informasi dari OPD tingkat provinsi dan beberapa instansi pusat menciptakan celah besar dalam identifikasi program.

3) Koordinasi Antarinstansi yang Kurang Optimal

Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tata ruang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi antara pelaksanaan program dan perencanaan tata ruang yang telah dirumuskan.

4) Evaluasi yang Tidak Menyeluruh

Keterbatasan data dan informasi menyebabkan evaluasi tata ruang tidak mencakup semua program yang relevan. Hal ini mengakibatkan potensi keberhasilan dari program yang sejalan dengan RTRW tidak dapat diukur secara penuh.

Rekomendasi:

1) Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

Membentuk mekanisme koordinasi yang lebih kuat di antara instansi pusat, provinsi, dan non-pemerintah untuk menyelaraskan program dengan rencana tata ruang.

2) Integrasi Sistem Informasi

Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap dan akurat terkait program, sehingga mempermudah proses evaluasi.

3) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan lokasi dan indikasi dalam RTRW.

4) Peningkatan Kapasitas Evaluasi

Melengkapi alat evaluasi dan data yang diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program secara lebih menyeluruh dan tepat waktu.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam meningkatkan nilai kesesuaian pemanfaatan ruang dan keselarasan program dengan tata ruang merupakan pencapaian yang penting. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian lokasi program, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan informasi menjadi penghambat optimalisasi tata ruang. Dengan langkah-langkah strategis, keberhasilan dalam implementasi rencana tata ruang dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni

Faktor Keberhasilan:

1) Komitmen Kebijakan "100 0 100"

Kebijakan ini menjadi fondasi kuat dalam peningkatan infrastruktur dasar, menargetkan 100% pemenuhan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Fokus yang jelas ini memandu prioritas pembangunan dengan lebih terarah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

2) Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien

Penetapan prioritas melalui kebijakan "100 0 100" memungkinkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Hal ini memastikan setiap proyek infrastruktur mendukung target pembangunan jangka panjang.

3) Diversifikasi Sumber Pendanaan

Partisipasi dari APBN, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan organisasi internasional memperkuat kemampuan daerah untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur. Contohnya, dana CSR digunakan untuk proyek lokal seperti jalan akses desa, sedangkan APBN mendukung proyek besar.

4) Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Donor

Integrasi antara kebijakan strategis dengan sumber pendanaan tambahan menciptakan sinergi dalam percepatan pembangunan. Hal ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang berhasil mendorong realisasi program.

5) Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Akses jalan yang lebih baik, drainase yang fungsional, dan pengelolaan sumber daya air berkualitas merupakan hasil nyata dari keberhasilan program. Ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketergantungan pada Sumber Dana Tambahan

Meskipun pendanaan tambahan mendukung realisasi proyek, ketergantungan yang tinggi pada APBN, CSR, dan lembaga donor dapat menjadi risiko jika sumber pendanaan ini tidak konsisten atau berubah di masa depan.

2) Kesenjangan dalam Pemerataan Infrastruktur

Keberhasilan mungkin belum dirasakan secara merata di semua wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dasar.

3) Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Lokal

Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan atau berkolaborasi dengan pihak swasta, sehingga potensi pembangunan infrastruktur bisa menjadi tidak optimal di beberapa wilayah.

4) Ketahanan Infrastruktur terhadap Tantangan Eksternal

Infrastruktur yang dibangun mungkin menghadapi tantangan seperti perubahan iklim atau bencana alam, yang dapat merusak hasil pembangunan jika tidak ada langkah mitigasi risiko yang memadai.

5) Monitoring dan Evaluasi Proyek

Tidak disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Tanpa pengawasan yang ketat, proyek pembangunan berisiko tidak berjalan sesuai rencana atau gagal mencapai target yang diharapkan.

Rekomendasi:

1) Peningkatan Kemandirian Daerah

Mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proyek infrastruktur.

2) Pemerataan Pembangunan

Memastikan akses terhadap infrastruktur dasar merata, terutama untuk daerah terpencil, melalui kebijakan yang lebih inklusif.

3) Mitigasi Risiko Bencana

Meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap tantangan seperti banjir atau perubahan iklim dengan menggunakan teknologi dan material yang lebih adaptif.

4) Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Menerapkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam meningkatkan persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air melalui kebijakan "100 0 100" menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada pendanaan eksternal, kesenjangan pembangunan, dan risiko infrastruktur perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan ini.

d. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)**Faktor Keberhasilan:****1) Kondisi Lalu Lintas yang Lancar**

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Grobogan tergolong lancar, jauh dari kepadatan seperti di kota besar lainnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan kelancaran mobilitas masyarakat.

2) Lebar Jalan yang Memadai

Infrastruktur jalan dengan lebar yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung arus lalu lintas yang lancar, terutama pada jalur yang memiliki aktivitas tinggi.

3) Pengaturan Jalur Satu Arah

Pengaturan jalur satu arah pada area padat telah terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

4) Indeks V/C Ratio yang Baik

Sebagian besar ruas jalan di Kota Purwodadi memiliki indeks V/C Ratio di bawah 0,20, menunjukkan bahwa kondisi jalan tergolong sepi dengan kinerja lalu lintas yang masih sangat baik.

5) Penanganan Cepat pada Kerusakan Perlengkapan Jalan

Dinas Perhubungan berhasil menangani kerusakan perlengkapan jalan secara cepat dan tepat, sehingga memastikan perlengkapan jalan berfungsi optimal. Langkah ini berkontribusi pada penurunan risiko kecelakaan lalu lintas.

6) Aset Perlengkapan Jalan yang Memadai

Ketersediaan perlengkapan jalan yang cukup banyak, dengan sebagian besar dalam kondisi baik, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan aset untuk mendukung lalu lintas yang aman dan teratur.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

Meskipun lebar jalan memadai, kualitas infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dalam jangka panjang.

2) Perbaikan Perlengkapan Jalan yang Belum Maksimal

Walaupun kondisi perlengkapan jalan cukup baik, peningkatan kualitas perlengkapan ini diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas lalu lintas di masa mendatang.

3) Potensi Lonjakan Lalu Lintas di Masa Depan

Dengan perkembangan daerah, potensi peningkatan volume lalu lintas perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang, agar kondisi saat ini yang tergolong lancar dapat dipertahankan.

4) Kurangnya Inovasi dalam Manajemen Lalu Lintas

Narasi tidak menyebutkan adanya inovasi atau teknologi yang diterapkan untuk mengelola lalu lintas secara lebih modern, seperti sistem manajemen lalu lintas berbasis digital.

5) Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Tidak disebutkan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kondisi lalu lintas dan infrastruktur jalan. Ini penting untuk menjaga konsistensi kelancaran lalu lintas di masa depan.

Rekomendasi

1) Peningkatan Infrastruktur Jalan

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan harus menjadi prioritas untuk mendukung arus lalu lintas yang lebih baik,

terutama menjelang potensi pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

2) Inovasi dalam Manajemen Lalu Lintas

Mengadopsi teknologi cerdas untuk manajemen lalu lintas, seperti sistem pemantauan otomatis dan pengaturan sinyal lalu lintas berbasis data, akan membantu menjaga efisiensi dan kelancaran.

3) Investasi dalam Perlengkapan Jalan Berkualitas Tinggi

Menggunakan material dan desain berkualitas tinggi untuk perlengkapan jalan agar lebih tahan lama dan fungsional, mengurangi kebutuhan perbaikan berkala.

4) Rencana Jangka Panjang untuk Pertumbuhan Lalu Lintas

Menyusun rencana strategis untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas dengan memperluas kapasitas jalan dan pengelolaan transportasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Keberhasilan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai, pengaturan jalur satu arah, dan penanganan kerusakan perlengkapan jalan yang cepat. Namun, tantangan seperti peningkatan kualitas jalan, pengelolaan perlengkapan, dan antisipasi pertumbuhan lalu lintas perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lalu lintas yang efektif di masa depan.

b.2. Sasaran 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3

Pengukuran kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata capaian dari keempat indikator tersebut sebesar 105,22% dan dikategorikan sangat tinggi. Indeks kualitas air hanya sebesar 103%, indikator indeks kualitas udara mencapai 100,05%, indikator indeks kualitas tutupan lahan hanya sebesar 99,43%, dan indikator indeks kinerja pengelolaan sampah tercapai dengan persentase capaian sebesar 114,24%.

Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 5 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 18
Target dan Realisasi Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	6. Indeks Kualitas Air	Indeks	51,05	52,58	103,00	80,95	64,95
		7. Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,15	90,80	104,19	87,88	103,32
		8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	58,16	57,84	99,43	63,55	91,00
		9. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	46,00	52,55	114,24	50,00	105,10
Rata-rata Capaian						105,22	91,09	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. S.276/SETPPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, Hal Penyampaian Hasil Terkini Nilai IKLH Tahun 2024 atau <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>)

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 19
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000	200.000.000	194.777.545	97,39
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	760.000.000	760.000.000	737.467.120	97,04
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.880.000.000	2.534.475.000	2.466.104.567	97,30
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	75.000.000	75.000.000	72.251.750	96,34
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40.000.000	40.000.000	38.315.800	95,79
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	6.240.000.000	6.790.000.000	6.686.979.380	98,48
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000	19.998.800	99,99
8.	Program Pengelolaan Persampahan	50.000.000	881.117.100	879.219.125	99,78
Jumlah		9.265.000.000	11.300.592.100	11.095.114.087	98,18

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.095.114.087,00 dari anggaran Rp 11.300.592.100,00 atau realisasi sebesar 98,18%.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Meski tidak mencapai target, keberadaan pengukuran IKLH menunjukkan bahwa Pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk memantau kondisi lingkungan hidup secara berkala. Ini menjadi langkah penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

2. Kesadaran Akan Sumber Masalah

Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan penurunan kualitas tutupan lahan, menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap isu lingkungan yang dihadapi.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketidakcapaiannya Target IKLH

Tidak tercapainya target IKLH, terutama pada komponen kualitas air dan tutupan lahan, mengindikasikan bahwa langkah-langkah perlindungan lingkungan yang dilakukan masih belum efektif atau belum cukup untuk mengimbangi dampak aktivitas manusia.

2. Penurunan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan

Menurunnya kepedulian masyarakat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan. Ini menunjukkan kurangnya edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

3. Pencemaran dari Industri dan Perilaku Masyarakat

Dampak negatif dari aktivitas industri, pertanian, dan limbah rumah tangga, termasuk kebiasaan membuang sampah ke sungai, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaku

industri serta rendahnya penerapan peraturan terkait pengelolaan limbah.

4. Dampak Pembangunan Jalan pada Kualitas Tutupan Lahan

Penebangan turus jalan akibat pembangunan infrastruktur menambah tekanan pada tutupan lahan, yang seharusnya diperhatikan melalui kebijakan kompensasi seperti reboisasi atau penghijauan di area lain.

Kesimpulan

Keberhasilan dalam pengukuran dan pemahaman permasalahan lingkungan hidup harus diimbangi dengan langkah konkret dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Upaya seperti pengawasan industri yang lebih ketat, peningkatan edukasi masyarakat, peraturan pengelolaan limbah yang efektif, dan pengimbangan dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b.3. Sasaran 6

Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 6 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 20
Target dan Realisasi Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	6. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,87	127,94	0,72	120,83

Sumber: BPBD (Surat BNPB No. B-06.13/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025, hal : Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Jawa Tengah atau <https://inarisk.bnpb.go.id/adminlogin>)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, realisasi capaian sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diperoleh capaian kinerja sebesar 127,94%. Hal tersebut diperhitungkan dari target 0,68 yang ditetapkan terealisasi sebesar 0,87. Capaian kinerja sasaran sebesar 120,83% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 21
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penanggulangan Bencana	6.994.303.200	7.890.311.300	7.840.080.015	99,36
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.211.620.000	3.998.549.100	3.850.275.250	96,29
Jumlah		9.205.923.200	11.888.860.400	11.690.355.265	98,33

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.690.355.265,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.888.860.400,00 atau sebesar 98,33%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pencapaian Indeks Ketahanan yang Tinggi:
Tingginya indeks ketahanan daerah mencerminkan keberhasilan upaya penanggulangan bencana yang strategis dan efektif.
2. Pemenuhan Tujuh Komponen Utama:
3. BPBD Kabupaten Grobogan telah berhasil memenuhi tujuh komponen utama indeks ketahanan, meliputi:
 - Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
 - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
 - Pengembangan sistem informasi.
 - Pelatihan dan logistik yang memadai.
 - Penanganan kawasan rawan bencana secara tematik.
 - Peningkatan pencegahan dan mitigasi yang efektif.
 - Perkuatan kesiapsiagaan dan pemulihan bencana.
4. Efisiensi dalam Penanganan Korban Bencana:
Berhasil mengevakuasi 512 korban bencana selama 2024 dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat yang memadai.
5. Kolaborasi Pentahelix yang Efektif:
Pelibatan lima unsur utama (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) menciptakan sinergi yang signifikan dalam penanganan bencana.
6. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA):
Terbentuknya 47 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) pada akhir tahun 2024 menunjukkan pendekatan berkelanjutan dalam memperkuat kesiapsiagaan desa-desa rawan bencana.
7. Kolaborasi antara BPBD dan pemerintah desa, didukung pembagian anggaran APBDes dan APBD Provinsi, memberikan dampak nyata terhadap kesiapan masyarakat.
8. Komitmen Pelayanan kepada Masyarakat:

Tingginya komitmen BPBD untuk melayani masyarakat terdampak bencana menjadi elemen penting dalam menciptakan ketahanan daerah yang solid.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan:

Belum disebutkan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan keberlanjutan indeks ketahanan daerah di masa depan.

2. Kapasitas Desa yang Masih Beragam:

Meskipun telah terbentuk 47 DESTANA, masih ada desa rawan bencana lain yang memerlukan perhatian dan penguatan kapasitas.

3. Pengembangan Sistem Informasi yang Lebih Canggih:

Diperlukan pengembangan lebih lanjut pada sistem informasi bencana untuk meningkatkan koordinasi dan respons dalam situasi darurat.

4. Pelibatan Masyarakat yang Lebih Luas:

Partisipasi aktif masyarakat di semua tingkat perlu terus didorong, terutama di wilayah-wilayah yang belum menjadi prioritas.

5. Ketahanan Logistik dan Sumber Daya:

Pemenuhan sarana dan prasarana tanggap darurat perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang lebih besar atau kompleks.

6. Kestinambungan Pendanaan:

Keberlanjutan pembiayaan, terutama untuk pembentukan DESTANA dan peningkatan kesiapan infrastruktur, harus dipastikan agar tidak hanya bergantung pada APBD.

Kesimpulan:

Tingginya indeks ketahanan daerah Kabupaten Grobogan menandakan keberhasilan dalam berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun, tantangan ke depan meliputi penguatan monitoring, peningkatan kapasitas desa yang belum tertangani, dan

pengembangan teknologi serta pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program.

3. Misi 3

Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

a. Tujuan 3

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan **meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**, dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan realisasi capaian sebesar 108,20% dan Angka Kemiskinan dengan realisasi capaian sebesar 92,47%. Kinerja capaian kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100,34%. Data capaian kinerja tujuan ke-3 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3. 22
Target dan Realisasi Tujuan 3*

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	5,41	108,20	6±1	90,17
		4. Angka Kemiskinan	%	10,03-10,63	11,43	92,47	9,23-9,81	83,49
Rata-rata capaian						100,34	86,83	

Sumber: BPS

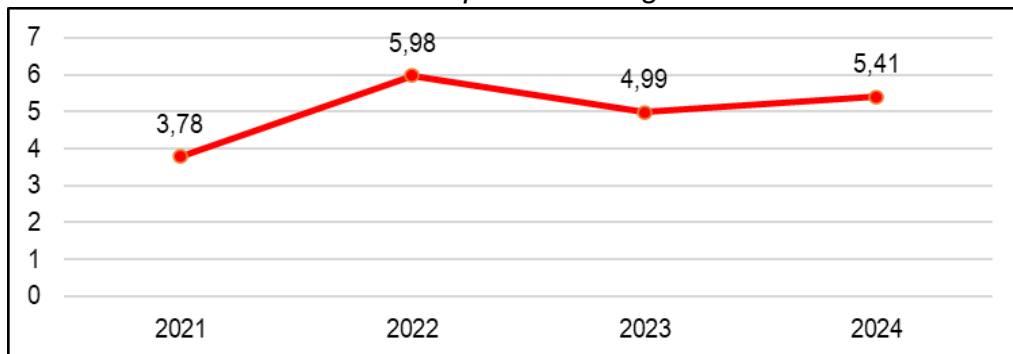
Meskipun kinerja tujuan ke3 terealisasi dengan rata-rata **capaian** sebesar 100,34%, namun demikian masih ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai (<100%) yaitu Angka Kemiskinan dengan target 10,63% hanya tercapai 11,43, sehingga capaiannya hanya sebesar 92,47%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata realisasi telah mencapai target dengan capaian sebesar 88,63%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2021-2024 fluktuatif dari 3,78% pada tahun 2021 menjadi 5,98% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 4,99%, dan

kembali meningkat menjadi 5,41% pada Tahun 2024, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 9

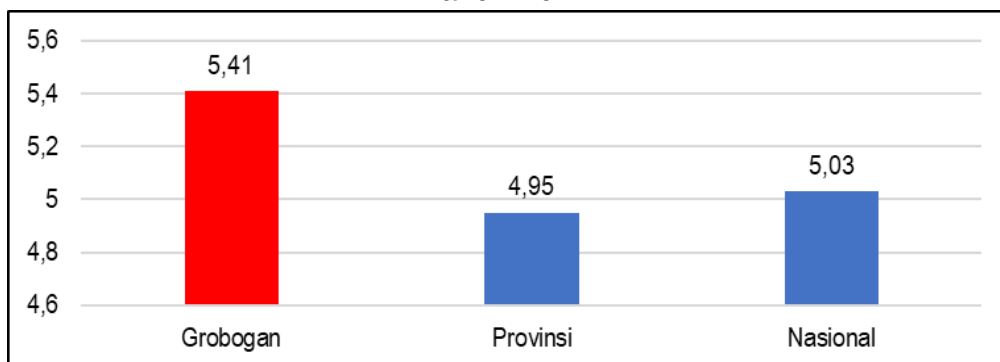
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Kabupaten Grobogan lebih baik dibanding dengan capaian Provinsi dan Nasional, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 10

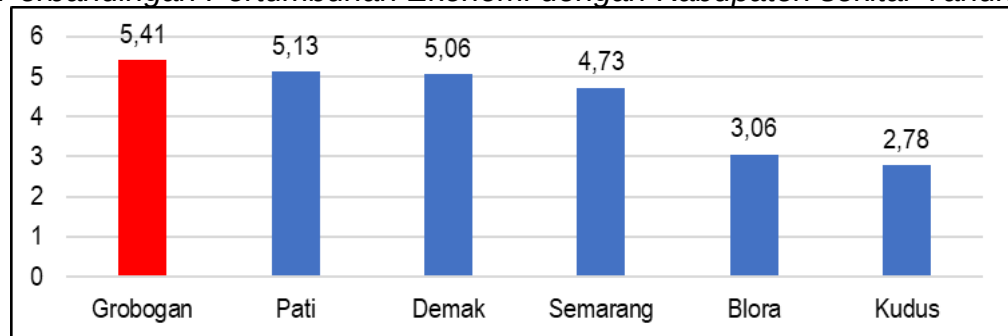
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar, Kabupaten Grobogan terbaik dibandingkan dengan capaian kabupaten sekitar, sebagaimana data di bawah ini:

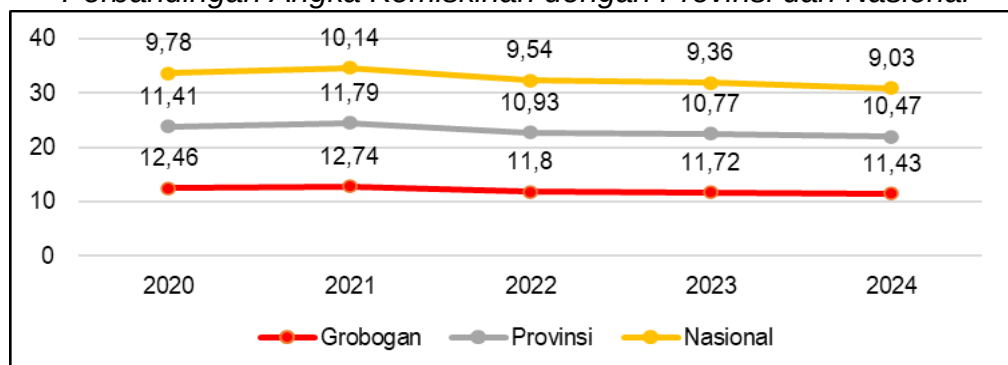
Grafik 3. 11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kabupaten sekitar Tahun



Sumber: BPS

Angka kemiskinan Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi dan Nasional, masih dibawah capaian Provinsi dan Nasional, sebagaimana data di bawah ini:

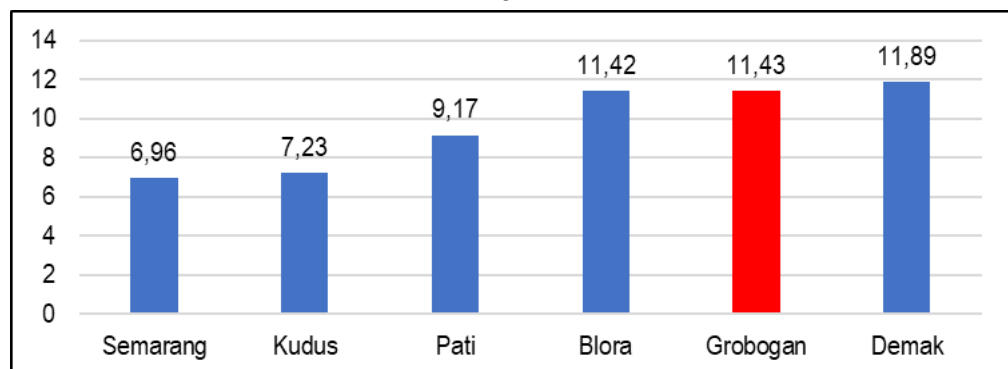
Grafik 3. 12
Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Provinsi dan Nasional



Sumber: BPS

Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan kabupaten sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Grobogan masih termasuk tinggi dan lebih rendah dibanding Kabupaten Demak, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 13
Perbandingan Angka Kemiskinan dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024



Sumber: BPS

b. Sasaran pada Misi Ke-3

b.1. Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah diukur dengan 4 (empat) indikator yang merupakan lapangan usaha komponen pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 7 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3. 23
Target dan Realisasi Sasaran 7*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	6. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	3,31	269,11	1,23	269,11
		7. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	4,72	944	1,48	318,92
		8. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,59	5,55	349,06	2,63	211,03
		9. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	3,01	204,76	1,53	196,73
Rata-rata Capaian						441,73	248,95	

Sumber: BPS dan Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja keempat indikator sasaran 7 dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 441,73%. Capaian kinerja sasaran sebesar 418,65% dikategorikan kinerja sangat tinggi. Demikian pula apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan capaian kinerja sasaran 7 telah tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 248,95%.

Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 24
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	95.400.000	116.400.000	115.840.000	99,52
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.200.010.300	1.250.010.300	1.184.607.148	94,77
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84.823.000	174.497.000	173.439.800	99,39
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	24.135.253.000	26.298.404.800	25.654.045.480	97,55
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.740.562.000	32.596.026.400	32.489.113.846	99,67
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.384.949.900	1.385.074.500	1.020.115.115	73,65
7.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200.000.000	200.000.000	197.709.550	98,85
8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.818.234.000	2.397.183.200	2.331.688.169	97,27
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.218.251.848	5.436.556.548	5.395.014.285	99,24
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	665.000.000	665.000.000	662.394.410	99,61
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00
12.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	250.000.000	250.000.000	249.510.000	99,80
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.285.939.000	1.189.126.000	1.133.751.100	95,34
14.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	65.000.000	104.356.000	103.506.500	99,19
15.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	585.400.000	585.400.000	579.926.600	99,07
16.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	87.000.000	200.000.000	198.130.970	99,07
17.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000	50.000.000	49.736.300	99,47
18.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	46.000.000	46.000.000	38.283.000	83,22

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
19.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	204.000.000	204.000.000	199.983.400	98,03
20.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	29.000.000	29.000.000	28.817.240	99,37
21.	Program Pengembangan UMKM	966.000.000	966.000.000	963.919.748	99,78
Jumlah		64.125.823.048	74.158.034.748	72.784.532.661	98,15

Berdasarkan tabel di atas, sasaran 7 diselesaikan dengan melaksanakan 21 (dua puluh satu) program. Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 74.158.034.748,00 terealisasi sebesar Rp 72.784.532.661,00 atau realisasi keuangan sebesar 98,15%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Faktor Keberhasilan:

1) Realisasi PDRB yang Melampaui Target

Dari tahun 2022 hingga 2024, pertumbuhan PDRB sektor ini secara konsisten melampaui target. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 116%, diikuti oleh 198,2% pada 2023, dan 104,2% pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang efektif.

2) Peningkatan Produksi Komoditas

Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terus meningkat menjadi bukti keberhasilan sektor ini dalam menggenjot kontribusi terhadap PDRB, yang juga menjadi indikator bahwa sektor ini menjadi salah satu pilar ekonomi daerah.

3) Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP)

Asumsi kenaikan NTP dari 104% pada 2023 menjadi 105,8% pada 2024 mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan.

4) Peningkatan Produksi Perikanan

Produksi perikanan mengalami peningkatan dari 4.211,59 ton pada 2023 menjadi 4.433,95 ton pada 2024. Kenaikan ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDRB, menunjukkan pengelolaan dan optimalisasi sektor perikanan yang lebih baik.

5) Kontribusi terhadap Ekonomi Daerah

Peningkatan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu kontribusi utama pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, yang menunjukkan keberlanjutan dan stabilitas sektor unggulan ini.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketergantungan pada Tren Pertumbuhan Produksi

Meskipun tren pertumbuhan produksi positif, keberlanjutan sektor ini masih rentan terhadap risiko, seperti perubahan iklim, hama tanaman, atau fluktuasi harga pasar global, yang dapat memengaruhi performa pada tahun-tahun mendatang.

2) Penyebaran Manfaat yang Belum Merata

Tidak semua petani atau nelayan mungkin merasakan manfaat langsung dari peningkatan NTP atau produksi, terutama di wilayah terpencil yang mungkin kurang mendapat perhatian atau fasilitas pendukung.

3) Dampak Ekologis

Peningkatan produksi yang signifikan, terutama di sektor pertanian, mungkin berdampak pada degradasi lingkungan seperti kerusakan tanah, penggundulan hutan, atau

pencemaran perairan, yang bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan jangka panjang.

4) Kurangnya Diversifikasi

Tidak disebutkan diversifikasi produk atau inovasi dalam sektor ini, sehingga ketergantungan hanya pada beberapa komoditas utama dapat menjadi hambatan ketika permintaan atau harga komoditas tersebut menurun.

5) Keterbatasan Teknologi dan Pelatihan

Tidak ada informasi mengenai pengembangan kapasitas petani, nelayan, atau pengelola kehutanan, serta penerapan teknologi modern. Tanpa inovasi dan pelatihan, efektivitas sektor ini mungkin terbatas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kesimpulan:

Peningkatan signifikan dalam realisasi target PDRB dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan keberhasilan pengelolaan sektor unggulan ini. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan, perlu diatasi tantangan seperti risiko lingkungan, distribusi manfaat yang lebih merata, inovasi teknologi, serta diversifikasi produk. Dengan strategi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, sektor ini dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Faktor Keberhasilan:

1) Upah Tenaga Kerja yang Kompetitif

Upah tenaga kerja yang kompetitif mendukung keberlanjutan industri pengolahan di Kabupaten Grobogan, memungkinkan sektor perdagangan besar dan eceran memiliki biaya operasional yang efisien, sehingga berkontribusi positif terhadap PDRB.

2) Perkembangan Infrastruktur

Infrastruktur yang berkembang menciptakan aksesibilitas yang lebih baik bagi aktivitas perdagangan dan reparasi, mendukung distribusi barang yang lebih lancar dan efisien ke berbagai pasar.

3) Kehadiran Kawasan Industri Strategis

Kawasan industri strategis memberikan dorongan besar bagi perdagangan grosir dan eceran dengan meningkatnya suplai barang yang dihasilkan oleh industri pengolahan. Hal ini memperluas jangkauan pasar dan mendukung kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

4) Ketahanan Perdagangan Eceran selama Pandemi

Ketahanan perdagangan eceran di tengah pandemi mencerminkan fleksibilitas dan daya adaptasi sektor ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ini berperan besar dalam memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

5) Peningkatan Permintaan dan Konsumsi

Meningkatnya permintaan dan konsumsi, baik dari masyarakat lokal maupun luar daerah, mendorong pertumbuhan sektor ini dan menjadi pendorong utama peningkatan kontribusi PDRB dari sektor perdagangan.

6) Posisi Geografis yang Menguntungkan

Lokasi strategis Kabupaten Grobogan mendukung aktivitas perdagangan dengan akses pasar domestik maupun ekspor, yang meningkatkan daya saing daerah.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketergantungan pada Faktor Permintaan dan Konsumsi

Peningkatan sektor ini yang didorong oleh permintaan dan konsumsi bersifat sensitif terhadap perubahan ekonomi, seperti inflasi atau penurunan daya beli masyarakat, yang dapat menjadi tantangan di masa depan.

2) Ketimpangan Distribusi Infrastruktur

Meski infrastruktur berkembang, tidak semua wilayah mungkin mendapatkan akses yang sama. Ketimpangan ini dapat membatasi potensi pertumbuhan sektor perdagangan di daerah terpencil.

3) Ketergantungan pada Kawasan Industri

Keberhasilan yang sangat bergantung pada kawasan industri strategis menimbulkan risiko jika sektor industri mengalami penurunan, seperti akibat fluktuasi pasar global atau gangguan produksi.

4) Kurangnya Diversifikasi Produk dan Layanan

Tidak ada indikasi adanya diversifikasi dalam produk perdagangan atau layanan reparasi. Ketergantungan pada jenis barang tertentu dapat menghambat pertumbuhan jika terjadi perubahan tren pasar.

5) Tantangan Lingkungan

Peningkatan aktivitas perdagangan dan industri dapat menimbulkan tantangan lingkungan, seperti pencemaran atau limbah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi keberlanjutan jangka panjang.

Kesimpulan:

Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan keberhasilan melalui keunggulan geografis, ketahanan ekonomi sektor eceran, dan perkembangan infrastruktur. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada konsumsi masyarakat, pemerataan infrastruktur, dan kebutuhan inovasi dalam sektor reparasi tetap memerlukan perhatian. Strategi diversifikasi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kapasitas layanan dapat menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan sektor ini di masa depan.

c. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Faktor Keberhasilan:

- 1) Pertumbuhan PDRB yang Signifikan
Pertumbuhan PDRB mencapai 349,06% merupakan indikator yang sangat positif, menunjukkan kemajuan pesat sektor industri pengolahan dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
- 2) Meningkatnya Jumlah UMKM
Peningkatan jumlah UMKM mencerminkan dinamika ekonomi yang semakin aktif. UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan volume produksi, memperluas pasar, dan menciptakan peluang bisnis baru.
- 3) Penyerapan Tenaga Kerja Informal
Banyaknya tenaga kerja informal yang terserap menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.
- 4) Pengembangan Potensi Daerah
Sektor ini juga berkontribusi pada pengembangan potensi daerah, baik melalui pemanfaatan sumber daya lokal maupun pengembangan inovasi dalam industri pengolahan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 5) Efek Multiplier pada Ekonomi Lokal
Aktivitas UMKM dalam sektor industri pengolahan turut mendorong peningkatan konsumsi dan pertumbuhan sektor pendukung lainnya, seperti perdagangan dan jasa logistik, yang memberikan dampak berantai pada ekonomi lokal.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

- 1) Ketimpangan Pertumbuhan
Tingginya angka pertumbuhan PDRB tidak selalu mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi. Ada kemungkinan bahwa wilayah tertentu masih belum

menikmati dampak positif dari pertumbuhan sektor industri pengolahan ini.

2) Keterbatasan Kapasitas UMKM

Meskipun jumlah UMKM meningkat, tidak disebutkan apakah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, seperti akses terhadap teknologi modern, pelatihan, atau pembiayaan yang memadai.

3) Ketergantungan pada Tenaga Kerja Informal

Penyerapan tenaga kerja informal mungkin mencerminkan adanya kendala dalam menyediakan pekerjaan formal yang lebih stabil dan berkelanjutan, seperti kebutuhan akan pelatihan kejuruan atau penciptaan lapangan kerja formal.

4) Ketidakseimbangan Pengelolaan Sumber Daya

Pengembangan potensi daerah dapat menimbulkan risiko eksploitasi sumber daya lokal jika tidak dikelola secara berkelanjutan, yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

5) Keterbatasan Infrastruktur dan Dukungan Kebijakan

Tidak disebutkan dukungan infrastruktur atau kebijakan pemerintah yang berkelanjutan untuk mendukung sektor ini. Tanpa infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang mendukung, UMKM serta sektor industri pengolahan berisiko menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan jumlah UMKM, dan penyerapan tenaga kerja informal menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian lokal. Namun, tantangan seperti pemerataan manfaat, pengembangan kapasitas UMKM, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan perlu diatasi untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

d. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian Target yang Luar Biasa

Kontribusi sub sektor usaha pariwisata terhadap PAD berhasil mencapai 204,55% dari target yang ditetapkan, menunjukkan potensi besar sektor ini dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2) Potensi Wisata Berbasis Budaya dan Alam

Upaya pengembangan wisata berbasis budaya dan alam memberikan arah yang strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan. Wisata jenis ini memiliki daya tarik yang unik dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta pelestarian budaya lokal.

3) Pelatihan Usaha Pariwisata

Adanya pelatihan untuk usaha pariwisata menunjukkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memberikan layanan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik wisata.

4) Kontribusi Signifikan terhadap Ekonomi Lokal

Pencapaian target yang tinggi mencerminkan pengelolaan beberapa destinasi wisata yang berhasil menarik wisatawan, yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, seperti konsumsi lokal dan penghasilan pelaku usaha pariwisata.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Ketimpangan Popularitas Destinasi Wisata

Beberapa destinasi wisata, seperti Goa Lawa dan Goa Macan, masih sepi pengunjung dan hanya mampu menyumbang pendapatan sebesar 20 juta per tahun. Ini menunjukkan bahwa belum semua destinasi memiliki daya tarik yang cukup untuk menarik wisatawan.

2) Belum Optimalnya Diversifikasi Wisata

Potensi wisata berbasis budaya dan alam memerlukan pengembangan yang lebih terarah, termasuk inovasi atraksi, paket wisata, serta promosi yang efektif untuk meningkatkan minat wisatawan.

3) Kurangnya Upaya Promosi pada Destinasi Sepi

Goa Lawa dan Goa Macan yang kurang diminati mengindikasikan adanya kekurangan dalam strategi pemasaran atau promosi. Hal ini berpotensi menghambat pemerataan kontribusi destinasi wisata terhadap PAD.

4) Tantangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Tidak ada informasi terkait pengembangan infrastruktur atau fasilitas di sekitar destinasi wisata yang kurang ramai. Infrastruktur yang tidak memadai bisa menjadi alasan wisatawan kurang berminat untuk berkunjung.

5) Perluasan Pelatihan yang Lebih Merata

Meskipun pelatihan sudah dilakukan, efektivitasnya mungkin belum dirasakan merata di seluruh destinasi wisata. Pelaku usaha di destinasi yang kurang populer membutuhkan pendampingan lebih intensif untuk mengembangkan layanan dan daya tarik wisata.

Kesimpulan:

Keberhasilan sektor pariwisata terlihat dari kontribusi signifikan terhadap PAD yang melampaui target, terutama melalui pendekatan pengembangan wisata berbasis budaya dan alam serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Namun, ada tantangan besar seperti ketimpangan popularitas destinasi, kurang optimalnya promosi, dan terbatasnya infrastruktur yang memerlukan perhatian. Dengan strategi diversifikasi destinasi, promosi yang terfokus, dan peningkatan infrastruktur, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih merata dan berkelanjutan terhadap PAD.

b.2. Sasaran 8

Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional yang diukur dengan indikator nilai investasi di daerah menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 303,73% dengan membandingkan target nilai investasi sebesar 870,467 milyar rupiah terealisasi sebesar 2.643.826 milyar rupiah (2,6 trilyun rupiah). Kinerja sasaran 8 dikategorikan kinerja sangat tinggi.

*Tabel 3. 25
Target dan Realisasi Sasaran 8*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	6. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	870,467	2.643.826	303,73	4.391,539	60,20

Sumber: DPMPTSP

Capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional didukung program-program:

*Tabel 3. 26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8*

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	52.700.000	52.700.000	52.467.000	99,56
2.	Program Promosi Penanaman Modal	74.550.000	74.550.000	74.550.000	100,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	72.310.000	72.310.000	68.418.000	94,62
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	583.883.000	583.883.000	496.946.950	85,11
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.000.000	30.000.000	29.500.000	98,33
Jumlah		813.443.000	813.443.000	721.881.950	88,74

Sumber: DPMPTSP

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 8 sebesar Rp 813.443.000,00 terealisasi sebesar Rp 721.881.950,00 atau realisasi sebesar 88,74%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Realisasi Jumlah Investor yang Melebihi Target
Realisasi jumlah investor mencapai 11.376 dari target 375, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menarik minat investor di tingkat nasional, bahkan melampaui ekspektasi.
2. Nilai Investasi yang Sangat Tinggi
Nilai investasi melampaui target sebesar 303,72%. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi daerah, didukung oleh pengelolaan dan promosi investasi yang efektif.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
Peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta ketersediaan data untuk perizinan yang mencapai 100%, menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
4. Monitoring dan Pembinaan yang Konsisten
Monitoring dan pembinaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan dan keberlanjutan investasi.
5. Digitalisasi Perizinan melalui “Jempol Premium”
Digitalisasi perizinan dan inisiatif jemput bola seperti “Jempol Premium” memperlihatkan inovasi dalam mempermudah akses perizinan, khususnya untuk usaha mikro. Ini meningkatkan efisiensi dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
6. Pemanfaatan Mal Pelayanan
Penggunaan Mal Pelayanan sebagai pusat kemudahan perizinan dan transaksi usaha memberikan nilai tambah bagi investor, mempersingkat waktu pengurusan dan menciptakan pengalaman yang lebih nyaman.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketimpangan Distribusi Investasi

Tidak disebutkan distribusi investasi secara geografis. Ada kemungkinan konsentrasi investor hanya berada di wilayah tertentu, sehingga daerah lain tidak sepenuhnya menikmati manfaat investasi.

2. Kendala pada Usaha Mikro

Meskipun “Jempol Premium” memudahkan perizinan usaha mikro, belum ada informasi terkait kendala yang dihadapi, seperti kesiapan pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan digitalisasi atau tantangan administratif lainnya.

3. Peluang yang Masih Terbatas pada Sektor Tertentu

Meskipun nilai investasi tinggi, mungkin saja sebagian besar investasi hanya terfokus pada sektor tertentu. Hal ini dapat mengurangi diversifikasi portofolio investasi yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi yang Perlu Dikembangkan

Meskipun monitoring dan pembinaan dilakukan, belum ada informasi apakah upaya ini mencakup pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas investasi.

5. Keterbatasan Penyesuaian dengan Teknologi Digital

Peningkatan digitalisasi perizinan perlu diimbangi dengan edukasi dan pendampingan bagi pengguna, terutama bagi pelaku usaha mikro yang mungkin belum sepenuhnya familiar dengan platform digital.

Kesimpulan:

Keberhasilan yang signifikan dalam pencapaian jumlah investor, nilai investasi, serta inovasi pelayanan menunjukkan bahwa daya tarik investasi berskala nasional telah meningkat pesat. Namun, beberapa tantangan seperti ketimpangan distribusi investasi, diversifikasi sektor, dan kesiapan adaptasi teknologi memerlukan perhatian agar manfaat investasi dapat dirasakan secara merata

dan berkelanjutan. Strategi pengembangan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang akan menjadi kunci untuk mempertahankan momentum ini.

b.3. Sasaran 9

Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.

Pengukuran kinerja sasaran menguatnya pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 9 disajikan pada tabel 3.30 berikut:

*Tabel 3. 27
Target dan Realisasi Sasaran 9*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	6. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7	0,75	107,14	0,72	104,17

Sumber: SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 9 menunjukkan bahwa indeks IDM yang ditargetkan sebesar 0,7, tercapai sebesar 0,75, sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,14%. Capaian kinerja sasaran ini dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 9 didukung program-program:

Tabel 3. 28
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penataan Desa	40.000.000	40.000.000	36.930.399	92,33
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	3.698.400.000	4.395.400.000	4.354.031.169	99,06
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.944.940.000	4.009.940.000	3.911.606.840	97,55
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.899.700.000	1.899.700.000	1.789.579.410	94,20
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	864.235.900	950.787.800	919.317.400	96,69
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.848.667.500	2.839.570.500	2.816.512.245	99,19
Jumlah		13.295.943.400	14.135.398.300	13.827.977.463	97,83

Sumber: Dispermades

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sembilan sebesar Rp 14.135.398.300,00 terealisasi sebesar Rp 13.827.977.463,00 atau realisasi sebesar 97,83%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Peningkatan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Melampaui Target

Keberhasilan capaian IDM yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan sosial ekonomi desa. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan kondisi desa yang lebih baik.

2. Kenaikan Status 73 Desa

Sebanyak 73 desa mengalami peningkatan status, dengan 27 desa naik dari status maju ke mandiri dan 46 desa dari berkembang ke maju. Ini menunjukkan progres nyata dalam pengelolaan pembangunan desa secara bertahap.

3. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Desa

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa menjadi faktor kunci keberhasilan. Ini mendorong pembentukan desa yang lebih mandiri dengan partisipasi aktif masyarakat.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang lebih terkelola dengan baik mampu mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam program pembangunan, yang berdampak positif terhadap potensi sosial ekonomi desa.

5. Pengembangan Potensi Lokal Desa

Fokus pada pengembangan potensi desa membantu menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung keberlanjutan pembangunan yang berbasis pada kekuatan lokal.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa memperbaiki kualitas pelayanan dan manajemen di tingkat desa, sehingga menciptakan pemerintahan desa yang lebih profesional.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketimpangan Status antar Desa

Meskipun ada 73 desa yang naik status, banyak desa lainnya mungkin belum mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah desa.

2. Keberlanjutan Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa perlu terus ditingkatkan dan dijaga agar kesadaran ini tidak bersifat sementara. Tantangan sosial atau ekonomi bisa memengaruhi konsistensi keterlibatan masyarakat.

3. Tantangan Pengelolaan Potensi Lokal

Pengembangan potensi lokal mungkin menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pasar, pendanaan, atau sumber daya manusia yang memadai.

4. Aparatur Pemerintah Desa yang Belum Merata Kompetensinya
Tidak semua aparatur pemerintah desa mungkin memiliki tingkat kompetensi yang sama, terutama di desa-desa yang masih tertinggal, sehingga memengaruhi efektivitas tata kelola.
5. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
Tidak disebutkan adanya pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembangunan desa. Teknologi digital dapat membantu mempercepat proses pengelolaan desa dan potensi ekonomi lokal.
6. Risiko Ketergantungan pada Bantuan Eksternal
Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan, ada kemungkinan beberapa desa masih bergantung pada bantuan eksternal atau program pemerintah pusat, yang bisa menghambat kemandirian desa dalam jangka panjang.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam capaian IDM yang melampaui target, kenaikan status desa, dan peningkatan tata kelola serta kesadaran masyarakat mencerminkan potensi yang kuat dalam membangun desa yang lebih maju dan mandiri. Namun, tantangan seperti ketimpangan antar desa, keberlanjutan program, dan pemanfaatan teknologi memerlukan perhatian lebih. Pendekatan inklusif dan inovatif dapat membantu memastikan pembangunan sosial ekonomi desa tetap berkelanjutan dan merata.

b.4. Sasaran 10

Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran kinerja sasaran 10 dilakukan dengan indikator persentase penurunan PPKS dalam satuan persen per tahun dengan ditetapkan target sebesar 1,40%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 10 disajikan pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3. 29
Target dan Realisasi Sasaran 10

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	6. Persentase penurunan PPKS	%	1,40	1,40	100,00	1,40	100,00

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori PPKS dengan capaian kinerja 100,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target yang ditetapkan sebesar 1,40% terealisasi sebesar 1,40%. Capaian kinerja sebesar 100,00% dikategorikan tercapai dan bekinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 10 didukung program-program:

Tabel 3. 30
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pemberdayaan Sosial	110.930.000	110.930.000	108.855.000	98,13
2.	Program Rehabilitasi Sosial	1.006.530.000	1.006.530.000	992.889.800	98,64
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	173.625.000	7.644.071.000	7.641.931.750	99,97
4.	Program Penanganan Bencana	163.924.000	163.924.000	163.121.000	99,51
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000	30.000.000	29.750.000	99,17
Jumlah		1.485.009.000	8.955.455.000	8.936.547.550	99,79

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sepuluh sebesar Rp 8.955.455.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.936.547.550,00 atau realisasi sebesar 99,79%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 10 diantaranya sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan Koordinasi Lintas Sektor yang Meningkatkan
Meningkatnya komitmen Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor telah menciptakan sinergi dalam penanganan PPKS. Ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun kerja sama yang terintegrasi untuk menghadapi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Grobogan.
2. Pembentukan Tim Pendataan PPKS di Kecamatan
Dibentuknya tim pendataan di seluruh kecamatan berhasil meningkatkan validitas data PPKS secara masif. Data yang lebih akurat membantu merancang dan melaksanakan program yang lebih tepat sasaran.
3. Kontribusi Sektor Terkait dengan Dukungan Anggaran Memadai
Partisipasi sektor terkait yang didukung dengan anggaran memadai menunjukkan keberhasilan dalam alokasi sumber daya untuk menyelesaikan masalah sosial. Anggaran yang cukup memberikan ruang bagi pelaksanaan program yang lebih efektif.
4. Pencapaian Target Program Sosial
Program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunnya jumlah PPKS.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Distribusi Manfaat yang Mungkin Belum Merata
Meskipun ada keberhasilan, manfaat program mungkin belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat PPKS di berbagai wilayah. Ketimpangan distribusi ini bisa menjadi tantangan dalam memastikan kesejahteraan yang inklusif.

2. Ketergantungan pada Pendataan Valid

Walaupun pembentukan tim pendataan meningkatkan validitas data, proses ini memerlukan pemutakhiran secara rutin untuk menjaga relevansi. Jika tidak dilakukan, efektivitas program bisa menurun akibat data yang usang atau tidak lengkap.

3. Keterbatasan Kapasitas SDM di Tingkat Lokal

Tidak semua wilayah mungkin memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk menangani PPKS secara efektif, terutama di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap pelatihan atau pendampingan.

4. Tantangan dalam Penanganan Jangka Panjang

Penurunan jumlah PPKS saat ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan, terutama jika program yang dilaksanakan tidak disertai dengan strategi untuk mencegah munculnya PPKS baru di masa depan.

5. Koordinasi yang Belum Maksimal di Seluruh Tingkatan

Meskipun koordinasi lintas sektor meningkat, tantangan tetap ada dalam menyelaraskan program di semua tingkatan pemerintahan dan memastikan tidak ada tumpang tindih atau celah dalam implementasi.

Rekomendasi:

1. Pemerataan Distribusi Manfaat

Pastikan bahwa program sosial menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, dengan mengembangkan mekanisme distribusi yang lebih adil.

2. Pemutakhiran Data secara Berkala

Lakukan pemutakhiran data PPKS secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi dalam perencanaan dan implementasi program.

3. Pengembangan Kapasitas SDM Lokal

Berikan pelatihan dan pendampingan kepada tim di tingkat kecamatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani PPKS.

4. Pendekatan Preventif Jangka Panjang

Integrasikan program jangka panjang yang fokus pada pencegahan, seperti pelatihan keterampilan kerja dan penguatan ekonomi, untuk meminimalkan jumlah PPKS di masa mendatang.

5. Penguatan Koordinasi dan Monitoring

Tingkatkan koordinasi antarinstansi di semua tingkatan, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk menjaga konsistensi dan efektivitas program.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Grobogan mencerminkan langkah-langkah positif, seperti peningkatan validitas data, koordinasi lintas sektor, dan pencapaian program sosial yang sesuai target. Namun, tantangan seperti pemerataan manfaat, pemutakhiran data, dan pendekatan preventif jangka panjang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai. Dengan strategi yang lebih inklusif dan terintegrasi, penanganan PPKS dapat terus ditingkatkan secara signifikan.

b.5. Sasaran 11

Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja

Pengukuran kinerja sasaran 11 dilakukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 atau dengan satuan persen. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 11 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 31
Target dan Realisasi Sasaran 11

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya daya Saing dan penyerapan tenaga kerja	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,2	3,23	123,10	4,00	119,25

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh capaian kinerjanya sebesar 123,10%. Dari target yang ditetapkan sebesar 4,2% terealisasi 3,23%. Capaian kinerja sebesar 123,10% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 11 didukung program-program:

Tabel 3. 32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.974.532	105.974.532	93.810.000	88,52
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.418.546.361	10.158.628.361	9.922.553.910	97,68
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	555.688.990	555.688.990	515.345.435	92,74
4.	Program Hubungan Industrial	400.000.000	400.000.000	397.039.070	99,26
5.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	225.000.000	177.018.000	124.364.600	70,26
Jumlah		10.705.209.883	11.397.309.883	11.053.113.015	96,98

Program pendukung sasaran 11 sebanyak 5 (lima) program dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.397.309.883,00 terealisasi sebesar Rp 11.053.113.015,00 atau realisasi sebesar 96,98%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 11 diantaranya sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Keberadaan BLK membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja, sehingga mereka lebih siap

menghadapi tuntutan pasar tenaga kerja. Ini secara langsung meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar domestik maupun internasional.

2. Pencapaian Target Penempatan Tenaga Kerja

Pemenuhan target penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri mencerminkan keberhasilan program penempatan tenaga kerja. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah.

3. Kemudahan Akses Melalui Mal Pelayanan

Pelayanan di Mal Pelayanan mempermudah proses administrasi, seperti mendapatkan Kartu Angkatan Kerja dan rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Langkah ini memberikan efisiensi waktu dan birokrasi, sehingga meningkatkan aksesibilitas untuk pencari kerja.

4. Pelaksanaan Job Fair

Job Fair menjadi wadah yang efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini membantu memastikan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya, sementara perusahaan dapat menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan.

5. Pembebasan Biaya Pelatihan dan Uji Kompetensi untuk CPMI

Inisiatif pembebasan biaya ini memberikan peluang yang lebih besar bagi CPMI untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga lebih banyak tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di luar negeri. Ini juga menjadi langkah inovatif yang menunjukkan perhatian terhadap tenaga kerja sektor informal.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Ketimpangan Akses Pelatihan

Meskipun BLK telah dibangun, ada kemungkinan akses terhadap pelatihan belum merata di seluruh wilayah, terutama untuk daerah terpencil yang mungkin tidak terjangkau fasilitas ini.

2. Keterbatasan Lapangan Kerja Lokal

Meskipun penempatan tenaga kerja memenuhi target, lapangan kerja di tingkat lokal mungkin masih kurang dibandingkan jumlah pencari kerja, yang bisa memaksa mereka mencari pekerjaan di luar daerah atau luar negeri.

3. Kesesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Pasar

Ada potensi bahwa pelatihan yang diberikan di BLK belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga mengurangi efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

4. Tantangan dalam Job Fair

Tidak semua perusahaan mungkin terlibat dalam Job Fair, sehingga peluang kerja yang tersedia tidak mencakup seluruh sektor. Pencari kerja yang memiliki latar belakang atau kompetensi tertentu mungkin belum mendapatkan peluang yang optimal.

5. Keberlanjutan Pembebasan Biaya CPMI

Program pembebasan biaya pelatihan dan uji kompetensi bagi CPMI perlu keberlanjutan. Jika anggaran tidak cukup memadai di masa depan, program ini berisiko dihentikan atau dikurangi cakupannya.

Rekomendasi:

1. Pemerataan Akses Pelatihan

Perluasan jangkauan BLK ke wilayah terpencil untuk memastikan semua calon tenaga kerja memiliki akses yang sama terhadap pelatihan keterampilan.

2. Peningkatan Kesesuaian Pelatihan

Menyesuaikan program pelatihan BLK dengan kebutuhan spesifik pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan untuk meningkatkan efektivitas peningkatan kompetensi tenaga kerja.

3. Diversifikasi Peluang di Job Fair

Mendorong partisipasi lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor dalam Job Fair untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan inklusif.

4. Penguatan Lapangan Kerja Lokal

Memprioritaskan pengembangan industri lokal untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri, sehingga pencari kerja tidak harus bergantung pada peluang kerja di luar daerah atau luar negeri.

5. Keberlanjutan Program CPMI

Menjamin anggaran yang memadai untuk keberlanjutan program pembebasan biaya CPMI, serta memperluas program serupa untuk segmen tenaga kerja lain.

Kesimpulan:

Keberhasilan program peningkatan daya saing dan penyerapan tenaga kerja terlihat dari adanya pembangunan BLK, pencapaian target penempatan tenaga kerja, kemudahan pelayanan di Mal Pelayanan, serta inisiatif Job Fair dan pembebasan biaya bagi CPMI. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar, dan keberlanjutan program perlu diatasi untuk memastikan dampak positif yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan strategi yang lebih inklusif dan terencana, daya saing tenaga kerja dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

4. Misi 4

Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan 4

Tujuan meningkatkan **tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas** diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan

kemampuan inovasi yang mumpuni, meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, dan meningkatnya kualitas manajemen ASN. Capaian kinerja sebesar 115,99%, dari target nilai yang ditetapkan 71 dan nilai hasil evaluasi tahun 2024 sebesar 82,35.

Tabel 3. 33

Target dan Realisasi Tujuan 4

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	5. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Nilai	BB (71)	A (82,35)	115,99	BB 75,00	109,80

Sumber: Kementerian PANRB

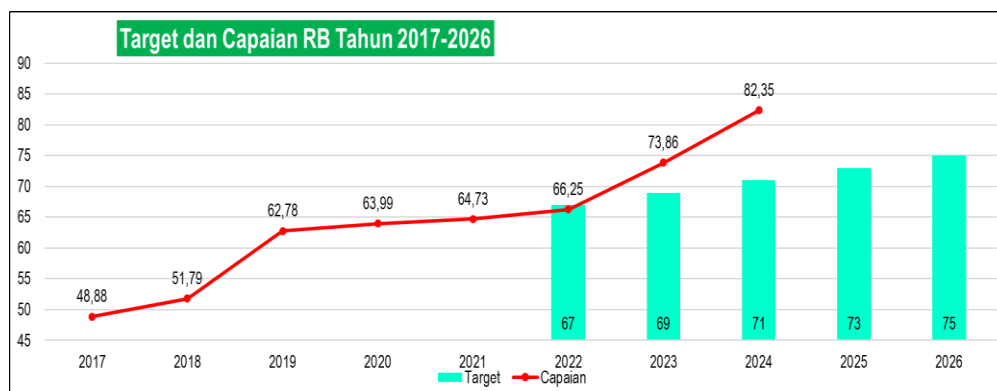
Indeks Reformasi Birokrasi Mulai Tahun 2023, telah dilakukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyeselarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, bahwa terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dikenal dengan 'double track', terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan

mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari penjumlahan dari hasil Evaluasi RB General dan RB Tematik. Evaluasi RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategi reformasi birokrasi, sedangkan RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 sampai Tahun 2024 terus meningkat, bahkan target RPJMD Tahun 2026 pada tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui, sebagaimana data di bawah ini:

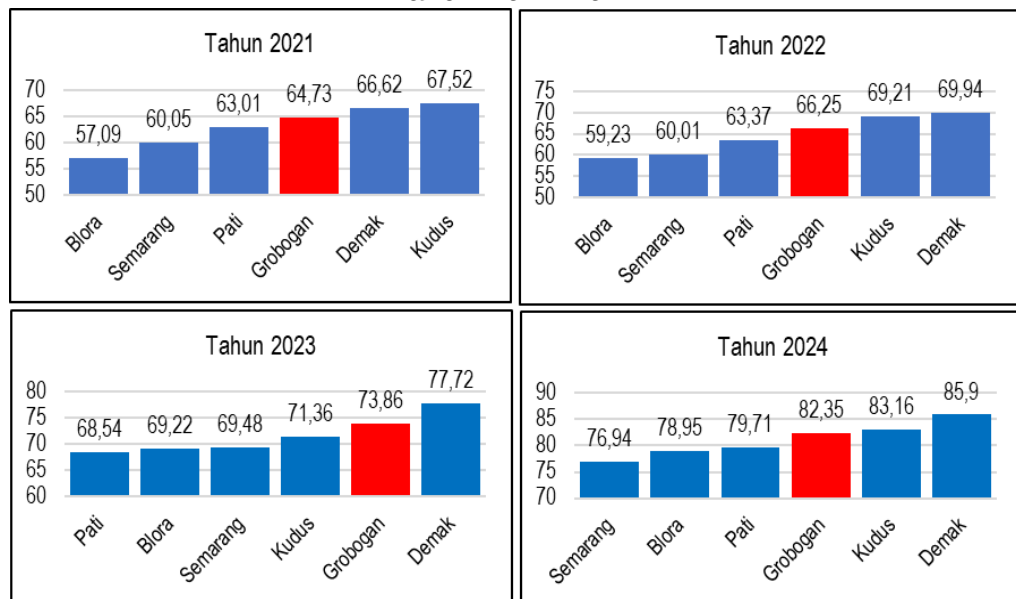
Grafik 3. 14
Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2026



Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten sekitar dari tahun 2021-2024, Kabupaten Grobogan masih diurutan tengah, sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3. 15
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kabupaten sekitar
Tahun 2021-2024



Sumber: Kemen PANRB

b. Sasaran

b.1. Sasaran 12

Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni

Sasaran 12 diukur dengan indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 34
Target dan Realisasi Sasaran 12

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	6. Rata-rata nilai IKM	Kategori Skor	B 77,7	B 84,50	108,75	B 79,70	106,02
		7. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat inovatif	Sangat Inovatif 65,48	100,00	Sangat inovatif	100,00
Rata-rata Capaian						104,38		103,01

Sumber: Setda dan Bappeda (Kepmendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024 ttg Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kab dan Kota Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 12 terhadap realisasi kinerja indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 104,38%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran dapat tercapai dan dikategorikan sangat tinggi.

Capaian sasaran 12 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 35

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.530.860.255.300	1.666.610.264.964	1.589.487.031.146	95,37
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.033.925.700	16.029.696.700	15.508.168.121	96,75
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.764.047.700	1.744.252.700	1.641.034.900	94,08
4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.725.170.700	13.076.250.700	9.117.728.732	69,73
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	167.975.500	136.138.500	128.325.100	94,26
6.	Program Pendaftaran Penduduk	94.935.000	94.935.000	79.288.000	83,52
7.	Program Pencatatan Sipil	1.700.162.200	1.700.162.200	1.622.964.393	95,46
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.013.300	35.013.300	31.765.000	90,72
9.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.033.500	30.033.500	28.035.000	93,35
Jumlah		1.563.411.518.900	1.699.456.747.564	1.617.644.340.392	95,19

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 12 sebesar Rp 1.617.644.340.392,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.699.456.747.564,00 atau sebesar 95,19%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 12 adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata nilai IKM

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian Kinerja Melebihi Target

Realisasi skor IKM sebesar 84,50 melebihi target yang ditetapkan (77,70), dengan capaian kinerja mencapai 108,75%. Kinerja ini dinilai sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2) Kategori "BAIK" pada Skor IKM

Rata-rata nilai IKM yang berada dalam kategori "BAIK" menunjukkan bahwa mayoritas unit kerja telah memenuhi harapan masyarakat dalam hal pelayanan publik, memberikan dampak positif terhadap citra pemerintah.

3) Peningkatan Metode Survei Secara Online

Penerapan metode survei secara online mempermudah responden untuk memberikan masukan tanpa membutuhkan waktu khusus. Selain itu, metode ini juga memudahkan petugas dalam menganalisis hasil survei dengan lebih praktis dan cepat.

4) Kenaikan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei

Pada tahun 2024, sebanyak 51 dari 52 unit kerja telah melaksanakan survei, menunjukkan komitmen yang meningkat untuk memantau dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

5) Dampak Positif pada Efisiensi dan Validitas Data

Pelaksanaan survei yang lebih luas dan berbasis online membantu meningkatkan efisiensi proses serta validitas data yang dikumpulkan, yang mendukung kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan pelayanan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:**1) Unit Kerja yang Belum Melaksanakan Survei**

Dari total 52 unit kerja, masih ada 1 unit kerja yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja.

2) Keterbatasan Responden yang Tidak Akses Digital

Meski metode survei online lebih praktis, tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan platform digital, sehingga dapat mengurangi representasi dari kelompok tertentu dalam hasil survei.

3) Perluasan Kategori dari "BAIK" ke "SANGAT BAIK"

Meskipun skor IKM sudah baik, pencapaian yang lebih ambisius ke kategori "SANGAT BAIK" dapat menjadi tantangan berikutnya untuk meningkatkan kualitas layanan.

4) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Survei

Narasi tidak menyebutkan apakah ada mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut dari hasil survei, yang penting untuk memastikan masukan masyarakat benar-benar diimplementasikan dalam perbaikan pelayanan.

5) Ketergantungan pada Survei sebagai Satu-satunya Ukuran

Penggunaan survei sebagai indikator utama dapat menjadi tantangan jika tidak dikombinasikan dengan metode lain, seperti audit independen atau wawancara mendalam, untuk memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap kualitas layanan.

Rekomendasi:**1) Mendorong Pelibatan Unit Kerja yang Belum Aktif**

Pastikan seluruh unit kerja berpartisipasi dalam survei untuk mencakup seluruh aspek pelayanan publik yang relevan.

2) Mengakomodasi Masyarakat Tanpa Akses Digital

Sediakan alternatif survei manual atau bantuan teknis untuk masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan survei online, guna meningkatkan inklusivitas hasil survei.

3) Meningkatkan Target IKM ke Kategori "SANGAT BAIK"

Fokus pada perbaikan aspek layanan yang masih mendapat skor rendah dalam survei untuk mencapai target skor yang lebih tinggi pada periode berikutnya.

4) Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Survei

Terapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan masukan masyarakat digunakan secara efektif dalam merancang kebijakan atau perbaikan layanan.

5) Diversifikasi Metode Evaluasi

Kombinasikan survei dengan metode lain, seperti wawancara langsung atau observasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepuasan masyarakat.

Kesimpulan:

Keberhasilan dalam mencapai skor IKM di atas target, kategori "BAIK", dan peningkatan metode survei online menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, tantangan seperti inklusivitas survei, tindak lanjut hasil survei, dan perbaikan menuju kategori "SANGAT BAIK" perlu diatasi agar capaian ini berkelanjutan dan lebih merata. Dengan strategi yang tepat, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sesuai harapan masyarakat.

Secara lengkap jumlah unit kerja maupun skor yang dicapai pada tahun 2019—2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 36

Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2024

No.	Tahun	Jumlah Unit Kerja	Metode Survei		Rata-rata Skor	Kategori
			Manual	Online		
1.	2019	3	-	3	80,71	BAIK
2.	2020	10	6	4	82,40	BAIK
3.	2021	20	14	6	83,06	BAIK
4.	2022	48	40	8	83,08	BAIK
5.	2023	31	14	17	83,13	BAIK
6.	2024	51	21	30	84,50	BAIK

b. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Faktor Keberhasilan:

1) Pencapaian Kategori "Sangat Inovatif"

Kabupaten Grobogan berhasil mencapai kategori "Sangat Inovatif" dengan nilai 65,48, yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan telah memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan pemerintah daerah.

2) Tercapainya Capaian 100% dari Target

Realisasi nilai IID sebesar 100% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target yang ditetapkan, menandakan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan melalui inovasi.

3) Pengakuan Nasional dalam Peringkat Kategori Kabupaten

Meskipun terjadi penurunan peringkat, tetap berada dalam daftar kabupaten dengan kategori "Sangat Inovatif" secara nasional menunjukkan Grobogan masih diakui sebagai daerah dengan kemampuan inovasi yang baik.

4) Dorongan untuk Kompetisi Positif

Penilaian inovasi daerah mendorong kompetisi positif antar kabupaten yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Hal ini memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Penurunan Peringkat Nasional

Peringkat Kabupaten Grobogan secara nasional turun dari peringkat 21 pada tahun 2023 ke peringkat 47 pada tahun 2024 dari 415 kabupaten. Penurunan ini mengindikasikan adanya daerah lain yang lebih progresif dalam implementasi inovasi.

2) Kurangnya Terobosan Baru yang Kompetitif

Penurunan peringkat dapat mengindikasikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak cukup kuat atau kompetitif

dibandingkan dengan kabupaten lain yang berhasil menciptakan inovasi lebih signifikan.

3) Ketiadaan Indikasi Peningkatan Kualitas Nilai IID

Meskipun berada pada kategori "Sangat Inovatif," tidak ada peningkatan kualitas nilai IID (65,48) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

4) Kurangnya Fokus pada Differensiasi Inovasi

Tidak disebutkan diferensiasi inovasi yang menjadi daya saing utama bagi Kabupaten Grobogan. Inovasi yang kurang unik atau kurang menonjol bisa menjadi faktor penyebab penurunan peringkat.

5) Kurangnya Eksplorasi Inovasi Lintas Sektor

Inovasi yang dilakukan mungkin hanya fokus pada sektor tertentu, sehingga kurang menonjol di tingkat nasional yang mengevaluasi inovasi lintas sektor untuk mendorong dampak yang lebih luas.

Rekomendasi

1) Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Inovasi

Fokus pada terobosan baru yang lebih inovatif, relevan, dan berdampak luas agar dapat bersaing dengan kabupaten lain di tingkat nasional.

2) Penguatan Kolaborasi dan Benchmarking

Belajar dari kabupaten yang lebih maju dalam inovasi untuk mengadopsi praktik terbaik dan berkolaborasi dalam proyek lintas sektor yang mendorong keunggulan bersama.

3) Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Inovasi

Lakukan evaluasi mendalam terhadap strategi inovasi yang ada dan pastikan bahwa setiap langkah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Promosi Inovasi yang Lebih Progresif

Tingkatkan promosi inovasi di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat citra Kabupaten Grobogan sebagai daerah yang inovatif.

5) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta

Libatkan masyarakat dan sektor swasta dalam proses inovasi untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan:

Keberhasilan Kabupaten Grobogan dalam mencapai kategori "Sangat Inovatif" dengan nilai IID 65,48 dan capaian target 100% mencerminkan adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan. Namun, tantangan seperti penurunan peringkat nasional, stagnasi kualitas inovasi, dan kurangnya fokus pada diferensiasi perlu menjadi perhatian utama. Dengan strategi pengembangan yang lebih intensif, inovasi Kabupaten Grobogan dapat kembali bersaing di posisi teratas secara nasional dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

b.2. Sasaran 13

Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 13 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 37
Target dan Realisasi Sasaran 13

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	6. Indeks SPBE	Indeks	3,3	3,57	108,18	3,50	102,00

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, ditetapkan target 3,3 dan terealisasi sesuai hasil penilaian dari Kementerian PANRB sebesar 3,57, sehingga capaian kinerjanya mencapai 108,18%. Hal ini menunjukkan sasaran 13 tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 13 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.296.592.900	1.421.902.400	1.365.879.513	96,06
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.433.392.800	2.310.034.450	2.290.033.972	99,13
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.518.400	85.518.400	83.470.200	97,60
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	75.000.000	75.000.000	73.374.057	97,83
5.	Program Pengelolaan Arsip	262.158.000	262.158.000	256.384.960	97,80
6.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	95.000.000	95.000.000	94.885.080	99,88
7.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	85.000.000	85.000.000	83.667.900	98,43
Jumlah		4.332.662.100	4.334.613.250	4.247.695.682	97,99

Program yang mendukung sasaran 13 sebanyak 7 (tujuh) program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.247.695.682,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.334.613.250,00 atau realisasi anggaran sebesar 97,99%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 13 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki beberapa keunggulan utama:

1. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Adanya aplikasi atau layanan yang telah dilengkapi dengan fitur interaksi, transaksi, dan kolaborasi menunjukkan kemajuan

signifikan. Optimalisasi ini dilakukan dengan menindaklanjuti revidi dan perbaikan tata kelola serta manajemen layanan.

2. Efektivitas dan Efisiensi

Implementasi tata kelola yang baik di lingkup internal pemerintahan berkontribusi pada pelaksanaan SPBE yang lebih efektif dan efisien.

3. Kinerja Sangat Baik

Dari hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendapatkan predikat "Sangat Baik" dalam penerapan SPBE, mencerminkan keberhasilan di berbagai aspek.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Perencanaan Strategis yang Terbatas: Pada aspek perencanaan strategis, khususnya terkait Arsitektur SPBE, terdapat kekurangan dalam penyusunan Referensi Arsitektur yang mencakup berbagai domain (layanan, informasi, infrastruktur, dan keamanan).
2. Dokumentasi Tidak Formal: Dokumentasi arsitektur yang ada belum memiliki bukti pengesahan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai dokumen formal yang valid.
3. Kekurangan dalam Pendekatan Strategis: Kelemahan ini dapat menghambat kesinambungan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan SPBE secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan SPBE, terutama pada aspek layanan berbasis elektronik. Namun, tantangan signifikan masih terdapat pada perencanaan strategis dan dokumentasi formal Arsitektur SPBE. Untuk meningkatkan penerapan SPBE yang lebih terintegrasi, pemerintah perlu fokus pada penyusunan dokumen yang valid dan penguatan strategi jangka panjang di setiap domain arsitektur. Hal ini akan memastikan bahwa penerapan e-government dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak maksimal.

b.3. Sasaran 14

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Opini BPK. Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 14 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 39
Target dan Realisasi Sasaran 14

Target dan Realisasi Sasaran 17								
No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	6. Nilai SAKIP	Peringkat Nilai	BB 70,01	B 65,93	94,05	BB 73,50	89,70
		7. Level Maturitas SPIP	Level Skor	Level 3 3,12	Level 3 3,319	106,38	Level 3 3,15	105,37
		8. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Rata-rata Capaian						100,14	98,36	

Sumber: Kementerian PANRB (Setda), BPKP (Inspektorat), BPK (BPPKAD)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sasaran 14 diukur dengan tiga indikator yaitu nilai SAKIP, level maturitas SPIP, dan opini BPK. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator nilai SAKIP yang tidak mencapai target (94,05%), sehingga rata-rata capaian ketiga indikator sebesar 100,14% dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja nilai SAKIP sebesar 94,05% artinya mempunyai kategori kinerja sangat tinggi namun tidak tercapai. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 predikat BB dengan nilai 70,10, realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 tercapai predikat B dengan nilai 65,93.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/251/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **65,93** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 40
Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2023-2024

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,75	23,02
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,68	19,16
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,42	9,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,40	14,10
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	64,25	65,93
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 tidak tercapai dengan capaian sebesar 94,05%. Hal ini dikarenakan:

- (1) Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyampaikan dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja milik Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian tahun 2024 di esr.menpan.go.id;
- (2) Pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024, masih terdapat sasaran yang lebih tepat bila dikawal pada level Perangkat Daerah, misalnya terkait isu/konflik sosial yang sebenarnya bukan menjadi isu strategis di Kabupaten Grobogan;

- (3) Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) serta cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja pada level Perangkat Daerah;
- (4) Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip *logis/logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dan belum menggambarkan *critical success factor* yang mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang telah ditetapkan;
- (5) Cascading yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang atau dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.
- (6) Aplikasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi;
- (7) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum dilengkapi dengan analisis yang memadai.
- (8) Laporan kinerja di level Pemda telah sesuai dengan kaidah dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Namun, laporan kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum menyajikan analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja, dan analisis upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per capaian kinerja yang dimiliki;
- (9) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun

berikutnya. Hal ini terlihat dari masih terdapat penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, tanpa penjelasan yang memadai.

- (10) Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung ke akar permasalahan yang dialami oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP;
- (11) Belum seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Internal tahun 2023 yang diberikan oleh Inspektorat.

b. Level Maturitas SPIP

Faktor Keberhasilan:

1) Komponen Penetapan Tujuan:

Nilai komponen penetapan tujuan mencapai skor 3.500, menunjukkan bahwa sasaran strategis telah selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.

- Indikator dan target kinerja secara umum sudah memenuhi kriteria SMART.
- Penetapan tujuan memperhatikan isu strategis dan berorientasi hasil.

2) Capaian pada Sektor Ketahanan Pangan:

Peningkatan capaian pada skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan data tahun 2023 mencapai 92,5, lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya. Program diversifikasi dan ketahanan pangan memberikan kontribusi nyata pada pencapaian yang berorientasi masyarakat.

3) Kolaborasi pada Sektor Kemiskinan:

Upaya pengentasan kemiskinan mencakup strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan wilayah kantong kemiskinan. Sinergi antar

sektor dalam berbagai kebijakan menunjukkan komitmen lintas perangkat daerah.

4) Kinerja Pencapaian Tujuan:

Penilaian pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP efektif secara umum, menunjukkan efisiensi pada laporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan peraturan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Komponen Penetapan Tujuan:

Masih terdapat program yang tidak fokus pada sasaran strategis, menciptakan inefisiensi. Sasaran dan target program belum seluruhnya memperhitungkan capaian tahun sebelumnya. Cascading belum menggambarkan keterkaitan lintas perangkat daerah.

2) Komponen Struktur Proses:

Nilai evaluasi 0,901 menunjukkan pengendalian intern belum diimplementasikan konsisten. Belum dilaksanakan evaluasi *residual risk* dan tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif.

3) Komponen Pencapaian Tujuan:

Capaian outcome belum sepenuhnya mencapai target strategis, baik pada level Pemda maupun OPD. Indikator kinerja kegiatan dan sasaran program belum relevan dengan tujuan strategis. Temuan LHP BPK terkait pengelolaan keuangan dan pengamanan aset masih berulang.

4) Pengendalian pada Sektor Kemiskinan:

Target pengurangan angka kemiskinan belum tercapai (tahun 2023 sebesar 11,8%, melebihi target 10,46–10,94%). Belum optimalnya kontribusi sektor privat, filantropi, dan akademisi. Program kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat akibat ketidaktepatan sasaran output.

5) Pengendalian pada Sektor Ketahanan Pangan:

Penjabaran sasaran program/kegiatan pada OPD belum seluruhnya selaras dengan sasaran strategis. Target capaian program/kegiatan tidak memperhitungkan data capaian sebelumnya, menunjukkan kurangnya konsistensi evaluasi.

Kesimpulan:

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mencapai beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan SPIP, termasuk pada perencanaan, pencapaian tujuan, dan pengelolaan sektor strategis. Namun, untuk meningkatkan maturitas SPIP, tantangan seperti penguatan komponen struktur proses, relevansi program, dan optimalisasi pengendalian pada sektor strategis harus segera diatasi. Apakah Anda ingin rekomendasi untuk langkah-langkah peningkatan SPIP? Saya siap membantu!

c. Opini Laporan Keuangan BPK

Faktor Keberhasilan:

1. Capaian Opini WTP yang Konsisten:

Pemerintah Kabupaten Grobogan berhasil mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut (2016-2024). Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan yang sangat baik. Target indikator kinerja "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah" tahun 2024 berhasil tercapai 100%.

2. Penerapan Teknologi untuk Tata Kelola Keuangan:

Pengelolaan keuangan berbasis elektronik melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) telah mendukung efisiensi dan transparansi. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan melalui berbagai sistem seperti SIMREN, SIMDA, dan SIMONTEP memperkuat integrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

3. Komitmen Tim Anggaran Daerah:

Kegiatan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dari tim anggaran daerah telah mendorong komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Cepatnya pelaporan keuangan, yang dapat diselesaikan sebelum akhir Maret setiap tahun, menunjukkan kemampuan administrasi yang solid.

4. Implementasi Sistematis Pengawasan dan Perencanaan:

Integrasi proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan melalui aplikasi berbasis elektronik telah meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Peningkatan Keberlanjutan dan Transformasi:

Meski opini WTP dicapai secara konsisten, belum ada langkah eksplisit yang dijelaskan terkait peningkatan kualitas laporan keuangan agar dapat lebih mendukung transformasi tata kelola di level strategis.

2. Evaluasi Mendalam Terhadap Sistem Elektronik:

Sistem elektronik seperti SIMREN, SIMDA, dan SIMONTEP memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan tidak hanya efisiensi tetapi juga efektivitas dalam proses tata kelola keuangan dan perencanaan.

3. Peningkatan Keterlibatan Lintas Perangkat Daerah:

Masih diperlukan keterlibatan yang lebih kuat dari seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian di tingkat unit kerja.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan telah berhasil menunjukkan akuntabilitas yang tinggi melalui capaian opini WTP yang konsisten, didukung oleh penerapan teknologi dan komitmen manajemen yang solid. Namun, peningkatan berkelanjutan, evaluasi sistem yang menyeluruh, dan kolaborasi lintas unit masih menjadi area

yang perlu diperhatikan untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih matang dan strategis.

Capaian sasaran 14 didukung dengan program-program:

Tabel 3. 41
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	600.000.000	737.406.000	712.456.050	96,62
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.000.000.000	2.360.000.000	2.318.099.310	98,22
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	1.450.000.000	1.425.644.170	98,32
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	315.658.000	324.383.000	309.376.000	95,37
5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	84.345.000	75.125.000	62.507.000	83,20
6.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	473.647.073.000	478.373.485.150	474.551.967.237	99,20
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	923.788.000	1.046.738.000	947.105.684	90,48
8.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.979.962.000	4.738.769.000	4.459.070.085	94,10
Jumlah		484.000.826.000	489.105.906.150	484.786.225.536	99,12

Program yang mendukung sasaran 14 sebanyak 7 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 484.786.225.536,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 489.105.906.150,00 atau realisasi anggaran sangat rendah hanya sebesar 99,12%.

b.4. Sasaran 15

Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN diukur dengan Indeks Sistem Merit. Indikator indeks penilaian sistem merit adalah ukuran yang digunakan

sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah yang penilaiannya dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 15 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3. 42
Target dan Realisasi Sasaran 15*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	6. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (255,00)	Kategori III (273,00)	107,06	Kategori III 260,00	105,00

Sumber: BKPPD (capaian Tahun 2023)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator indeks merit sistem tercapai sebesar 107,06%. Capaian ini dikategorikan kinerja sangat tinggi. Nilai 273 merupakan hasil capaian tahun 2023, dikarenakan tahun 2024 tidak dilakukan penilaian. Nilai dimaksud ditetapkan dalam Keputusan KASN Nomor 42/KEP.KASN/C/VII/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Capaian sasaran 15 meningkatnya kualitas manajemen ASN didukung dengan program-program:

*Tabel 3. 43
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15*

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Kepegawaian Daerah	1.804.081.000	1.828.787.900	1.573.641.649	86,05
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.189.138.800	1.151.031.400	1.064.418.531	92,48
Jumlah		2.993.219.800	2.979.819.300	2.638.060.180	88,53

Program yang mendukung sasaran 15 sebanyak 2 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.638.060.180,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.979.819.300,00 dengan realisasi sebesar 94,49%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan **pencapaian sasaran 15** adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Pengorganisasian dan Perencanaan ASN:
Perencanaan berbasis analisis jabatan (ANJAB), analisis beban kerja (ABK), audit kepegawaian, serta penyesuaian arah kebijakan nasional menunjukkan pendekatan strategis yang terarah.
2. Pengadaan ASN:
Pelaksanaan penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan, dan non-diskriminatif mencerminkan implementasi prinsip keadilan dalam pengadaan pegawai.
3. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi:
Proses pengangkatan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada talenta terbaik memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ASN.
4. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi:
Promosi dan mutasi dilakukan secara adil dan konsisten, mendukung prinsip meritokrasi dalam pengembangan karier ASN.
5. Manajemen Kinerja Berkelanjutan:
Implementasi manajemen kinerja berkesinambungan mendorong pengawasan dan pencapaian kinerja secara efektif.
6. Pengembangan Kompetensi Pegawai:
Pelatihan 20 JP (Jam Pelajaran) per tahun bagi pegawai menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, sekaligus mengurangi kesenjangan kompetensi.
7. Penghargaan untuk Pegawai:
Penetapan kebijakan penghargaan finansial dan non-finansial memberikan motivasi tambahan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

8. Pelindungan dan Pelayanan kepada Pegawai:

Implementasi perlindungan dan pelayanan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pegawai.

9. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian:

Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian mendukung efisiensi administrasi dan pengelolaan data secara lebih akurat.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Implementasi yang Konsisten:

Meski banyak kebijakan dan proses telah diterapkan, keberhasilan penuh membutuhkan konsistensi dalam implementasi di semua unit kerja.

2. Kesenjangan Kompetensi:

Meski pelatihan telah dirancang, pencapaian target kompetensi masih menjadi tantangan karena adanya variasi latar belakang pegawai.

3. Evaluasi dan Monitoring Sistem:

Sistem informasi kepegawaian perlu terus dievaluasi agar dapat sepenuhnya mendukung kebutuhan organisasi dan fleksibel terhadap perubahan kebijakan.

4. Transparansi Lanjutan:

Walaupun proses pengadaan dan promosi telah transparan, masih diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak adanya penyimpangan.

5. Penghargaan yang Berkesinambungan:

Kebijakan penghargaan perlu disesuaikan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan dapat terus meningkatkan motivasi pegawai.

Kesimpulan:

Sistem merit di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan banyak keberhasilan yang mendukung tata kelola ASN yang profesional dan transparan. Namun, beberapa tantangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem merit.

5. Misi 5

Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

a. Tujuan 5

. Tujuan **meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan kerukunan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat**, ditetapkan dengan dua indikator tujuan yaitu persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan dan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum. Selengkapnya kinerja tujuan 5 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 44
Target dan Realisasi Tujuan 5

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	6. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,40	93,23	118,92	82,94	112,41
		7. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata capaian				109,46			106,21	

Sumber: Disporabudpar, Bakesbangpol, Satpol PP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja terealisasi sebesar 109,46%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Target persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan sebesar 78,40% dan terealisasi sebesar 93,23%,

sedangkan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum dari target 100,00% terealisasi sesuai target.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16

Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah.

Kualitas pemajuan kebudayaan diukur melalui rata-rata obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan kesenian tradisional yang dilestarikan. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari tujuan 5 indikator 9, sehingga pencapaian sasaran 16 (indikator 29) sama dengan tujuan 5 indikator 9. Target dan realisasi sasaran 16 disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 3. 45
Target dan Realisasi Sasaran 16*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	6. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,40	93,23	118,92	82,94	112,41

Sumber: Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 118,92%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan target 78,40% terhadap realisasi 93,23%. Kinerja sasaran 16 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 16 didukung dengan program-program:

*Tabel 3. 46
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16*

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	932.600.000	1.212.600.000	1.198.555.300	98,84
2.	Program Pengelolaan	700.000.000	700.000.000	619.814.050	88,54

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
	Permuseuman				
	Jumlah	1.632.600.000	1.912.600.000	1.818.369.350	95,07

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.818.369.350,00 dari anggaran Rp 1.912.600.000,00.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator sasaran 16 adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Capaian Kinerja yang Sangat Tinggi:

Pencapaian indikator sasaran sebesar 118,92% dengan kategori kinerja sangat tinggi menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam pemajuan kebudayaan.

2. Dasar Perencanaan yang Kuat:

Pemajuan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), memberikan landasan strategis yang terarah. Penyusunan *Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan* menjadi pedoman utama untuk integrasi kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang.

3. Pelaksanaan Program yang Berkelanjutan:

Pagelaran kesenian tradisional secara periodik menjaga keberlanjutan dan eksistensi warisan budaya lokal. Prosesi Hari Jadi Kabupaten Grobogan dilaksanakan sebagai agenda tahunan, menjadikannya ikon budaya yang memperkuat identitas daerah.

4. Komitmen Pemimpin dan Stakeholders:

Komitmen bersama dari pimpinan daerah dan para pemangku kepentingan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya lokal. Kebijakan ini mendukung pelestarian keragaman budaya nasional dengan tetap menghormati kearifan lokal.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Belum disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terukur untuk menilai dampak program pemajuan kebudayaan secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam program pemajuan kebudayaan masih menjadi tantangan untuk memastikan pelibatan yang lebih luas dan inklusif.

3. Pemanfaatan Teknologi:

Belum terlihat inovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendigitalisasi dan mendokumentasikan budaya lokal agar lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda.

4. Pembiayaan yang Berkelanjutan:

Keberlanjutan pembiayaan untuk pelestarian kebudayaan, terutama bagi program-program yang berbasis masyarakat, perlu dipastikan agar tidak hanya bergantung pada APBD.

5. Perluasan Dampak Kebudayaan dalam Pembangunan:

Kebudayaan belum sepenuhnya terlihat sebagai elemen strategis lintas sektor dalam pembangunan, seperti dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan telah berhasil membangun fondasi yang kuat dalam pemajuan kebudayaan, didukung dengan capaian kinerja yang sangat tinggi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas, diperlukan perhatian pada aspek monitoring, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, pembiayaan, dan integrasi lintas sektor.

b.2. Sasaran 17

Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum

Penanganan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum diukur dengan dua indikator sasaran yaitu toleransi antar umat

beragama dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani. Target dan realisasi sasaran 17 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 47
Target dan Realisasi Sasaran 17

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	6. Persentase toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
		7. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian						100,00	100,00	

Sumber: Bakesbangpol dan Satpol PP

Pencapaian kinerja sasaran 17 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%, sehingga tercapai dan termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 17 yaitu tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum didukung dengan program-program:

Tabel 3. 48
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	780.853.600	780.853.600	767.857.438	98,34
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	631.000.000	635.000.000	630.966.100	99,36
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.225.422.500	2.445.880.800	2.428.552.660	99,29
4.	Program Pemberdayaan dan	40.200.200.000	40.250.200.000	40.237.129.200	99,97

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Penetapan	Perubahan		
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	60.000.000	60.000.000	57.870.000	96,45
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	469.000.000	469.000.000	447.990.400	95,52
7.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.679.449.200	9.597.255.490	9.447.722.730	98,44
8.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.886.100	61.046.100	57.510.100	94,21
Jumlah		54.112.811.400	54.299.235.990	54.075.598.628	99,59

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 17 sebesar Rp 54.075.598.628,00 dari anggaran yang disediakan perubahan sebesar Rp 54.299.235.990,00, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 99,59%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 17 adalah sebagai berikut:

a. Persentase toleransi antar umat beragama

Keberhasilan

1) Capaian Kinerja yang Optimal:

Pencapaian indikator persentase toleransi antar umat beragama sebesar 100,00% menunjukkan bahwa target ini telah tercapai sepenuhnya.

2) Sosialisasi yang Efektif:

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara konsisten telah membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama.

3) Kegiatan Keagamaan yang Berkelanjutan:

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara rutin telah menjadi wadah interaksi positif antar kelompok masyarakat, memperkuat rasa saling menghormati.

4) Aktivitas BAMAG dan FKUB yang Aktif:

Peran Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang aktif menjadi kunci dalam menjaga komunikasi dan hubungan baik antar komunitas agama.

5) Dukungan Pemerintah Daerah:

Komitmen pemerintah dalam mendukung program toleransi berkontribusi pada stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Grobogan.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

Belum disebutkan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitas jangka panjang dari program toleransi.

2) Partisipasi Masyarakat yang Lebih Luas:

Meski capaian tinggi, tantangan masih ada untuk melibatkan lebih banyak komunitas, terutama kelompok marginal, dalam kegiatan toleransi.

3) Pencegahan Konflik Potensial:

Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik antar umat beragama melalui pendekatan yang lebih proaktif.

4) Inovasi dalam Pendekatan Program:

Pendekatan program toleransi masih bisa lebih inovatif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi atau platform digital untuk memperluas jangkauan.

5) Peningkatan Kesadaran Generasi Muda:

Pelibatan generasi muda sebagai agen toleransi perlu ditingkatkan, misalnya melalui kegiatan edukatif atau kampanye kreatif.

Kesimpulan:

Kabupaten Grobogan telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menjaga persentase toleransi antar umat beragama. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan dampaknya, diperlukan fokus pada inovasi program, partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan penguatan monitoring serta evaluasi.

b. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani

Faktor Keberhasilan:

1) Capaian Kinerja Optimal:

Indikator persentase gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani tercapai dengan baik (100,00%), mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan penanganan gangguan ketertiban umum.

2) Peningkatan Karakter Kebangsaan:

Pendidikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi agenda penting dalam mendidik generasi muda berhasil menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi, mendukung situasi kondusif di masyarakat.

3) Penegakan Peraturan Daerah (Perda):

Penegakan Perda berjalan secara efektif melalui patroli rutin, yang mampu meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Penguatan Satlinmas hingga Tingkat Kecamatan:

Pembentukan, pelatihan, dan pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) hingga tingkat kecamatan memberikan cakupan luas serta kecepatan respons dalam menangani gangguan Trantibum Linmas.

Ketersediaan sarana dan personel yang memadai meningkatkan kemampuan operasional Satlinmas.

Faktor Penghambat/kendala/tantangan:

1) Monitoring dan Evaluasi Program:

Belum disebutkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan keberlanjutan efektivitas program penanganan gangguan Trantibum Linmas.

2) Koordinasi Antar Stakeholders:

Tantangan dalam koordinasi lintas instansi, terutama dalam penegakan Perda yang mungkin memerlukan keterlibatan lebih dari satu pihak, seperti Satpol PP dan institusi hukum lainnya.

3) Pemanfaatan Teknologi:

Belum terlihat inisiatif untuk memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang mendukung pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban umum.

4) Partisipasi Masyarakat:

Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pendekatan berbasis komunitas atau program pemberdayaan lokal.

5) Perhatian terhadap Wilayah Khusus:

Wilayah-wilayah dengan potensi gangguan Trantibum yang lebih tinggi mungkin membutuhkan pendekatan khusus, seperti pemetaan risiko gangguan dan alokasi sumber daya yang lebih besar.

Kesimpulan:

Dengan capaian 100,00%, Kabupaten Grobogan telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam penanganan gangguan Trantibum Linmas. Namun, peningkatan pada aspek monitoring, teknologi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini di masa mendatang.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan persentase capaian kinerja atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika target kinerja tercapai atau capaian kinerja sebesar $\geq 100\%$, dan persentase capaian atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran lebih besar dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika target kinerja tidak tercapai atau persentase capaian atau rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%.

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 49

Analisis Efisiensi pada Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
MISI I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing										
I	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	100	100,02	100,02%	463.117.690.075	454.203.171.353	98,08%	1,98%	9.007.520.033	Efisien
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	100	102,34	102,34%	308.851.758.068	304.113.179.655	98,47%	3,94%	11.974.447.344	Efisien
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100	100,13	100,13%	139.381.801.807	135.375.312.544	97,13%	3,10%	4.191.985.406	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100	100,00	100,00%	14.884.130.200	14.714.679.154	98,86%	1,15%	169.451.046	Efisien
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana										
II	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	100	110,34	110,34%	198.716.585.119	193.095.177.448	97,17%	13,55%	26.169.112.210	Efisien
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100	105,51	105,51%	175.527.132.619	170.309.708.096	97,03%	8,75%	14.893.796.958	Efisien
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	100	105,21	105,21%	11.300.592.100	11.095.114.087	98,18%	7,16%	794.718.378	Efisien
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	100	127,94	127,94%	11.888.860.400	11.690.355.265	98,33%	30,11%	3.520.392.600	Efisien
Misi III: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing										
III	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	100	100,34	100,34%	109.459.640.931	107.324.052.639	98,05%	2,33%	2.504.538.333	Efisien
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	100	441,73	441,73%	74.158.034.748	72.784.532.661	98,15%	350,07%	254.794.532.815	Efisien
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	100	303,73	303,73%	813.443.000	721.881.950	88,74%	242,25%	1.748.747.899	Efisien
9	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	100	107,14	107,14%	14.135.398.300	13.827.977.463	97,83%	9,52%	1.317.092.144	Efisien
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100,00	100,00%	8.955.455.000	8.936.547.550	99,79%	0,21%	18.907.450	Efisien
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	100	123,10	123,10%	11.397.309.883	11.053.113.015	96,98%	26,93%	2.976.432.722	Efisien
Misi IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										

No	Tujuan/ Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	115,99	115,99%	2.195.877.086.264	2.109.316.321.790	96,06%	20,75%	437.591.819.813	Efisien
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	100	104,38	104,38%	1.699.456.747.564	1.617.644.340.392	95,19%	9,65%	156.177.309.897	Efisien
13	Meningkatnya penerapan <i>e- government</i> yang terintegrasi	100	108,18	108,18%	4.334.613.250	4.247.695.682	97,99%	10,40%	441.567.743	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	100	100,14	100,14%	489.105.906.150	484.786.225.536	99,12%	1,04%	5.020.015.604	Efisien
15	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	100	107,06	107,06%	2.979.819.300	2.638.060.180	88,53%	20,93%	552.099.306	Efisien
Misi V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat										
V	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	100	109,46	109,46%	56.211.835.990	55.893.967.978	99,43%	10,08%	5.634.331.837	Efisien
16	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	100	118,92	118,92%	1.912.600.000	1.818.369.350	95,07%	25,08%	456.014.553	Efisien
17	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100	100,00	100,00%	54.299.235.990	54.075.598.628	99,59%	0,41%	223.637.362	Efisien
Rata-rata tingkat efisiensi level tujuan (5 tujuan)								9,74%		
Rata-rata tingkat efisiensi level sasaran (17 sasaran)								44,16%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efisiensi dilevel tujuan sebesar 9,74% yang meliputi di tujuan 1 sebesar 1,98%, tujuan 2 sebesar 13,55%, tujuan 3 sebesar 2,33%, tujuan 4 sebesar 20,75% dan tujuan 4 sebesar 10,08. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi dilevel sasaran sebesar 44,16%. Metode pengukuran tingkat efisiensi tidak hanya mengukur persentase realisasi anggaran, tetapi juga persentase capaian kinerja. Apabila semakin tinggi persentase capaian kinerjanya, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya

Tabel 3. 50

Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%	Sisa	
		Penetapan	Perubahan			Capaian	%
1.	Program Misi 1	432.232.692.500	463.117.690.075	454.203.171.353	98,08	8.914.518.722	1,92
2.	Program Misi 2	171.394.757.969	198.716.585.119	193.095.177.448	97,17	5.621.407.671	2,83
3.	Program Misi 3	90.538.428.331	109.459.640.931	107.324.052.639	98,05	2.135.588.292	1,95
4.	Program Misi 4	2.054.738.226.800	2.195.877.086.264	2.109.316.321.790	96,06	86.560.764.474	3,94
5.	Program Misi 5	55.745.411.400	56.211.835.990	55.893.967.978	99,43	317.868.012	0,57
Jumlah		2.804.649.517.000	3.023.382.838.379	2.919.832.691.208	96,58	103.550.147.171	3,42

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa anggaran tahun 2024 penetapan sebesar Rp. 2.804.649.517.000,00,. Setelah Perubahan menjadi Rp. 3.023.382.838.379,00 atau bertambah Rp. 218.733.321.379,00), dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.919.832.691.208,00 (96,58%), sehingga sisa anggaran sebesar Rp 103.550.147.171,00 (3,42%).

E. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia Nomor B/251/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **65,93** atau predikat **B**. Hasil evaluasi tersebut menetapkan 11 (sebelas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan yang sudah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

9. Mengunggah dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja tahun berjalan milik seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id

Tindak lanjut rekomendasi ke-1:

Memastikan semua dokumen SAKIP diunggah di esr.mepnpan.go.id, salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan menyusun Surat Edaran terkait jadwal penyusunan dan pengunggahan di esr.menpan.go.id dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah

dan melakukan pemantauan secara periodik di esr.menpan.go.id. Adapun data dukung pada tautan https://bit.ly/Rekom1_2025.

10. Melakukan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemda dan Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal berada pada level pengampu kinerja yang tepat.
11. Melakukan revidi terhadap dokumen perencanaan agar seluruh indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant and time-bound*) dan cukup.
12. Memperbaiki kualitas pohon kinerja/*logical framework* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu mengidentifikasi *critical success factor* yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam mewujudkan kinerja utama. Kemudian, pohon kinerja dimanfaatkan menjadi dasar perumusan cascading kinerja hingga ke individu.
13. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Tindak lanjut rekomendasi ke-2, Ke-3, ke-4 dan ke-5:

Pada rekomendasi ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, upaya yang sudah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revidi dan pendampingan dalam perbaikan dokumen penjenjangan kinerja/pohon kinerja, sekaligus melakukan pemetaan *crosscutting*, yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan indikator kinerja SMART-C, sebagai bahan dalam penyusunan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemda dan Perangkat Daerah untuk periode berikutnya. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pendampingan desk penyusunan dokumen penjenjangan kinerja level perangkat daerah, yang dilakukan oleh Bappeda Kab. Grobogan pada tanggal 6-7 Desember 2024, yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Smart ID malang dan Akademisi Universitas Diponegoro Semarang.

2. Penguatan SAKIP dan dilanjutkan dengan desk penyusunan Penjenjangan Kinerja Level Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda pada tanggal 16-17 Desember 2024, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan Desk sebelumnya yang dilakukan oleh Bappeda.
3. Internalisasi dimasing-masing perangkat daerah dalam penyusunan penjenjangan kinerja level perangkat daerah.

Gambar 3. 1
Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah tanggal 6-7 Desember 2024.



Gambar 3. 2
Kegiatan Penguatan SAKIP Kinerja Perangkat Daerah tanggal 16-17 Desember 2024.



*Gambar 3. 3
Kegiatan Desk Penyusunan Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah
tanggal 16-17 Desember 2024*



14. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala dengan melengkapi setiap capaian kinerja dengan analisis yang memadai pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi.
15. Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, perlu upaya peningkatan pemahaman penyusunan laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menyajikan Laporan Kinerja yang dapat menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan serta memberikan umpan balik dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan kualitas antara laporan kinerja pada tingkat Pemda dan tingkat Perangkat Daerah.
16. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang.

Tindak lanjut rekomendasi ke-6, ke-7 dan ke-8:

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ke-6, ke-7 dan ke-8, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan diantaranya telah melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada

Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025, dengan narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan reviu dan evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan penekanan agar pengukuran kinerja berkala dilengkapi dengan analisis yang memadai pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi. Penekanan yang lain kepada Perangkat daerah agar memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang.

Selain itu, sebagai upaya perbaikan penyusunan Laporan Kinerja, telah disediakan *template* laporan kinerja perangkat daerah dalam memudahkan perangkat daerah menyusun laporan kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

*Gambar 3. 4
Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja bagi Perangkat Daerah*



Sedangkan untuk rekomendasi yang lain masih dalam proses tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Silakip untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala, memberikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah, dan melakukan follow up atas saran dan rekomendasi yang telah diberikan

Tindak lanjut:

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam proses pembaharuan aplikasi SILAKIP untuk mempermudah dalam penggunaan oleh Perangkat Daerah, diantaranya dengan menambah fitur saran dan rekomendasi atas capaian kinerja Perangkat Daerah, fitur evaluasi internal, fitur pengumpulan dan pengukuran kinerja dan pemeringkatan penilaian kinerja perangkat daerah.

5. Inspektorat selaku *quality assurance* dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat memberikan catatan dan rekomendasi yang mendalam, sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah.

Tindak Lanjut:

Meningkatkan kualitas rekomendasi berdasarkan akar permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Upaya yang akan dilakukan diantaranya akan melakukan bimbingan teknis kepada Tim Evaluator AKIP Kabupaten yang terdiri dari unsur Inspektorat, Bappeda, BPPKAD dan Setda.

6. Perangkat Daerah agar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal sebagai dasar perbaikan SAKIP yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut:

Memastikan seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya yang akan dilakukan dengan

penugasan kepada Tim Evaluator untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mendatangi kantor Perangkat Daerah secara langsung atau menghadirkan di kantor Tim Evaluator.

F. Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:

1. Predikat Kualitas Tertinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh OMBUDSMAN RI.
2. Predikat SANGAT BAIK, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Penganugerahan *Innovative Government Award* Sebagai Kabupaten Paling Inovatif Tahun 2024.
4. Penghargaan WTP 9 tahun berturut-turut dari BPK RI.
5. Predikat Kabupaten Terbaik se Jawa Tengah dalam ajang Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
6. Penghargaan *Universal Health Coverage (UHC)* kategori Pratama dalam memberikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduknya.
7. Penghargaan Paramesti dari Kementerian Kesehatan sebagai Kabupaten yang berhasil melakukan Pencegahan dan Penanganan Penyakit tidak menular.
8. Memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Panen Padi oleh pemetik terbanyak menggunakan Ani-ani (alat tradisional pemetik padi).
9. Penghargaan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam penganugerahan Radar Award Kudus Tahun 2024.
10. Predikat BAIK dalam Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tingkat Nasional.
11. Kategori SANGAT BAIK dalam Penilaian Kinerja PTSP dan Penilaian Kinerja Percepatan Perizinan Berusaha (PPB) Tingkat Nasional.

12. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Internasional.
13. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Penghargaan Perlindungan Konsumen untuk Kategori Pasar Tertib Ukur Tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan.
15. Penghargaan Adipura Tahun 2024 Kategori Kabupaten yang Berhasil Menjaga Kebersihan serta Pengelolaan Lingkungan Perkotaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Penghargaan Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Prosentase Terbanyak dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
17. Penghargaan Adiwiyata Nasional Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
18. Juara I Kompetisi Video Pemantauan SP2KP Tingkat Nasional.
19. Penghargaan “Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya” diberikan kepada Bupati Grobogan atas prestasi di Bidang Pertanian,
20. Penghargaan “Adhi Karya Pembangunan Pertanian” diberikan kepada Bupati Grobogan.
21. Juara II Kategori Liberika/Ekselsa pada Kontes Kopi Spesial Indonesia diberikan kepada “Kabul Narimo” Petani Kopi Kab.Grobogan.
22. Juara I Evaluasi Kinerja Petugas Inseminator Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
23. Juara III Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Komoditas Sapi Potong
24. Penganugerahan Penghargaan Prasidatama Dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
25. Penghargaan TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah.
26. Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2023 dari KASN.
27. Penghargaan Top 5 Anugerah Pelayanan Publik 2023 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB yaitu atas Inovasi Rumah Kedelai Grobogan (RKG) milik Dinas Pertanian.

G. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya “*one agency one inovation*” bagi perangkat daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan, diantaranya:

4. **GROBOG BERJUKIR** (Grobogan Bebas Juru Parkir Liar)

adalah inovasi dalam rangka mendukung pelayanan perparkiran di Kabupaten Grobogan berbasis digital yang berisi fitur pemetaan titik parker, digitalisasi pengajuan permohonan titik parker sebagai bagian dari upaya meminimalisir juru parker liar yang ada di Kabupaten Grobogan. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perparkiran di Kabupaten Grobogan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memudahkan data dan informasi tentang perparkiran khususnya dalam pengajuan titik.

5. **DIK VICA** (Daftarkan Identitas Kependudukan Digital Via Video Call)

adalah inovasi layanan dari Dispendukcapil Kabupaten Grobogan berupa sebuah layanan dimana penduduk dapat melakukan video call melalui nomor admin IKD untuk mendapatkan QR Code yang digunakan untuk proses registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya DIK VICA sangat membantu penduduk yang akan melakukan registrasi IKD tanpa harus datang ke tempat-tempat layanan adminduk yang ada di Dinas, Kecamatan maupun Mall Pelayanan Publik.

6. **TANAM TUAI DARI BPP GODONG**

merupakan inovasi dengan memadukan semua sumber daya dari proses penyuluhan melalui klinik agribisnis, pembentukan kelompok tani mitra, Kerjasama Lembaga pembiayaan/perbankan, Kerjasama dengan pengelola Alsintan (UPJA), Kerjasama dengan perusahaan mitra Maxxi Tani Teknologi untuk alat mesin yang belum tersedia di petani, Kerjasama dengan mitra pasca panen.

7. **BECAK PINTAR** (Begitu Diket, KTP/KIA Diantar)

adalah inovasi pengantaran dokumen KTP-el dan KIA ke rumah pemohon melalui jasa ekspedisi. Pembayaran jasa pengiriman dilakukan menggunakan sistem COD yang dibayarkan pemohon ketika KTP-el dan KIA telah sampai ke alamat pemohon.

8. **MENCARI KEKASIHKU** (Menikah atau Cerai , KK Dan KTP Seketika Itu Kumiliki)

adalah inovasi terkait penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.

9. **BERAMAL** (Berikan Akta Kematian dan Akta Kelahiran)

Inovasi Beramal digagas dan diterapkan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk pendaftaran dan pengambilan Akta Kematian atau Akta Kelahiran dilakukan di Kantor Desa/ Kelurahan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran serta validitas data dan dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan sampai ke tingkat Desa sehingga prosesnya lebih dekat, mudah dan cepat, dampaknya dengan memiliki dokumen kependudukan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi publik lainnya sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, orang tua dan masyarakat dipedesaan serta menghapus praktek calo dan pungutan liar.

10. **RAT Hunter** (Pemburu Tikus)”

Yaitu inovasi pengendalian hama tikus dengan memanfaatkan predator alami burung hantu spesies *Tyto Alba Javanica* sebagai pemburu tikus.

11. **Lumbung Pangan Reborn**

Lumbung pangan masyarakat merupakan bentuk pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif yang telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Selama ini Lumbung pangan hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana akibat serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya membangkitkan Keberadaan lumbung pangan masyarakat dengan mengembangkan

fungsinya selain sebagai tempat cadangan pangan. Dengan inovasi Lumbung Pangan Reborn, lumbung pangan kini juga memiliki fungsi sebagai unit Pengumpul Zakat Pertanian, unit usaha dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki produk yang telah teregistrasi, dan menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang di desa

12. Pengelolaan Pasca Panen Komoditas Pertanian Melalui “Sistem Resi Gudang “ Kabupaten Grobogan

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (UU No. 9, 2011). Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (*Document of Title*) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. Sistem Resi Gudang Kab. Grobogan adalah suatu badan hukum akan melakukan serangkaian kegiatan meliputi: pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan system dan jaringan informasi Pusat Registrasi Resi Gudang.

13. GROBAG DUPARK (Grobogan Agro Edu Park)

yaitu, mewujudkan tempat pembelajaran bagi petani dalam membudidayakan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Grobogan masih rendah. Dengan adanya Grobogan Agro Edu Park ini diharapkan petani dapat belajar dan melihat langsung budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang jarang dijumpai di wilayah Kabupaten Grobogan, Keunikan dari Grobogan Agro Edu Park adalah jenis tanaman yang dibudidaya dilahan. Jenis tanaman tersebut adalah kurma, vanili, salak, alpukat dan anggur. Sehingga dalam satu lokasi petani dapat belajar budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi lebih dari satu tanaman. Ini merupakan suatu nilai tambah tersendiri dibandingkan dengan wisata agro lainnya yang biasanya hanya menanam satu komoditas saja.

14. HACKING KEDELAI

yaitu, untuk mendukung peningkatan produksi, mutu dan distribusi kedelai baik benih maupun kedelai konsumsi dari Kabupaten Grobogan ke seluruh negeri. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan petani dan memberikan pemahaman yang benar mengenai modifikasi teknik budidaya yang optimal, dinamis dan fleksibel sesuai kearifan local petani serta mendukung upaya pengembangan dan penyediaan kedelai secara kontinyu menuju swasembada kedelai sehingga mewujudkan jaringan benih antar lokasi dan musim (Jabalsim) secara in situ atau dalam Kabupaten.

15. PELARI BANGKOM (Pelaporan Mandiri Pengembangan Kompetensi)

yaitu, terpantau dan terlapornya setiap pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh setiap PNS di Kabupaten Grobogan, baik itu pelatihan, seminar, konferensi, sarasehan, sosialisasi, workshop, lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis, magang, coaching, mentoring.

16. PENA BANGKOM (Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi)

yaitu, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan pengembangan kompetensi ASN di kabupaten Grobogan sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi/ unit kerja.

17. LARI KESANA (Layanan Restorasi dan Evakuasi Arsip Bencana)

merupakan dukungan layanan perbaikan arsip secara kolaborasi melalui layanan “SIAGA” Enkapsulasi Arsip Keluarga Digitalisasi Arsip Keluarga, Digitalisasi melalui SIAD (Sistem Informasi Arsip Digital), serta layanan “SiCesa Restorasi arsip Buku C desa dan Peta Desa.

18. LAPBAN (Layanan Pengaduan bagi Pelanggan)

merupakan inovasi yang bertujuan memberikan kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat khususnya pelanggan dalam mendapatkan informasi. Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah mempercepat pelanggan dalam menyampaikan pengaduannya

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%)**.
- b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**, dengan rata-rata capaian kinerja **107,23%**.
- c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**, dengan rata-rata capaian kinerja **106,66**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 99,36%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 87,43%, dan Angka Kemiskinan sebesar 92,47%.
- d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (87,43%).

Tabel 4. 1
Capaian Kinerja di level Tujuan Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.				100,03	Tercapai	Sangat Tinggi
1	Indeks Pembanguana Manusia (IPM)	Indeks	71,53	72,02	100,69	Tercapai	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,28 *)	99,36	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.				110,34	Tercapai	Sangat Tinggi
3	Tingkat Pembangunan	%	80.68	82.97	102.84	Tercapai	Sangat

No	Tujuan/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
	Infrastruktur Daerah						Tinggi
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,16	69,21	87,43	Tidak Tercapai	Tinggi
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (145,00)	Sedang (95,91)	140,75	Tercapai	Sangat Tinggi
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah				100,34	Tercapai	Sangat Tinggi
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	5,41	108,20	Tercapai	Sangat Tinggi
7	Angka Kemiskinan	%	10,03–10,63	11,43	92,47	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas				115,99	Tercapai	Sangat Tinggi
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	BB (71,00)	A (82,35)	115,99	Tercapai	Sangat Tinggi
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat				109,46	Tercapai	Sangat Tinggi
9	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,4	93,23	118,92	Tercapai	Sangat Tinggi
10	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan					107,23	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Per Indikator Tujuan					106,66	Tercapai	Sangat Tinggi
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2023 dan tren kenaikan 3 (tiga) tahun terakhir							

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, semuanya 17 (tujuh belas) sasaran **TERCAPAI (100%)**, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **138,56%**.
- Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator **TERCAPAI (87%)** dan sebanyak 4 (empat) indikator **TIDAK TERCAPAI (13%)**. Empat indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik (91,69%), Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

terhadap rencana tata ruang (99,42%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (99,43%), dan Nilai SAKIP (94,05%).

- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, semuanya berkinerja **SANGAT TINGGI (100%)**, dengan **rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran sebesar 155,48%**.

Tabel 4. 2
Capaian Kinerja di level Sasaran Perjanjian Kinerja
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran/ Indikator		Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing								
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan					102,34	Tercapai	Sangat Tinggi
	1	Harapan Lama Sekolah	%	12,34	12,48	101,13	Tercapai	Sangat Tinggi
	2	Rata-rata lama Sekolah	%	7,04	7,29	103,55	Tercapai	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					100,13	Tercapai	Sangat Tinggi
	3	Usia Harapan hidup	%	75,14	75,24	100,13	Tercapai	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak					100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	4	Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Madya (0,6375–0,7724)	Madya	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana								
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah					105,52	Tercapai	Sangat Tinggi
	5	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	87,22	79,97	91,69	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,34	91,8	99,42	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	7	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,06	77,137	101,40	Tercapai	Sangat Tinggi
	8	Kinerja Lalu Lintas (VIC ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,31)	129,55	Tercapai	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3					105,22	Tercapai	Sangat Tinggi
	9	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,05	52,58	103,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,15	90,8	104,19	Tercapai	Sangat Tinggi

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
			Target	Realisasi	%		
11	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	58,16	57,83	99,43	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	46	52,55	114,24	Tercapai	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana				127,94	Tercapai	Sangat Tinggi
13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,68	0,87	127,94	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan III: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing							
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah				441,73	Tercapai	Sangat Tinggi
14	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	3,31	269,11	Tercapai	Sangat Tinggi
15	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,5	4,72	944,00	Tercapai	Sangat Tinggi
16	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,59	5,55	349,06	Tercapai	Sangat Tinggi
17	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	3,01	204,76	Tercapai	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional				303,73	Tercapai	Sangat Tinggi
18	Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	870,456	2.643,83	303,73	Tercapai	Sangat Tinggi
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa				107,14	Tercapai	Sangat Tinggi
19	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7	0,75	107,14	Tercapai	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial				100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
20	Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,4	1,4	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja				123,10	Tercapai	Sangat Tinggi
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,2	3,23	123,10	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni				104,38	Tercapai	Sangat Tinggi
22	Rata-rata nilai IKM	Kategori/ Nilai	B (77,70)	B (84,50)	108,75	Tercapai	Sangat Tinggi
23	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (65,48)	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya penerapan e- government yang terintegrasi				108,18	Tercapai	Sangat Tinggi

No		Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun 2024			Kategori Ketercapaian	Kategori Kinerja
				Target	Realisasi	%		
	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,3	3,57	108,18	Tercapai	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan					100,14	Tercapai	Sangat Tinggi
	25	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (70,01)	B (65,93)	94,05	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi
	26	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,139)	106,38	Tercapai	Sangat Tinggi
	27	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN					107,06	Tercapai	Sangat Tinggi
	28	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (273 *)	107,06	Tercapai	Sangat Tinggi
Tujuan V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat								
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah					118,92	Tercapai	Sangat Tinggi
	29	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,4	93,23	118,92	Tercapai	Sangat Tinggi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum					100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	30	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
	31	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	100,00	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja sasaran						138,56	Tercapai	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran						155,48	Tercapai	Sangat Tinggi
*) adalah hasil proyeksi berdasarkan capaian tahun 2023								

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

- Tingkat Efisiensi dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**, dengan **tingkat efisiensi sebesar 11,03% atau senilai Rp.322.087.371.420,-** (tiga ratus dua puluh dua milyar, delapan puluh tujuh juta, tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, semua indikator sasaran **EFISIEN**, dengan **tingkat efisiensi sebesar 43,47%.**

Efisiensi Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3

Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tujuan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	Tujuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
I	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	100	100,02	100,02%	463.117.690.075	454.203.171.353	98,08%	1,98%	9.007.520.033	Efisien
II	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	100	110,34	110,34%	198.716.585.119	193.095.177.448	97,17%	13,55%	26.169.112.210	Efisien
III	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	100	100,34	100,34%	109.459.640.931	107.324.052.639	98,05%	2,33%	2.504.538.333	Efisien
IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	115,99	115,99%	2.195.877.086.264	2.109.316.321.790	96,06%	20,75%	437.591.819.813	Efisien
V	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	100	109,46	109,46%	56.211.835.990	55.893.967.978	99,43%	10,08%	5.634.331.837	Efisien
EFISIENSI TUJUAN		100	107	107,23%	3.023.382.838.379	2.919.832.691.208	96,58%	11,03%	322.087.371.420	Efisien

Tabel 4. 4
Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Jumlah Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian			
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	100	102,34	102,34%	308.851.758.068	304.113.179.655	98,47%	3,94%	11.974.447.344	Efisien
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100	100,13	100,13%	139.381.801.807	135.375.312.544	97,13%	3,10%	4.191.985.406	Efisien
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100	100,00	100,00%	14.884.130.200	14.714.679.154	98,86%	1,15%	169.451.046	Efisien
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100	105,51	105,51%	175.527.132.619	170.309.708.096	97,03%	8,75%	14.893.796.958	Efisien
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	100	105,21	105,21%	11.300.592.100	11.095.114.087	98,18%	7,16%	794.718.378	Efisien
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	100	127,94	127,94%	11.888.860.400	11.690.355.265	98,33%	30,11%	3.520.392.600	Efisien
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	100	441,73	441,73%	74.158.034.748	72.784.532.661	98,15%	350,07%	254.794.532.815	Efisien
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	100	303,73	303,73%	813.443.000	721.881.950	88,74%	242,25%	1.748.747.899	Efisien
9	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	100	107,14	107,14%	14.135.398.300	13.827.977.463	97,83%	9,52%	1.317.092.144	Efisien
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100,00	100,00%	8.955.455.000	8.936.547.550	99,79%	0,21%	18.907.450	Efisien
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	100	123,10	123,10%	11.397.309.883	11.053.113.015	96,98%	26,93%	2.976.432.722	Efisien

12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	100	104,38	104,38%	1.699.456.747.564	1.617.644.340.392	95,19%	9,65%	156.177.309.897	Efisien
13	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	100	108,18	108,18%	4.334.613.250	4.247.695.682	97,99%	10,40%	441.567.743	Efisien
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	100	100,14	100,14%	489.105.906.150	484.786.225.536	99,12%	1,04%	5.020.015.604	Efisien
15	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	100	107,06	107,06%	2.979.819.300	2.638.060.180	88,53%	20,93%	552.099.306	Efisien
16	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	100	118,92	118,92%	1.912.600.000	1.818.369.350	95,07%	25,08%	456.014.553	Efisien
17	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100	100,00	100,00%	54.299.235.990	54.075.598.628	99,59%	0,41%	223.637.362	Efisien
EFISIENSI SASARAN		100	138,56	138,56%	3.023.382.838.379	2.919.832.691.208	96,58%	43,47%	1.269.355.348.171	Efisien



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2024



PEMERINTAH

KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI GROBOGAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 11 Januari 2024

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, [Pos-el setda@grobogan.go.id](mailto:Pos-el_setda@grobogan.go.id)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target 2024
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,49	71,53
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,18^{*)}	86,84
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1). Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,46	12,34
		2). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,28	7,04
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3). Usia Harapan Hidup	Tahun	75,04	75,14
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	4). Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya ^{*)}	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	86,07^{*)}	80,68
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	69,43^{*)}	79,16
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang^{*)} (111,59)	Sedang (145,00)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5). Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	86,12 ^{*)}	87,22
		6). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	96,12 ^{*)}	92,34

7). Persentase pemenuhan air minum.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target 2024
		7). Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	75,93 ^{*)}	76,07
		8). Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,27) ^{*)}	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9). Indeks kualitas air	Indeks	60,26 ^{*)}	80,10
		10). Indeks kualitas udara	Indeks	86,56 ^{*)}	87,15
		11). Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	53,09 ^{*)}	62,75
		12). Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	48,09 ^{*)}	46,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13). Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,81 ^{*)}	0,68
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
II.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,98^{*)}	5±1
		7. Angka Kemiskinan	Persen	11,72	10,03–10,63
	7. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	14). Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	2,25 ^{*)}	1,23
		15). Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	3,77 ^{*)}	0,50

16). Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target 2024
		16). Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	5,50 ^{*)}	1,59
		17). Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen /tahun	6,39 ^{*)}	1,47
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18). Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	8.658,007 ^{*)}	870,467
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19). Indeks desa membangun	Indeks	0,73	0,70
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20). Persentase penurunan PPKS	Persen	1,35 ^{*)}	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21). Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,02	4,20
Misi Keempat:Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B^{*)} (66,25)	BB (71,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22). Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (83,13)	B (77,70)
		23). Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (63,85)	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e- <i>government</i> yang terintegrasi	24). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,37 (Baik)	3,30

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target 2024
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25). Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (64,25)	BB (70,10)
		26). Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,201)	Level 3 (3,120)
		27). Opini BPK	Opini	WTP ^{*)}	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28). Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (273)	Kategori III (255)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	8. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	80,00 ^{*)}	78,40
		9. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00 ^{*)}	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	29). Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	80,00 ^{*)}	78,40
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30). Persentase Toleransi antar umat beragama	Persen	100,00 ^{*)}	100,00
		31). Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00 ^{*)}	100,00

Keterangan:

^{*)} Realisasi tahun 2022

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
			2023		2024	
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp	468.992.389.547	Rp	432.232.692.500	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	270.286.692.453	Rp	274.272.018.000	
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	205.814.000	Rp	130.000.000	
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	645.000.000	Rp	335.464.500	
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	156.536.862.608	Rp	120.310.561.815	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	555.777.386	Rp	559.600.000	
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	333.183.500	Rp	885.905.785	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	3.678.239.100	Rp	715.050.000	
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	-	Rp	430.000.000	
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	18.668.920.000	Rp	16.927.000.000	
10.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	-	Rp	1.300.000.000	
11.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	1.482.139.850	Rp	514.404.200	
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	6.242.186.250	Rp	5.673.352.100	
13. Program Pemberdayaan dan						

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024		
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	7.776.540.000	Rp	7.678.792.000	
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	90.000.000	Rp	30.000.000	
15.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.457.470.350	Rp	1.434.760.000	
16.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	64.998.950	Rp	60.000.000	
17.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	79.999.450	Rp	70.000.000	
18.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	462.015.050	Rp	540.917.600	
19.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	10.361.250	Rp	-	
20.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	225.000.050	Rp	60.000.000	
21.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	24.999.850	Rp	37.000.000	
22.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	166.189.450	Rp	267.866.500	
Program Pembangunan Misi Kedua		Rp	213.915.478.604	Rp	171.394.757.969	
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	56.823.806.024	Rp	35.112.173.780	
24. Program Pengelolaan						

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.308.741.000	Rp	6.601.390.000	
25. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.205.250.000	Rp	-	
26. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	9.896.439.000	Rp	12.479.788.368	
27. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	3.546.842.860	Rp	6.549.910.710	
28. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	294.900.000	Rp	476.000.000	
29. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	78.957.858.620	Rp	71.603.853.660	
30. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	426.030.000	Rp	198.247.000	
31. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.013.550.000	Rp	805.338.000	
32. Program Penatagunaan Tanah	Rp	-	Rp	1.500.000.000	
33. Program Pengembangan Perumahan	Rp	25.000.000	Rp	30.000.000	
34. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	6.610.000.000	Rp	6.445.000.000	

35. Program Peningkatan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
35. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	15.846.239.000	Rp	8.616.540.450	
36. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	2.703.604.340	Rp	2.505.592.801	
37. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	350.000.000	Rp	200.000.000	
38. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	404.999.650	Rp	760.000.000	
39. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.500.000.000	Rp	1.880.000.000	
40. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	
41. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	790.000.000	Rp	40.000.000	
42. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	615.450.000	Rp	6.240.000.000	

43. Program Penanganan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2023		2024	
43.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	85.000.000	Rp	20.000.000	
44.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.037.736.000	Rp	50.000.000	
45.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	14.318.438.110	Rp	6.994.303.200	
46.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.080.594.000	Rp	2.211.620.000	
Program Pembangunan Misi Ketiga		Rp	99.223.112.068	Rp	90.538.428.331	
47.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	271.343.400	Rp	95.400.000	
48.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	874.679.600	Rp	1.200.010.300	
49.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	874.679.600	Rp	84.823.000	
50.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	22.167.074.430	Rp	24.135.253.000	
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	31.215.764.720	Rp	29.740.562.000	
52.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.065.371.000	Rp	1.384.949.900	
53.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	332.985.000	Rp	200.000.000	
54. Program Penyuluhan						

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
54. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	6.229.044.020	Rp	1.818.234.000	
55. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.639.800.000	Rp	1.218.251.848	
56. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	519.000.000	Rp	665.000.000	
57. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	50.000.000	Rp	15.000.000	
58. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	470.592.868	Rp	250.000.000	
59. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.088.000.000	Rp	1.285.939.000	
60. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	100.000.000	Rp	-	
61. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	400.000.000	Rp	65.000.000	
62. Program Pemasaran Pariwisata	Rp	500.000.000	Rp	-	
63. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	200.000.000	Rp	585.400.000	
64. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000	Rp	113.000.000	
65. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000	Rp	87.000.000	
66. Program Penilaian					

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
66. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	
67. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	100.000.000	Rp	46.000.000	
68. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	190.000.000	Rp	204.000.000	
69. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	-	Rp	29.000.000	
70. Program Pengembangan UMKM	Rp	500.370.000	Rp	966.000.000	
71. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	104.920.000	Rp	52.700.000	
72. Program Promosi Penanaman Modal	Rp	124.206.840	Rp	74.550.000	
73. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	67.429.950	Rp	72.310.000	
74. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	344.300.000	Rp	583.883.000	
75. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	40.050.000	Rp	30.000.000	
76. Program Penataan Desa	Rp	55.000.000	Rp	40.000.000	
77. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	4.438.100.000	Rp	3.698.400.000	
78. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.419.140.000	Rp	3.944.940.000	

79. Program Pemberdayaan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
79. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.719.452.000	Rp	1.899.700.000	
80. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	544.607.000	Rp	864.235.900	
81. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.533.237.040	Rp	2.848.667.500	
82. Program Pemberdayaan Sosial	Rp	98.389.800	Rp	110.930.000	
83. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	451.346.100	Rp	1.006.530.000	
84. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	11.494.515.800	Rp	173.625.000	
85. Program Penanganan Bencana	Rp	88.936.950	Rp	163.924.000	
86. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	65.000.000	Rp	30.000.000	
87. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	-	Rp	105.974.532	
88. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	3.029.840.000	Rp	9.418.546.361	
89. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.600.000	Rp	555.688.990	
90. Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.950	Rp	400.000.000	
91. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	44.335.000	Rp	225.000.000	

Program Pembangunan Misi.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
			2023		2024	
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	1.965.695.076.601	Rp	2.054.738.226.800	
92.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.467.168.680.001	Rp	1.530.860.255.300	
93.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	14.490.933.950	Rp	15.033.925.700	
94.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.536.751.000	Rp	2.764.047.700	
95.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	11.626.757.000		12.725.170.700	
96.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	535.489.500	Rp	167.975.500	
97.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	31.190.000	Rp	94.935.000	
98.	Program Pencatatan Sipil	Rp	672.783.000	Rp	1.700.162.200	
99.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	33.565.000	Rp	35.013.300	
100.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	27.295.000	Rp	30.033.500	
101.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	824.500.400	Rp	600.000.000	
102.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.270.031.900	Rp	1.296.592.900	
103.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.752.111.000	Rp	2.433.392.800	
104.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	50.000.000	Rp	85.518.400	

105. Program Penyelenggaraan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

	Program	Anggaran Tahun				Keterangan
			2023		2024	
105.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	100.000.000	Rp	75.000.000	
106.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	214.999.800	Rp	262.158.000	
107.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	146.496.000	Rp	95.000.000	
108.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	88.504.200	Rp	85.000.000	
109.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.904.977.000	Rp	2.000.000.000	
110.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.591.535.000	Rp	1.450.000.000	
111.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	340.669.000	Rp	315.658.000	
112.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	163.659.500	Rp	84.345.000	
113.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	451.145.592.800	Rp	473.647.073.000	
114.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.759.964.550	Rp	923.788.000	
115.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.489.372.000	Rp	4.979.962.000	
116.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	2.011.871.000	Rp	1.804.081.000	
117.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	717.348.000	Rp	1.189.138.800	

Program Pembangunan Misi Kelima

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el_setda@grobogan.go.id

Program		Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024		
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	41.002.395.000	Rp	55.745.411.400	
118.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	4.824.153.400	Rp	932.600.000	
119.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	700.000.000	
120.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	625.982.600	Rp	780.853.600	
121.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	500.331.000	Rp	631.000.000	
122.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.955.338.000	Rp	2.225.422.500	
123.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	27.951.800.000	Rp	40.200.200.000	
124.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	175.000.000	Rp	60.000.000	
125.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	350.000.000	Rp	469.000.000	

126. Program Peningkatan

Program	Anggaran Tahun				Keterangan
		2023		2024	
126. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.862.138.000	Rp	9.679.449.200	
127. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	57.652.000	Rp	66.886.100	
Jumlah	Rp	2.788.828.451.820	Rp	2.804.649.517.000	

Purwodadi, 11 Januari 2024

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 20 Oktober 2024

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BUPATI GROBOGAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,53	71,53
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,84	86,84
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,34	12,34
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,04	7,04
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,14	75,14
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	Madya (0,6375 – 0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,68	80,68
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	79,16	79,16
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (145,00)	Sedang (145,00)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	87,22	87,22

6) Persentase.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,34	92,34
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	76,07	76,07
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9) Indeks kualitas air	Indeks	80,10	51,05
		10) Indeks kualitas udara	Indeks	87,15	87,15
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,75	58,16
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	46,00	46,00
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,68	0,68
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	5±1	5±1
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,03–10,63	10,03–10,63
7.	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23	1,23

15) Pertumbuhan PDRB

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50	0,50
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,59	1,59
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,47	1,47
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	870,467	870,467
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa membangun	Indeks	0,70	0,70
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20	4,20

Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	BB (71,00)	BB (71,00)
	12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,70)	B (77,70)

23) Indeks Inovasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Penetapan	Perubahan
		23) Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya <i>e-government</i> yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30	3,30
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	BB (70,10)	BB (70,10)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,120)	Level 3 (3,120)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (255)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V. Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat		9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	78,40	78,40
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	78,40	78,40

30) Persentase toleransi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Program		Penetapan		Anggaran Perubahan	Keterangan
Program Pembangunan Misi Pertama	Rp	432.232.692.500	Rp	463,117,690,075	7,1%
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	274.272.018.000	Rp	284.398.268.568	3,7%
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	130.000.000	Rp	130.000.000	0%
3. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	335.464.500	Rp	335.464.500	0%
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	120.310.561.815	Rp	132.997.388.007	10.5%
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	559.600.000	Rp	2.596.350.000	364%
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	885.905.785	Rp	515.831.000	-41,8%
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	715.050.000	Rp	1.527.472.800	-113,6%
8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	430.000.000	Rp	430.000.000	0%
9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	16.927.000.000	Rp	22.258.025.000	31,5%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.300.000.000	Rp	1.300.000.000	0%
11. Program Pengendalian Penduduk	Rp	514.404.200	Rp	514.404.200	0%
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5.673.352.100	Rp	5.673.352.100	0%
13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	7.678.792.000	Rp	7.678.792.000	0%
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	0%
15. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.434.760.000	Rp	1.584.760.000	10,5%
16. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	0,00%
17. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	70.000.000	Rp	70.000.000	0,00%
18. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	540.917.600	Rp	591.588.200	9,4%
19. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	60.000.000	Rp	92.101.000	53,5%
20. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	37.000.000	Rp	37.000.000	0,00%
21. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	267.866.500	Rp	296.892.700	10,8%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp	171.394.757.969	Rp	198.716.585.119	15,9%
22. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	35.112.173.780	Rp	41.677.179.140	18,7%
23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	6.601.390.000	Rp	7.272.490.000	10,2%
24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	12.479.788.368	Rp	12.534.404.368	0,4%
25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	6.549.910.710	Rp	6.849.910.710	4,6%
26. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	476.000.000	Rp	636.200.000	33,7%
27. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	71.603.853.660	Rp	78.230.013.700	9,3%
28. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	198.247.000	Rp	325.195.250	64%
29. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	805.338.000	Rp	805.338.000	0%
30. Program Penatagunaan Tanah	Rp	1.500.000.000	Rp	2.376.722.700	58,4%
31. Program Pengembangan Perumahan	Rp	30.000.000	Rp	784.472.000	2.514,9%
32. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	6.445.000.000	Rp	8.966.785.000	39,1%
33. Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	8.616.540.450	Rp	11.327.720.450	31,5%

Program	Anggaran				Keterangan
	Penetapan		Perubahan		
34. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	2,505,592,801	Rp	3,740,701,301	49,3%
35. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000	0,00%
36. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	760,000,000	Rp	760,000,000	0,00%
37. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	1,880,000,000	Rp	2,534,475,000	34,8%
38. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75,000,000	Rp	75.000.000	0,00%
39. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	40,000,000	Rp	40,000,000.00	0,00%
40. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	6.240.000.000	Rp	6.790.000.000	8,8%
41. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	0%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
42. Program Pengelolaan Persampahan	Rp	50.000.000	Rp	881.117.100	1,662.2%
43. Program Penanggulangan Bencana	Rp	6.994.303.200	Rp	7.890.311.300	12.8%
44. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.211.620.000	Rp	3.998.549.100	80.8%
Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp	90.538.428.331	Rp	109.459.640.931	20.9%
45. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	95.400.000	Rp	116,400,000	22%
46. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.200.010.300	Rp	1,250,010,300	4,2%
47. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	84.823.000	Rp	174,497,000	105,7%
48. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	24.135.253.000	Rp	26,298,404,800	9%
49. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	29.740.562.000	Rp	32,596,026,400	9,6%
50. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.384.949.900	Rp	1,385,074,500	0,009%
51. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	200.000.000	Rp	200,000,000	0%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
52.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.818.234.000	Rp	2.397.183.200	31,8%
53.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.218.251.848	Rp	5.436.556.548	346,3%
54.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	665.000.000	Rp	665.000.000	0%
55.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	0%
56.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000	0%
57.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.285.939.000	Rp	1.189.126.000	-7.5%
58.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	65.000.000	Rp	104.356.000	60,5%
59.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	585.400.000	Rp	585.400.000	0%
60.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	113.000.000	Rp	-	-100%
61.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	87.000.000	Rp	200.000.000	129,9%
62.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0%
63.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	46.000.000	Rp	46.000.000	0%
64.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	204.000.000	Rp	204.000.000	0%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

	Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
65.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	29,000,000	Rp	29,000,000	0%
66.	Program Pengembangan UMKM	Rp	966,000,000	Rp	966,000,000	0%
67.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52,700,000	Rp	52,700,000	0%
68.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	74,550,000	Rp	74,550,000	0%
69.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	72,310,000	Rp	72,310,000	0%
70.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	583,883,000	Rp	583,883,000	0%
71.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	30,000,000	Rp	30,000,000	0%
72.	Program Penataan Desa	Rp	40,000,000	Rp	40,000,000	0%
73.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	3,698,400,000	Rp	4,395,400,000	18,8%
74.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3,944,940,000	Rp	4,009,940,000	1,6%
75.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1,899,700,000	Rp	1,899,700,000	0%
76.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	864.235.900	Rp	950.787.800	10%
77.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.848.667.500	Rp	2.839.570.500	-0,3%
78.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	110.930.000	Rp	110.930.000	0%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran				Keterangan
	Penetapan		Perubahan		
78. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	1.006.530.000	Rp	1.006.530.000	0%
79. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	173.625.000	Rp	7.644.071.000	4302,6%
80. Program Penanganan Bencana	Rp	163.924.000	Rp	163.924.000	0%
81. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	0%
82. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	105.974.532	Rp	105.974.532	0%
83. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	9.418.546.361	Rp	10.158.628.361	7,9%
84. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	555.688.990	Rp	555.688.990	0%
85. Program Hubungan Industrial	Rp	400.000.000	Rp	400.000.000	0%
86. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	225.000.000	Rp	177.018.000	-21,3%
Program Pembangunan Misi Keempat	Rp	2.054.738.226.800	Rp	2.195.877.086.264	6,9%
87. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.530.860.255.300	Rp	1.666.610.264.964	8,6%

Program	Anggaran				Keterangan
	Penetapan		Perubahan		
88. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	15.033.925.700	Rp	16.029.696.700	6,6%
89. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.764.047.700	Rp	1.744.252.700	-36,9%
90. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	12.725.170.700	Rp	13.076.250.700	2,8%
91. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	167.975.500	Rp	136.138.500	-19,0%
92. Program Pendaftaran Penduduk	Rp	94.935.000	Rp	94.935.000	0,0%
93. Program Pencatatan Sipil	Rp	1.700.162.200	Rp	1.700.162.200	0,0%
94. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	35.013.300	Rp	35.013.300	0,0%
95. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	30.033.500	Rp	30.033.500	0,0%
96. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	600.000.000	Rp	737.406.000	22,9%
97. Program Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.296.592.900	Rp	1.421.902.400	9,7%
98. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.433.392.800	Rp	2.310.034.450	-5,1%
99. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	85.518.400	Rp	85.518.400	0,0%
100 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	75.000.000	Rp	100.000.000	0.00%

	Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
101.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	262.158.000	Rp	262.158.000	0%
102.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	95.000.000	Rp	95.000.000	0%
103.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	85.000.000	Rp	85.000.000	0%
104.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.000.000.000	Rp	2.360.000.000	18%
105.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.450.000.000	Rp	1.450.000.000	0%
106.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	315.658.000	Rp	324.383.000	2,8%
107.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	84.345.000	Rp	75.125.000	-10,9%
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	473.647.073.000	Rp	478.373.485.150	1%
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	923.788.000	Rp	1.046.738.000	13,3%
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.979.962.000	Rp	4.738.769.000	-4,8%
111.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.804.081.000	Rp	1.828.787.900	1,4%
112.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.189.138.800	Rp	1.151.031.400	-3,2%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	55.745.411.400	Rp	56.211.835.990	0.8%
113.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	932.600.000	Rp	1.212.600.000	30%
114.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	700.000.000	0%
115.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	780.853.600	Rp	780.853.600	0%
116.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	631.000.000	Rp	635.000.000	0,6%
117.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	2.225.422.500	Rp	2.445.880.800	9,9%
118.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	40.200.200.000	Rp	40.250.200.000	0,1%
119.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	0,0%
120.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	469.000.000	Rp	469.000.000	0,0%
121.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.679.449.200	Rp	9.597.255.490	-0,8%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

	Program	Anggaran		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
122.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 66.886.100	Rp 61,046,100	-8,7%
Jumlah		Rp 2.804.649.517,000	Rp 3.023.382.838.379	7,8%

Purwodadi, 20 Oktober 2024

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M



grobogan
gumirógól gumirógah gumirógul

